



BerAKHLAK #bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif #melayani
bangsa

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA TAHUN 2024



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Shalom...Om Swastiastu...Namo Budaya
Salam Kebajikan untuk kita semua

Adil Katalino, Bacuramin Ka'Saruga, Basengat Ka'Jubata.
(Baik Pada Sesama Manusia, berpandangan hidup seperti perkataan baik di surga, kehidupan manusia bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa).

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas ijin-Nya Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Palangkaraya dapat diselesaikan. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disusun untuk menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024, sebagai bentuk pertanggungjawaban Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara keseluruhan, LPK Tahun 2024 berisi hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah.

Sejalan dengan salah satu nilai utama Mahkamah Agung RI yaitu perlakuan yang sama di hadapan hukum, kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan, salah satunya dengan memastikan bahwa sistem peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya dapat diakses dan digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan Pengadilan yang Inklusif.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya senantiasa memberikan semua informasi terkait penanganan perkara kepada para pihak melalui penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) agar pihak/masyarakat bisa mengakses riwayat perkara mereka kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah. Saat ini SIPP Versi 5.6.4. telah terpasang di seluruh pengadilan negeri se Kalimantan Tengah. Pemantauan terus dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya melalui Monitoring Implementasi SIPP (MIS).

Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana dengan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi E-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasaryakatan. Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah mengimplementasikan aplikasi E-Berpadu pada seluruh pengadilan negeri di wilayah hukum.

Dalam hal penyelesaian perkara, capaian kami termasuk dalam kategori sangat baik. Dari jumlah **384** perkara yang harus diselesaikan di tahun 2024, Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah berhasil memutus sejumlah **378** perkara atau sebesar **98,43%**. Perkara yang diputus terdiri dari Perkara Perdata sejumlah 94 Perkara, Perkara Pidana sejumlah 268 Perkara dan Perkara Pidana Tipikor sejumlah 16 Perkara. Jumlah perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya tahun 2024 menurun **2,78%** jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan rata-rata waktu penyelesaian perkara selama 17 (tujuh belas) hari kalender.

Berdasarkan Data Perkara yang telah diputus dan dapat mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Negeri sejumlah 2.777 perkara selama tahun 2024 yang mengajukan upaya hukum Banding sejumlah 378 perkara atau sebesar 13,61 % hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan public (public trust) terhadap Pengadilan Negeri cukup tinggi.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia menjadi hal yang sangat diperlukan oleh setiap organisasi. Pengadilan Tinggi Palangkaraya selama tahun 2024 telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Layanan BMN pada tanggal 17 Desember 2024 dengan jumlah peserta 74 orang terdiri dari 29 orang yang mengikuti secara *offline* dan 45 orang secara *online*, diikuti oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi agar diperoleh kinerja yang optimal.

Kinerja yang optimal tersebut membuahkan hasil yang membanggakan baik di Pengadilan Tinggi Palangkaraya maupun Satuan Kerja dibawahnya sehingga memperoleh berbagai penghargaan baik dari Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, maupun dari Kementerian keuangan antara lain Pengadilan Tinggi Palangkaraya kembali meraih Peringkat II kategori pengadilan tinggi untuk ke 5 (lima) kalinya dalam Lomba Layanan Pengadilan/ PTSP selain itu, juga menerima Peringkat II Piagam Penghargaan atas Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-W Tahun 2024. Penganugerahan Insan anti gratifikasi yang diberikan Badan Pengawasan MA RI kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau serta penghargaan lain sebagaimana terurai dalam LPK ini.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan satuan kerja di wilayah hukumnya saat ini telah berhasil meraih penghargaan dan mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pertama kali diraih Pengadilan Negeri Sampit di tahun 2019, Pengadilan Tinggi Palangkaraya di tahun 2020 dan selanjutnya oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun di tahun 2021. Saat ini sedang berupaya untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta mendorong Pengadilan Negeri lainnya agar mendapatkan predikat WBK.

Demikian LPK ini disusun oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya, untuk itu apresiasi dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LPK ini. Semoga kerja keras semua pihak mampu membawa Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam upaya mewujudkan peradilan yang Agung dan Modern berbasis Teknologi Informasi guna mewujudkan Tata Kelola Pengadilan yang Transparan dan Akuntabel.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Palangka Raya, 21 Januari 2025



Diah Sulastri Dewi

PROFIL PIMPINAN



KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

NAMA : Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.

NIP : 196104021982032003

TTL : Medan, 02 April 1961

PANGKAT : Pembina Utama - (IV/e)

PENDIDIKAN : S3/Doktor Ilmu Hukum Univ. Jayabaya

RIWAYAT JABATAN

1	2024 - Sekarang	Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
2	2023 - 2024	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
3	2022 - 2023	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau
4	2022 - 2022	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang
5	2021 - 2022	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta
6	2017 - 2021	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
7	2016 - 2017	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung
8	2015 - 2016	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung
9	2014 - 2015	Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
10	2013 - 2014	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
11	2011 - 2013	Ketua Pengadilan Negeri Stabat
12	2010 - 2011	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat
13	2009 - 2010	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat
14	2004 - 2009	Hakim Pengadilan Negeri Bandung
15	2000 - 2004	Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung
16	1996 - 2000	Hakim Pengadilan Negeri Sumber
17	1993 - 1996	Cakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
18	1983 - 1993	PNS/Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan
19	1982 - 1983	CPNS Pengadilan Tinggi Medan

PROFIL PIMPINAN



WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

NAMA : Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H.

NIP : 196107171988031002

TTL : Simalungun, 17 Juli 1961

PANGKAT : Pembina Utama - (IV/e)

PENDIDIKAN : S3/Doktor Ilmu Hukum Univ. Jayabaya

RIWAYAT JABATAN

1	2023 - 16 Januari 2025	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
2	2022 - 2023	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon
3	2022 - 2022	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta
4	2019 - 2022	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar
5	2018 - 2019	Hakim Yustisial Ditjen Badilum
6	2017 - 2018	Ketua Pengadilan Negeri Medan
7	2016 - 2017	Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru
8	2014 - 2016	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan
9	2014 - 2014	Ketua Pengadilan Negeri Karawang
10	2013 - 2014	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor
11	2011 - 2013	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
12	2006 - 2011	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas
13	2001 - 2006	Hakim Pengadilan Negeri Cibinong
14	1997 - 2001	Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
15	1992 - 1997	Hakim Pengadilan Negeri Curup
16	1989 - 1992	PNS / Cakim Pengadilan Negeri Bekasi
17	1988 - 1989	CPNS Pengadilan Negeri Bekasi

PROFIL HAKIM TINGGI



DIDIK WURYANTO, S.H., M.Hum.



SIGIT SUTRIONO, S.H., M.Hum.



BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.



HERU BUDYANTO, S.H, M.H.



ABDUL WAHIB, S.H., M.H.



SARI SUDARMI, S.H.

PROFIL HAKIM TINGGI



MASKUR, S.H.



SUSWANTI, S.H., M.Hum



SUNDARI, S.H., M.H.



ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H.



ESTHER MEGARIA SITORUS, S.H., M.Hum.



NINIK HENDRAS SUSIOWATI, S.H., M.H.

PROFIL HAKIM AD HOC



AGUNG ISWANTO, S.H., M.H.



Dr. LILY SOLICHUL MUKMINAH, S.H., M.H.



ERRY THERESIA, S.H., M.H.



PIMPINAN, HAKIM TINGGI & HAKIM AD HOC PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA



AGUNG ISWANTO | HERU BUDYANTO | DIDIK WURYANTO | SIGIT SUTRIONO | ESTHER MEGARIA SITORUS | NINIK HENDRAS SUSILOWATI | LILY SOLICHUL MUKMINAH | SUSWANTI |
DIAH SULASTRI DEWI | MARSUDIN NAINGGOLAN | SARI SUDARMI | SUNDARI | ERRY THERESIA | ANRY WIDYO LAKSONO | MASKUR | ABDUL WAHIB | BONNY SANGGAH

PROFIL PANITERA



PANITERA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

NAMA : Hasan Udi, S.H., M.H.

NIP : 196601061995031002

TTL : Demak, 6 Januari 1966

PANGKAT : Pembina Tingkat I - (IV/b)

PENDIDIKAN : S2/Universitas Muria Kudus

RIWAYAT JABATAN

1	2024 - Sekarang	Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya
2	2021 - 2024	Panitera Pengadilan Negeri Pati
3	2018 - 2021	Panitera Pengadilan Negeri Kudus
4	2017 - 2018	Panitera Pengadilan Negeri Praya
5	2014 - 2017	Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rembang
6	2009 - 2014	Wakil Panitera Pengadilan Negeri Demak
7	2006 - 2009	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Demak
8	1999 - 2006	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak
9	1996 - 1999	Pelaksana Pengadilan Negeri Demak
10	1995 - 1996	CPNS Pengadilan Negeri Demak

PROFIL SEKRETARIS



SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

NAMA : Meidyawati, S.E., M.E.

NIP : 197205142006042001

TTL : Surabaya, 14 Mei 1972

PANGKAT : Pembina Tingkat I - (IV/b)

PENDIDIKAN : S2 IAIN Palangka Raya

RIWAYAT JABATAN

1	2020 - Sekarang	Sekretaris Pengadilan Tinggi Palangkaraya
2	2015 - 2020	Sekretaris Pengadilan Negeri Sampit
3	2010 - 2015	Kasubbag Keuangan Pengadilan Tinggi Palangkaraya
4	2009 - 2010	Pelaksana Pengadilan Tinggi Palangkaraya
5	2007 - 2009	Pelaksana Pengadilan Negeri Sampit
6	2006 - 2007	CPNS Pengadilan Negeri Sampit



PIMPINAN & PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA



AHMAD GAZALI | BAMBANG SUKINO | SAMSUL RIZAL | LINDA | RUSPELIATI | HASAN UDI | DIAH SULASTRI DEWI | MARSUDIN NAINGGOLAN | MEIDYAWATI |
FAISAL SRU BRAMANTYO | ISTI YANI | FITRIYA NOR AINI | MUHAMMAD RUSGIANSYAH | WAHYU TEGUH



KELUARGA BESAR PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA



KETUA PENGADILAN NEGERI



RICKY FARDINAND, S.H., M.H.
KPN PALANGKARAYA



BENNY OCTAVIANUS, S.H., M.H.
KPN SAMPIT



DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.
KPN PANGKALAN BUN



ARIEF KADARMO, S.H., M.H.
KPN KUALA KAPUAS



SUGIANNUR, S.H., M.H.
KPN MUARA TEWEH



AHMAD HUSAINI, S.H.M.H.
KPN BUNTOK



MOCH. ISA NAZARUDIN, S.H., M.H.
KPN TAMIANG LAYANG



NATARIA CRISTINA TRIANA, S.H, M.Hum.
KPN KASONGAN



Dr. GALIH BAWONO, S.H., M.H.
KPN KUALA KURUN



EVAN SETIAWAN DESE, S.H., M.H.
KPN NANGA BULIK



MOHAMAD ZAKIUDDIN, S.H.
KPN PULANG PISAU

PERISTIWA PENTING TAHUN 2024

RAPAT KOORDINASI PENEGAK HUKUM DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

Palangka Raya, 08 Januari 2024 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya menggelar acara Rapat Koordinasi Penegak Hukum dan Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2024.



PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA

Palangka Raya, 30 Januari 2024 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya menyelenggarakan Penandatanganan Komitmen Bersama yang diikuti Hakim Tinggi dan Hakim Ad-Hoc, Pejabat Struktural/ Fungsional dan seluruh ASN serta PPNPN.

PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

Palangka Raya, 31 Januari 2024 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya menggelar Kegiatan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Tahun 2023.



KPT PALANGKARAYA HADIRI LAPTAH MAHKAMAH AGUNG RI

Jakarta, 20 Februari 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2023.

PELANTIKAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT

Palangka Raya, 22 Maret 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua Pengadilan Negeri Sampit.



KPT CUP TAHUN 2024

Palangka Raya – 28 Juni 2024 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengadakan Turnamen Tenis KPT CUP Tahun 2024

KUNJUNGAN KERJA RESES DPR RI

Pangkalan Bun – 15 Juli 2024 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima Komisi III DPR RI dalam rangka Kunjungan Kerja Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.



UPACARA PENGHORMATAN TERAKHIR ALMARHUM BAPAK H. AJIDINNOR, S.H., M.H.

Banjarmasin, 21 Juli 2024 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya melaksanakan Upacara Penghormatan Terakhir Almarhum Bapak H. Ajidinnor, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya).

PELANTIKAN ADVOKAT DARI 2 ORGANISASI ADVOKAT

Palangkaraya - 31 Juli 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah/ janji Advokat sebanyak 19 orang yang berasal dari Perkumpulan Pengacara Muda Indonesia (Permadin) dan Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI).



PELANTIKAN HAKIM TINGGI

Palangka Raya, 1 Agustus 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah jabatan dan melantik Bapak Maskur, S.H., dan Ibu Sari Sudarmi, S.H. sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

PELANTIKAN KPN KUALA KAPUAS

Palangka Raya, 30 Juli 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas



PELANTIKAN HAKIM TINGGI

Palangka Raya, 6 Agustus 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah jabatan dan melantik ibu Suswanti, S.H., M.Hum sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

PELANTIKAN KPN PANGKALAN BUN

Palangka Raya, 7 Agustus 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.



PELAKSANAAN PENILAIAN AMPUH

Palangka Raya, 15 Agustus 2024 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan Asesmen sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

PENGAMBILAN SUMPAH ANGGOTA DPRD PROVINSI KALTENG

Palangka Raya, 28 Agustus 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2024-2029.



TURNAMEN TENIS PERORANGAN PIALA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI KE-IV TAHUN 2024

Palangka Raya, 28 Agustus 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2024-2029.

PELANTIKAN KPT PALANGKARAYA

Jakarta, 3 Oktober 2024 | Ketua Mahkamah Agung RI mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Ibu Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.



KPT MENJADI NARASUMBER KEGIATAN "THE FRENCH - INDONESIAN DAY OF LAW"

Jakarta, 7 Oktober 2024 | KPT Palangkaraya, Ibu Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. menjadi narasumber dalam kegiatan "The French - Indonesian Day of Law" yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Perancis.

KPT MENJADI NARASUMBER PADA BIMTEK PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Ambon, 8 - 10 Oktober 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Ibu Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Ditjen Badilum MARI.



KPT MENJADI NARASUMBER PADA BIMTEK DITJEN MARI

Ambon, 8 - 10 Oktober 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Ibu Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Ditjen Badilum MARI.

PELANTIKAN KPN PALANGKARAYA

Palangka Raya, 8 November 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya.



PELANTIKAN HAKIM TINGGI

Palangka Raya, 18 November 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah jabatan dan pelantikan ibu Sundari, S.H., M.H., sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya.



PELANTIKAN KPN NANGA BULIK

Palangka Raya, 21 November 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik.



PELANTIKAN HAKIM TINGGI

Palangka Raya, 22 November 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah jabatan dan melantik Ibu Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., Bapak Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., dan Ibu Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H. sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya.



**PENGAMBILAN SUMPAH PIMPINAN DPRD
PROV KALTENG**

Palangka Raya, 26 November 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya memandu pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2024-2029.



**PELANTIKAN PANITERA PENGADILAN
TINGGI PALANGKARAYA**

Palangka Raya, 29 November 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengambil sumpah dan melantik Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

**PENERIMAAN PENGHARGAAN ABHINAYA
UPANGGA WISESA TAHUN 2024**

Solo – 5 Desember 2024 | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima penghargaan dalam acara Abhinaya Upangga Wisesa 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI.



ANUGRAH / PENGHARGAAN PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA 2024



PERINGKAT II PENILAIAN LAYANAN PENGADILAN ATAU PTSP KATEGORI PENGADILAN TINGGI TAHUN 2024

Pada tanggal 5 Desember 2024, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima penghargaan lomba layanan Pengadilan atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai Peringkat II Kategori Pengadilan Tinggi oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

PERINGKAT III CAPAIAN NILAI TERTINGGI PADA EIS TAHUN 2024 UNTUK KATEGORI PENGADILAN TINGGI PERKARA 1 S/D 300

Pada tanggal 5 Desember 2024, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima penghargaan Capaian Nilai Tertinggi pada Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Tahun 2024 sebagai Peringkat II untuk kategori Pengadilan Tinggi dengan Perkara 1 s/d 300 oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.



PREDIKAT UNGGUL DALAM SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH

Pada tanggal 5 Desember 2024, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh dengan Predikat UNGGUL oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

PERINGKAT II KATEGORI UAPPA-W BESAR ATAS KINERJA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UAPPA-W TAHUN 2024

Pada tanggal 25 Juni 2024, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima penghargaan sebagai Peringkat 2 Kategori Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W) Besar atas Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-W Tahun 2024 oleh Kanwil DjPb Provinsi Kalimantan Tengah



ANUGRAH / PENGHARGAAN

PENGADILAN NEGERI SE-KALIMANTAN TENGAH

NO	SATUAN KERJA	NAMA PENGHARGAAN
1.	Pengadilan Negeri Palangkaraya	<p>1. Peringkat III Penghargaan Penilaian Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.</p> <p>2. Peringkat I Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Survei Kepuasan Masyarakat Kategori dalam Anugerah Mahkamah Agung RI 2024.</p> <p>3. Peringkat I Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Negeri Dengan Beban Perkara 501-1000 dalam Anugerah Mahkamah Agung RI 2024.</p>
2.	Pengadilan Negeri Sampit	<p>1. Terbaik X Penilaian Layanan Pengadilan (PTSP) pada Pengadilan Negeri Kelas IB dan Pengadilan Negeri Kelas II Tahun 2024 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.</p> <p>2. Piagam Penghargaan Atas Pencapaian Terbaik Ketiga Penilaian IKPA Terbaik Kategori Pagu Kecil Bobot Kecil, Tahun Anggaran 2023 Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, diperoleh tanggal 01 Maret 2024 dari Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>3. Piagam Penghargaan Peringkat I Satuan Kerja Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Pengelolaan Kinerja APBN Periode Semester II Terbaik Kategori Pagu DIPA Kelolaan Kecil Tahun Anggaran 2024, diperoleh tanggal 25 April 2024 dari KPPN Sampit.</p> <p>4. Piagam Penghargaan Peringkat II Satuan Kerja dengan Penyelesaian Rekon dan Penerbitan Surat Hasil Rekon (SHR) Terbaik Semester II Tahun Anggaran 2023 di peroleh pada tanggal 25 April 2024 dari KKPN Sampit.</p>
3.	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	<p>1. Terbaik VII Penilaian Layanan Hukum Kategori Pos Bantuan Hukum dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.</p> <p>2. Nilai Sempurna IKPA pada Kategori Pagu Kecil Bobot Kecil Periode Triwulan I (DIPA 01) dari Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah</p>

		<p>3. Nilai Sempurna IKPA pada Kategori Pagu Kecil Bobot Kecil Periode Triwulan I (DIPA 03) dari Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>4. Nilai Sempurna IKPA pada Kategori Pagu Kecil Bobot Kecil Periode Semester I (DIPA 01) dari Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>5. Nilai Sempurna IKPA pada Kategori Pagu Kecil Bobot Kecil Periode Semester I (DIPA 03) dari Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>6. Nilai Sempurna IKPA pada Kategori Pagu Kecil Bobot Kecil Periode Triwulan III (DIPA 01) dari Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>7. Nilai Sempurna IKPA pada Kategori Pagu Kecil Bobot Kecil Periode Triwulan III (DIPA 03) dari Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah</p>
4.	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	1. Terbaik III Administrasi dan keuangan Perkara pada Kategori PN kelas IB dan kelas II dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
5.	Pengadilan Negeri Muara Teweh	<p>1. Peringkat Pertama atas Pertama Penilaian Digitalisasi Pembayaran pada Satuan Kerja Lingkungan dari KPPN Buntok.</p> <p>2. Nilai Sempurna IKPA Kategori Pagu Kecil Bobot Kecil Periode Semester I Tahun 2024 (DIPA 01) dari Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>3. Nilai Sempurna IKPA Kategori Pagu Kecil Bobot Kecil Periode Triwulan I Tahun 2024 (DIPA 03) dari Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah.</p>
6.	Pengadilan Negeri Buntok	<p>1. Peringkat Terbaik VI Capaian Nilai Tertinggi Pada Implementasi SIPP (EIS) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.</p> <p>2. Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dengan Predikat UNGGUL dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.</p>
7.	Pengadilan Negeri Kasongan	1. Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Gugatan Sederhana kategori Pengadilan Negeri dengan beban perkara 1-500 dengan mendapat Peringkat Terbaik III dalam Anugerah MA 2024.
8.	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	1. Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan 100% S.D. Bulan Maret 2024 dari KPP Pratama Palangkaraya.

9	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="719 203 1380 327">1. Penyelesaian Rekonsiliasi Eksternal Tercepat Periode November 2024 dari KPPN Palangka Raya (DIPA 01).<li data-bbox="719 338 1380 461">2. Penyelesaian Rekonsiliasi Eksternal Tercepat Periode November 2024 dari KPPN Palangka Raya (DIPA 03).<li data-bbox="719 472 1380 624">3. Penganugerahan insan anti gratifikasi tahun 2024 an. KPN Pulang Pisau Bapak Mohamad Zakiuddin, S.H. dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
---	--------------------------------	--

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	i
PROFIL PIMPINAN	iv
HAKIM TINGGI	vi
HAKIM TINGGI ADHOC TIPIKOR	viii
PROFIL PANITERA DAN SEKRETARIS	x
PROFIL KETUA PENGADILAN NEGERI SE-KALIMANTAN TENGAH	xiv
PERISTIWA PENTING TAHUN 2024.....	xvi
PRESTASI DAN PENGHARGAAN PT PALANGKARAYA TAHUN 2024	xxiii
PRESTASI DAN PENGHARGAAN PN SE-KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024	xxiv
DAFTAR ISI	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA & CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL	8
A. KEADAAN PERKARA	9
B. PENYELESAIAN PERKARA	14
C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL	17
- POSBAKUM	17
- SIDANG KELILING	18
- PERKARA PRODEO	19
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	21
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TI	75
A. PENGELOLA KEUANGAN	76
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	87
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	108
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	121
A. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	122
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	125
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK	132

BAB VI PENGAWASAN	164
A. INTERNAL	165
B. EVALUASI	169
BAB VII PENUTUP	171
A. SIMPULAN	172
B. SARAN	174



BAB I

PENDAHULUAN

- 3 SEJARAH PENGADILAN TINGGI
PALANGKARAYA

- 4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 6 VISI PENGADILAN TINGGI
PALANGKARAYA

- 6 MISI PENGADILAN TINGGI
PALANGKARAYA

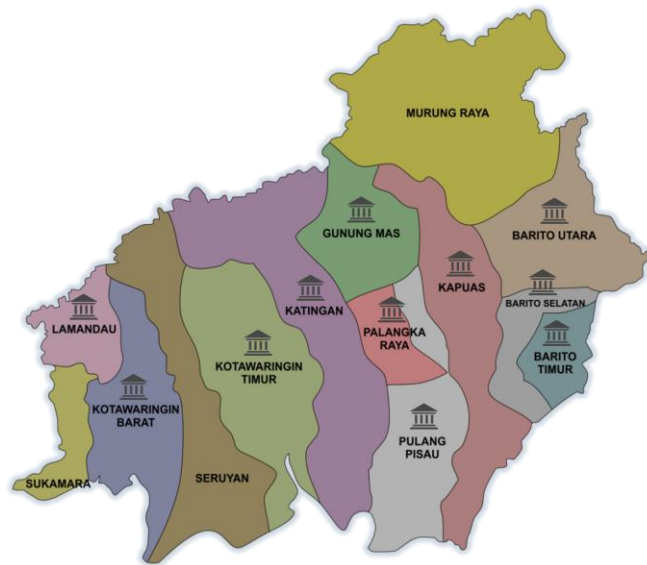
- 7 MOTO PENGADILAN TINGGI
PALANGKARAYA

BAB I

PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sebelum pemekaran, wilayah Kalimantan Tengah merupakan bagian dari Kalimantan Selatan. Pemekaran ini bertujuan untuk mempermudah pemerintahan dan pengelolaan wilayah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Setelah pemekaran, Kalimantan Tengah resmi berdiri sebagai provinsi sendiri pada tanggal 23 Mei 1957. Ibu kota provinsi ini adalah Palangkaraya. Kalimantan Tengah memiliki keanekaragaman budaya dan sumber daya alam yang melimpah, serta menjadi pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pembangunan lainnya di wilayah Kalimantan.



Gambar. Peta Provinsi Kalimantan Tengah dengan Luas 153.564 Km²

Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 1 (satu) Kota dan 13 (tiga belas) Kabupaten yaitu:

Tabel. Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Nama Kabupaten/Kota	Pusat Pemerintahan
1.	Kota Palangka Raya	Palangka Raya
2.	Kabupaten Kotawaringin Timur	Sampit
3.	Kabupaten Seruyan	Kuala Pembuang
4.	Kabupaten Kotawaringin Barat	Pangkalan Bun
5.	Kabupaten Sukamara	Sukamara
6.	Kabupaten Kapuas	Kuala Kapuas

7.	Kabupaten Barito Utara	Muara Teweh
8.	Kabupaten Murung Raya	Puruk Cahu
9.	Kabupaten Barito Selatan	Buntok
10.	Kabupaten Barito Timur	Tamiyang Layang
11.	Kabupaten Katingan	Kasongan
12.	Kabupaten Gunung Mas	Kuala Kurun
13.	Kabupaten Lumandau	Nanga Bulik
14.	Kabupaten Pulang Pisau	Pulang Pisau

A. SEJARAH PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Pada tanggal 29 Juli 1980 dibentuklah Pengadilan Tinggi Palangkaraya di Palangka Raya berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan wilayah hukum meliputi Provinsi Kalimantan Tengah memiliki yurisdiksi 6 (enam) Pengadilan Negeri, yaitu :

1. Pengadilan Negeri Palangkaraya;
2. Pengadilan Negeri Sampit;
3. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
4. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;
5. Pengadilan Negeri Muara Teweh, dan
6. Pengadilan Negeri Buntok.

Gedung Pengadilan Tinggi Palangkaraya dibangun dengan biaya/dana dari DIP 1979/1980 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), konstruksi bangunan dirancang oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Pembangunan dimulai pada tanggal 10 Desember 1979 dan selesai tanggal 8 Maret 1981. Kemudian pada tanggal 17 September 1981 diresmikan penggunaannya oleh Bapak Soeroto, S.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mewakili Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Pada tanggal 12 Desember 2006 dibentuklah Pengadilan Negeri Tamiang Layang di Tamiang Layang berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan **Pengadilan Negeri Tamiang Layang** Dan Pengadilan Negeri Batu Licin. Kemudian tanggal 26 Januari 2008 dibentuk Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008.

Pada tanggal 26 April 2016, dibentuk **Pengadilan Negeri Kuala Kurun**, **Pengadilan Negeri Nanga Bulik**, dan **Pengadilan Negeri Pulang Pisau** berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016. Pengadilan-pengadilan ini diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 dan mulai beroperasi sejak tanggal 28 Oktober 2018, dengan menempati gedung yang masih difasilitasi oleh pemerintah

daerah setempat. Hingga tanggal 31 Desember 2024, ketiga Pengadilan Negeri tersebut telah menempati gedung kantor yang baru, meskipun masih ada beberapa sarana lingkungan dan meubelair kerja yang belum terpenuhi.

Hingga tanggal 31 Desember 2024, Pengadilan Tinggi Palangkaraya membawahi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri, yang merupakan bagian penting dari sistem peradilan di wilayah Kalimantan Tengah. Pengadilan Negeri ini memiliki peran dalam menangani berbagai perkara baik pidana maupun perdata di tingkat pertama. Berikut adalah daftar Pengadilan Negeri yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Tinggi Palangkaraya:

Tabel. Pengadilan Negeri dan Wilayah Hukumnya

No.	Satuan Kerja	Wilayah Hukum
1.	Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas I A	Kota Palangka Raya
2.	Pengadilan Negeri Sampit Kelas I B	Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan
3.	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B	Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara
4.	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II	Kabupaten Kuala Kapuas
5.	Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II	Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya
6.	Pengadilan Negeri Buntok Kelas II	Kabupaten Barito Selatan
7.	Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II	Kabupaten Barito Timur
8.	Pengadilan Negeri Kasongan Kelas II	Kabupaten Katingan
9.	Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II	Kabupaten Gunung Mas
10.	Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II	Kabupaten Lamandau
11.	Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II	Kabupaten Pulang Pisau

Dengan demikian dari 14 kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Tengah, masih terdapat 3 kabupaten yaitu Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Seruyan yang belum dibentuk Pengadilan Negeri. Kabupaten Seruyan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, Kabupaten Sukamara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Kabupaten Murung Raya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dalam pasal 51 menyatakan:

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding.
2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. **Fungsi Mengadili (*judicialpower*)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.”
- b. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan ditingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- d. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- e. **Fungsi Lainnya :**
 - 1) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/1999).
 - 2) Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
 - 3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

C. VISI PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Sejalan dengan tujuan dan keinginan sebagaimana telah diuraikan dalam kebijakan umum peradilan yang ada di Pengadilan Tinggi Palangkaraya sesuai yang diamanatkan dalam Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan pedoman/arah pendekatan yang akan ditempuh.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi dan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menetapkan visinya yang dirumuskan dan dituangkan di dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 1.2. Visi Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Penetapan visi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat dan fokus bagi Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam mencapai keberhasilan organisasi. Penetapan visi juga merupakan wujud komitmen Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan kepada *stakeholders* Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

D. MISI PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menetapkan misi yang juga tertuang di dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2020 - 2024 yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- 1 Menjaga kemandirian Badan Peradilan
- 2 Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3 Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
- 4 Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

E. MOTO PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Dalam pelaksanaan tugas melaksanakan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan dan pengguna layanan peradilan di Kalimantan Tengah, Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menetapkan moto berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 10 Januari 2017 yaitu "CANTIK" yang artinya :

- C** • Cerdas melaksanakan tugas
- A** • Adil dalam berperilaku
- N** • Nyaman dalam bekerja
- T** • Tangkas dalam Melayani
- I** • Independen dari segala pengaruh
- K** • Komitmen dalam penegakan hukum

Moto ini sangat relevan dalam mewujudkan visi dan misi sehingga masih dipertahankan sampai saat ini.

BAB II

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

- 9 KEADAAN PERKARA
- 14 PENYELESAIAN PERKARA
- 17 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

BAB II

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

A. KEADAAN PERKARA

1. Keadaan Perkara Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2024

Keadaan penyelesaian perkara pidana, pidana anak, Tipikor dan perdata di Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut ini :

No	Perkara	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Putus 2024	Sisa 2024	Persentase Putus
1.	Pidana	Pidana	5	260	261	4	98,49%
		Pidana Khusus Anak	0	7	7	0	100%
		Tindak Pidana Korupsi	0	16	16	0	100%
2.	Perdata	Perdata	6	90	94	2	97,91%
		Jumlah	11	373	378	6	98,43%

2. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah

Keadaan penyelesaian perkara Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut ini :

a. Perkara Pidana Biasa

No	Nama Pengadilan	Sisa Tahun 2023	Masuk 2024	Putus 2024	Sisa 2024	Persentase Putus
1.	PN PALANGKARAYA	39	381	364	56	86,67%
2.	PN SAMPIT	52	591	560	83	87,09%
3.	PN PANGKALAN BUN	58	422	441	39	91,87%
4.	PN KUALA KAPUAS	33	236	243	26	90,33%
5.	PN BUNTOK	2	88	90	0	100%
6.	PN MUARA TEWEH	14	156	148	22	87,05%
7.	PN TAMIANG LAYANG	2	108	107	3	97,27%
8.	PN KASONGAN	12	136	132	16	89,18%
9.	PN KUALA KURUN	8	126	119	15	88,80%

10.	PN. NANGA BULIK	14	82	90	6	93,75%
11.	PN PULANG PISAU	11	88	87	12	87,87%
Jumlah		245	2414	2381	278	89,54%

b. Perkara Pidana Singkat

No	Nama Pengadilan	Sisa Tahun 2023	Masuk 2024	Putus 2024	Sisa 2024	Persentase Putus
1.	PN. PALANGKARAYA	0	0	0	0	100%
2.	PN. SAMPIT	0	0	0	0	100%
3.	PN. PANGKALAN BUN	0	0	0	0	100%
4.	PN. KUALA KAPUAS	0	0	0	0	100%
5.	PN. BUNTOK	0	0	0	0	100%
6.	PN. MUARA TEWEH	0	0	0	0	100%
7.	PN. TAMIANG LAYANG	0	0	0	0	100%
8.	PN. KASONGAN	0	0	0	0	100%
9.	PN. KUALA KURUN	0	0	0	0	100%
10.	PN. NANGA BULIK	0	0	0	0	100%
11.	PN. PULANG PISAU	0	0	0	0	100%
JUMLAH		0	0	0	0	100%

c. Perkara Pidana Cepat

No	Nama Pengadilan	Sisa Tahun 2023	Masuk 2024	Putus 2024	Sisa 2024	Persentase Putus
1.	PN. PALANGKARAYA	0	20	20	0	100%
2.	PN. SAMPIT	0	18	18	0	100%
3.	PN. PANGKALAN BUN	0	21	21	0	100%
4.	PN. KUALA KAPUAS	0	2	2	0	100%
5.	PN. BUNTOK	0	2	2	0	100%
6.	PN. MUARA TEWEH	0	0	0	0	100%
7.	PN. TAMIANG LAYANG	0	2	2	0	100%
8.	PN. KASONGAN	0	6	6	0	100%
9.	PN. KUALA KURUN	0	1	1	0	100%
10.	PN. NANGA BULIK	0	12	12	0	100%
11.	PN. PULANG PISAU	0	2	2	0	100%
JUMLAH		0	86	86	0	100%

d. Perkara Pidana Lalu Lintas

No	Nama Pengadilan	Sisa Tahun 2023	Masuk 2024	Putus 2024	Sisa 2024	Persentase Putus
1.	PN. PALANGKARAYA	0	2633	2633	0	100%
2.	PN. SAMPIT	0	1466	1466	0	100%
3.	PN. PANGKALAN BUN	0	2815	2815	0	100%
4.	PN. KUALA KAPUAS	0	1301	1301	0	100%
5.	PN. BUNTOK	0	446	446	0	100%
6.	PN. MUARA TEWEH	0	487	487	0	100%
7.	PN. TAMIANG LAYANG	0	1099	1099	0	100%
8.	PN. KASONGAN	0	785	785	0	100%
9.	PN. KUALA KURUN	0	360	360	0	100%

10.	PN. NANGA BULIK	0	1091	1091	0	100%
11.	PN. NANGA BULIK	0	1091	1091	0	100%
JUMLAH		0	12725	12725	0	100%

e. Perkara Pra Peradilan

No	Nama Pengadilan	Sisa Tahun 2023	Masuk 2024	Putus 2024	Sisa 2024	Persentase Putus
1.	PN. PALANGKARAYA	0	13	13	0	100%
2.	PN. SAMPIT	2	5	7	0	100%
3.	PN. PANGKALAN BUN	0	1	1	0	100%
4.	PN. KUALA KAPUAS	0	0	0	0	100%
5.	PN. BUNTOK	0	1	1	0	100%
6.	PN. MUARA TEWEH	1	0	1	0	100%
7.	PN. TAMIANG LAYANG	0	2	2	0	100%
8.	PN. KASONGAN	0	1	1	0	100%
9.	PN. KUALA KURUN	0	0	0	0	100%
10.	PN. NANGA BULIK	0	2	2	0	100%
11.	PN. PULANG PISAU	0	0	0	0	100%
JUMLAH		3	25	28	0	100%

f. Perkara Pidana Anak

No	Nama Pengadilan	Sisa Tahun 2023	Masuk 2024	Putus 2024	Sisa 2024	Persentase Putus
1.	PN. PALANGKARAYA	2	19	19	2	90,47%
2.	PN. SAMPIT	1	6	7	0	100%
3.	PN. PANGKALAN BUN	0	15	14	1	93,33%
4.	PN. KUALA KAPUAS	2	11	12	1	92,30%
5.	PN. BUNTOK	0	2	2	0	100%
6.	PN. MUARA TEWEH	0	7	7	0	100%
7.	PN. TAMIANG LAYANG	0	2	2	0	100%
8.	PN. KASONGAN	0	6	6	0	100%
9.	PN. KUALA KURUN	0	4	4	0	100%
10.	PN. NANGA BULIK	0	4	4	0	100%
11.	PN. PULANG PISAU	0	2	2	0	100%
JUMLAH		5	78	79	4	95,18%

g. Perkara Tindak Pidana Korupsi

No	Nama Pengadilan	Sisa Tahun 2023	Masuk 2024	Putus 2024	Sisa 2024	Persentase Putus
1.	PN. PALANGKARAYA	11	60	47	24	66%

h. Perkara Perdata Gugatan

No	Nama Pengadilan	Sisa Tahun 2023	Masuk 2024	Putus 2024	Sisa 2024	Persentase Putus
1.	PN. PALANGKARAYA	53	225	196	82	70,50%
2.	PN. SAMPIT	24	81	29	36	27,62%
3.	PN. PANGKALAN BUN	24	55	57	22	72,15%

4.	PN. KUALA KAPUAS	15	54	57	12	82,61%
5.	PN. BUNTOK	5	21	22	4	84,62%
6.	PN. MUARA TEWEH	8	25	30	3	90,91%
7.	PN. TAMIANG LAYANG	13	59	63	9	87,50%
8.	PN. KASONGAN	7	32	30	9	76,92%
9.	PN. KUALA KURUN	10	53	50	13	79,37%
10.	PN. NANGA BULIK	1	15	13	3	82,35%
11.	PN. PULANG PISAU	18	50	56	12	81,25%
JUMLAH		178	670	643	205	75,82%

i. Perkara Perdata Permohonan

No	Nama Pengadilan	Sisa Tahun 2023	Masuk 2024	Putus 2024	Sisa 2024	Persentase Putus
1.	PN. PALANGKARAYA	7	103	107	3	97,27%
2.	PN. SAMPIT	0	244	243	1	99,59%
3.	PN. PANGKALAN BUN	2	102	100	4	96,15%
4.	PN. KUALA KAPUAS	0	14	14	0	100,00%
5.	PN. BUNTOK	0	37	37	0	100,00%
6.	PN. MUARA TEWEH	1	33	33	1	97,06%
7.	PN. TAMIANG LAYANG	0	19	19	0	100,00%
8.	PN. KASONGAN	0	24	22	2	91,67%
9.	PN. KUALA KURUN	0	15	15	0	100,00%
10.	PN. NANGA BULIK	0	36	36	0	100,00%
11.	PN. PULANG PISAU	1	21	22	0	100,00%
JUMLAH		11	648	648	11	98,33%

j. Perkara Perdata Gugatan Sederhana

No	Nama Pengadilan	Sisa Tahun 2023	Masuk 2024	Putus 2024	Sisa 2024	Persentase Putus
1.	PN. PALANGKARAYA	0	30	28	2	93,33%
2.	PN. SAMPIT	0	18	17	1	94,44%
3.	PN. PANGKALAN BUN	3	25	27	1	96,43%
4.	PN. KUALA KAPUAS	0	25	25	0	100,00%
5.	PN. BUNTOK	0	8	8	0	100,00%
6.	PN. MUARA TEWEH	0	3	3	0	100,00%
7.	PN. TAMIANG LAYANG	0	25	25	0	100,00%
8.	PN. KASONGAN	0	9	9	0	100,00%
9.	PN. KUALA KURUN	0	2	2	0	100,00%
10.	PN. NANGA BULIK	0	7	7	0	100,00%
11.	PN. PULANG PISAU	0	8	8	0	100,00%
JUMLAH		3	160	159	4	97,55%

k. Perkara Perdata Perlawanan (Derden Verzet)

No	Nama Pengadilan	Sisa Tahun 2023	Masuk 2024	Putus 2024	Sisa 2024	Persentase Putus
1.	PN. PALANGKARAYA	0	2	2	0	100,00%
2.	PN. SAMPIT	5	0	5	0	100,00%
3.	PN. PANGKALAN BUN	1	3	2	2	50%

4.	PN. KUALA KAPUAS	0	0	0	0	100,00%
5.	PN. BUNTOK	0	0	0	0	100,00%
6.	PN. MUARA TEWEH	0	0	0	0	100,00%
7.	PN. TAMIANG LAYANG	1	1	1	1	50%
8.	PN. KASONGAN	0	0	0	0	100,00%
9.	PN. KUALA KURUN	0	0	0	0	100,00%
10.	PN. NANGA BULIK	0	0	0	0	100,00%
11.	PN. PULANG PISAU	0	1	0	1	0%
JUMLAH		7	7	10	4	71,42%

I. Perkara Pengadilan Hubungan Industrial

No	Nama Pengadilan	Sisa Tahun 2023	Masuk 2024	Putus 2024	Sisa 2024	Persentase Putus
1.	PN. PALANGKARAYA	13	11	23	1	95,83%

3. Keadaan Perkara yang diajukan Upaya Banding Tahun 2024

No	Nama Pengadilan	Perdata Gugatan	Pidana Biasa	Pidana Anak	Tipikor
1.	PN. PALANGKARAYA	26	18	1	16
2.	PN. SAMPIT	23	18	-	0
3.	PN. PANGKALAN BUN	15	61	2	0
4.	PN. KUALA KAPUAS	7	33	-	0
5.	PN. BUNTOK	2	18	-	0
6.	PN. MUARA TEWEH	3	55	-	0
7.	PN. TAMIANG LAYANG	4	8	-	0
8.	PN. KASONGAN	3	2	1	0
9.	PN. KUALA KURUN	4	5	2	0
10.	PN. NANGA BULIK	3	21	1	0
11.	PN. PULANG PISAU	0	21	-	0
JUMLAH		90	260	7	16

4. Keadaan Perkara yang diajukan Upaya Kasasi Tahun 2024

No	Nama Pengadilan	Perdata Gugatan	Pidana Biasa	Pidana Anak	Tipikor	PHI
1.	PN. PALANGKARAYA	21	14	0	15	6
2.	PN. SAMPIT	18	13	0	0	0
3.	PN. PANGKALAN BUN	13	41	0	0	0
4.	PN. KUALA KAPUAS	2	22	0	0	0
5.	PN. BUNTOK	0	3	0	0	0
6.	PN. MUARA TEWEH	4	52	0	0	0
7.	PN. TAMIANG LAYANG	0	3	0	0	0
8.	PN. KASONGAN	1	1	0	0	0
9.	PN. KUALA KURUN	1	4	2	0	0
10.	PN. PULANG PISAU	0	11	0	0	0
11.	PN. NANGA BULIK	2	21	0	0	0
JUMLAH		62	185	2	15	6

5. Keadaan Perkara yang diajukan Upaya Peninjauan Kembali Tahun 2024

No	Nama Pengadilan	Perdata Gugatan	Pidana Biasa	Pidana Anak	Tipikor
1.	PN. PALANGKARAYA	8	3	-	9
2.	PN. SAMPIT	4	1	-	-
3.	PN. PANGKALAN BUN	3	1	-	-
4.	PN. KUALA KAPUAS	-	4	-	-
5.	PN. BUNTOK	1	-	-	-
6.	PN. MUARA TEWEH	2	1	-	-
7.	PN. TAMIANG LAYANG	1	1	-	-
8.	PN. KASONGAN	-	-	-	-
9.	PN. KUALA KURUN	-	-	-	-
10.	PN. NANGA BULIK	-	-	-	-
11.	PN. PULANG PISAU	-	4	-	-
JUMLAH		19	15	0	9

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Belum Diputus.

Jumlah seluruh sisa perkara yang belum diputus di tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pengadilan	Jumlah Seluruh Sisa Perkara Tahun 2024
1.	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	6
2.	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	170
3.	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	121
4.	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	69
5.	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	39
6.	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	26
7.	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	4
8.	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	13
9.	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	27
10.	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	28
11.	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	19
12.	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	15
JUMLAH		537

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu.

Jumlah seluruh perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pengadilan	Jumlah Seluruh Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2024
1.	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	378
2.	PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA	819
3.	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	926
4.	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	663
5.	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	353
6.	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	222
7.	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	162
8.	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	221
9.	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	206
10.	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	191
11.	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	207
12.	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	134
JUMLAH		4482

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Jumlah seluruh perkara perdata (perdata gugatan) dan pidana (pidana biasa, pidana anak, dan pidana khusus tipikor) yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding, Kasasi, PK Tahun 2024	
		Perdata	Pidana
1.	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	167	395
2.	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	46	549
3.	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	42	392
4.	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	50	221
5.	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	26	102
6.	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	20	74
7.	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	59	101
8.	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	27	135
9.	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	46	116
10.	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	53	70
11.	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	13	68
JUMLAH		549	2223

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi.

Jumlah perkara perdata yang berhasil mediasi pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi 2024
1.	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	8
2.	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	0
3.	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	1
4.	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	3
5.	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	0
6.	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	1
7.	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	1
8.	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	1
9.	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	1
10.	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	1
11.	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	0
JUMLAH		17

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil diselesaikan melalui Diversi.

Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi 2024
1.	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	0
2.	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	0
3.	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	1
4.	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	0
5.	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	0
6.	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	0
7.	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	0
8.	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	0
9.	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	0
10.	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	0
11.	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	0
JUMLAH		1

6. Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui *Restorative Justice*

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui *Restorative Justice* pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui <i>Restorative Justice</i> 2024
1.	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	5
2.	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	0
3.	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	4
4.	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	13
5.	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	0
6.	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	5
7.	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	6
8.	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	0
9.	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	1
10.	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	2
11.	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	2
JUMLAH		38

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

1. POSBAKUM (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 Ayat (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 27).

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2014, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela

kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Adapun jumlah alokasi dan realisasi Anggaran untuk Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya tahun 2024, adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	Jumlah Alokasi Dana Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024		Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Posbakum (Orang)
			(Rp)	(%)	
1.	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	Rp. 44.000.000,00	Rp. 44.000.000,00	100%	179
2.	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	Rp. 28.000.000,00	Rp. 28.000.000,00	100%	478
3.	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	Rp. 44.000.000,00	Rp. 44.000.000,00	100%	168
4.	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	Rp. 28.000.000,00	Rp. 28.000.000,00	100%	65
5.	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	Rp. 28.000.000,00	Rp. 28.000.000,00	100%	78
6.	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	Rp. 28.000.000,00	Rp. 28.000.000,00	100%	118
7.	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	Rp. 28.000.000,00	Rp. 28.000.000,00	100%	45
8.	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	Rp. 28.000.000,00	Rp. 28.000.000,00	100%	53
9.	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	Rp. 28.000.000,00	Rp. 28.000.000,00	100%	140
10.	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	Rp. 28.000.000,00	Rp. 28.000.000,00	100%	41
11.	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	Rp. 28.000.000,00	Rp. 27.996.000,00	99,9%	57

2. SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran mewajibkan setiap Pengadilan Negeri untuk melakukan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling adalah rangkaian

kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten /Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Pengesahan Perkawinan bagi masyarakat beragama selain Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri ini antara lain seperti permohonan pergantian nama, permohonan perbaikan akta kelahiran dan lain-lain sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri.

Sidang Keliling adalah sidang Pengadilan Negeri yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik dilaksanakan secara berkala maupun insidentil dengan tujuan meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu dan sulit menjangkau gedung Pengadilan Negeri akibat keterbatasan biaya, fisik ataupun secara geografis.

Adapun jumlah alokasi dan realisasi Anggaran untuk Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya tahun 2024, adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	Jumlah Alokasi Dana Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Jumlah Perkara Yang Ditangani Tahun 2024
1.	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	-	-	-
2.	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	Rp. 80.000.000,00	Rp. 79.850.000,00	35 Perkara
3.	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	Rp. 50.000.000,00	Rp. 49.800.000,00	36 Perkara
4.	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	-	-	-
5.	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	Rp 38.010.000,00	Rp 38.006.000,00	16 Perkara
6.	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	-	-	-
7.	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	-	-	-
8.	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	-	-	-
9.	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	Rp 9.422.000,00	Rp 9.422.000,00	2 Perkara
10.	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	-	-	-
11.	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	Rp 105.251.000,00	Rp 104.875.115,00	12 Perkara

3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA).

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan salah satunya meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo). Pembebasan Biaya Perkara ini diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu. Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma sehingga bisa meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Salah satu bentuk untuk memenuhi pelayanan kepada publik adalah dengan memberi Hak atas biaya perkara cuma-cuma (prodeo) yang didasari oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis.

Adapun Jumlah Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya tahun 2024, adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	Jumlah Alokasi Dana Tahun 2024	Jumlah Perkara Yang Ditangani Tahun 2024
1.	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	-	-
2.	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	-	-
3.	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	-	-
4.	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	-	-
5.	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	-	-
6.	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	-	-
7.	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	Rp. 1.340.000,00	2 perkara
8.	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	-	-
9.	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	-	-
10.	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	-	-
11.	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	Rp. 1.340.000,00	3 perkara

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

- 24 SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN
TINGGI PALANGKARAYA
- 26 SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN
NEGERI
- 39 KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA
- 47 MUTASI
- 52 PROMOSI
- 54 PENSIUN DAN PEMBERHENTIAN
- 55 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
- 77 HUKUMAN DISIPLIN

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Peningkatan dan efektifitas kinerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak terlepas dari pembinaan dan pengelolaa sumber daya manusia yang berkualitas. Secara umum Struktur Organisasi di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sewilayah hukumnya mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang dapat dilihat sebagai berikut:





Pegawai di Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya dapat dibedakan atas pegawai teknis dan non teknis yang saling bersinergi untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi peradilan. Jumlah sumber daya manusia yang ada pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya tahun 2024 terdiri dari 346 orang Hakim dan Pegawai serta ditambah dengan 108 orang tenaga PPNPN.

I. Pengadilan Tinggi Palangkaraya

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.	196104021982032003	Ketua
2.	Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H.	196107171988031002	Wakil Ketua
3.	Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.	196109181988031007	Hakim Tinggi

4.	Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.	196104161988031001	Hakim Tinggi
5.	Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.	196203021988031005	Hakim Tinggi
6.	Abdul Wahib, S.H., M.H.	196407151992121001	Hakim Tinggi
7.	Heru Budyanto, S.H., M.H.	196308141992121003	Hakim Tinggi
8.	Sari Sudarmi, S.H.	196505061992122001	Hakim Tinggi
9.	Maskur, S.H.	196512311987031032	Hakim Tinggi
10.	Suswanti, S.H., M.Hum.	196602071992032002	Hakim Tinggi
11.	Sundari, S.H., M.H.	196407041992122002	Hakim Tinggi
12.	Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.	196310061992122001	Hakim Tinggi
13.	Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.	196401281985031003	Hakim Tinggi
14.	Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.	196705231993032002	Hakim Tinggi
15.	Gorga Guntur, S.H., M.H.	197910062006041002	Hakim Non Palu
16.	Agung Iswanto, S.H., M.H.	-	Hakim Ad Hoc Tipikor
17.	Erry Theresia, S.H., M.H.	-	Hakim Ad Hoc Tipikor
18.	Lily Solichul Mukminah, S.H., M.H.	-	Hakim Ad Hoc Tipikor
19.	Hasan Udi, S.H., M.H.	196601061995031002	Panitera
20.	Meidyawati, S.E., M.E.	197205142006042001	Sekretaris
21.	Faisal Sru Bramantyo, S.E.	197809212005021002	Kepala Bagian Umum dan Keuangan
22.	Isti Yani, S.Si., M.E.	198102212006042002	Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian
23.	Linda, S.H.	196905201989032001	Panitera Muda Hukum
24.	Ruspeliati, S.H.	196904011991032002	Panitera Muda Pidana
25.	Bambang Sukino, S.H.	197210291994031004	Panitera Muda Perdata
26.	Ahmad Gazali, S.H.	196312051990031004	Panitera Muda Khusus Tipikor
27.	Fitriya Nor Aini, S.E.	198008112006042003	Kasubbag. Keuangan Dan Pelaporan
28.	Samsul Rizal, S.H.	198404042006041004	Kasubbag. Rencana Program Dan Anggaran
29.	Muhammad Rusgiansyah, S.Hut., S.H.	197209242006041014	Kasubbag. Tata Usaha Dan Rumah Tangga
30.	Wahyu Teguh, S.E., S.H.	198608272011011014	Kasubbag. Kepegawaian Dan TI
31.	I Wayan Wasta, S.H.	196907101993031003	Panitera Pengganti
32.	Rabiatul Adawiyah, S.H.	197105181992032003	Panitera Pengganti
33.	Tiomina Simanjuntak, S.H.	197102201992032003	Panitera Pengganti
34.	Evi Ernawati, S.H., M.H.	197010201991032002	Panitera Pengganti
35.	Akri Yuliani, S.H.	196707011991032001	Panitera Pengganti
36.	Leon, S.H.	196903111993031004	Panitera Pengganti
37.	Apridius, S.E., S.H., M.Si.	198804052009121002	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

38.	Julius Siberium Timbung, S.E.	198207152006041003	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama
39.	Abdul Yusuf, S.Sos.	199211152019031011	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama
40.	Monalisa Agustina Toewak, S.E.	198108242006042003	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
41.	Junaldi Singarimbun, S.E., S.H.	198507072009121003	Pranata Keuangan APBN Penyelia
42.	Yogi Nugraha Putra, S.Kom.	199409182019031009	Pranata Komputer Ahli Pertama
43.	Evi Katsiani, S.E.	197608292006042023	Penata Layanan Operasional
44.	Sylvi Enggriani, S.H.	198902032012122001	Analisis Perkara Peradilan
45.	Yudi Yusliannoor, S.H.	197507192006041003	Analisis Perkara Peradilan
46.	Joni Petrus, S.H.	198106012009121004	Penata Keprotokolan
47.	Yunia Ariani, S.H.	198306062006042003	Analisis Perkara Peradilan
48.	Julianto, S.H.	198107162006041003	Penata Layanan Operasional
49.	Akhmad Darkuni, S.Sos., M.AP.	198706102009121005	Pengelola Penanganan Perkara
50.	Susilawati, S.H.	198901072009122004	Penata Layanan Operasional
51.	Muthiah Az-Zahra Rasyid, S.H.	199401112020122015	Analisis Perkara Peradilan
52.	Amelia Sofia Nurlita, S.H.	199706272020122010	Analisis Perkara Peradilan
53.	Hizkia Karunia Perangin Angin, S.H.	199309102020121005	Analisis Perkara Peradilan
54.	Roberto Asintongan P, A.Md.	198802062019031003	Penelaah Teknis Kebijakan
55.	Bangga Chrysto Tarigan, A.Md.	199604272019031001	Teknisi Sarana dan Prasarana
56.	Uner	197703192014081002	Pengadministrasi Perkantoran
57.	Mikhael Jan Tonggo Tua Sihombing, A.Md.	199301232020121008	Pengelola Penanganan Perkara
58.	Anis Aprilia, S.E.I	199404242020122007	Penata Layanan Operasional
59.	Meichel Tri Setia Nababan, S.E.	199005242022031004	Penelaah Teknis Kebijakan
60.	Siti Yuli Yanti, S.H.	200007082024052001	Analisis Perkara Peradilan
61.	Okky Pramono, A.Md.	199111262022031007	Pengelola Penanganan Perkara
62.	Erwan Hermawan, A.Md.	199009152022031006	Pengolah Data dan Informasi
63.	Ginta Murli, S.E.	198703122023211030	Arsiparis Ahli Pertama
64.	Levriana Saraswati, S.E.	198710192023212025	Perencana Ahli Pertama
65.	Anreni Lambung, S.E.	-	PPNPN / Pramubakti

66.	Wahyunanda Trisno Jaya Saputra Lambung, S.Pd.	-	PPNPN / Pramubakti
67.	Albert Theofilus Yohanes	-	PPNPN / Pramubakti
68.	Tutut, S.H.	-	PPNPN / Pramubakti
69.	Herry Wibowo	-	PPNPN / Pramubakti
70.	Muhammad Hilmi, S.PdI.	-	PPNPN / Pengemudi
71.	Surya John Hery L.Tobing, S.H.	-	PPNPN / Pengemudi
72.	Getyere	-	PPNPN / Satpam
73.	Rochmat Dwi Ariyanto	-	PPNPN / Satpam
74.	David Riski Pratama	-	PPNPN / Satpam

II. Pengadilan Negeri Palangkaraya

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Ricky Fardinand, S.H., M.Hum.	197206111999031002	Ketua
2.	Muhammad Ramdes, S.H	196712141992031001	Wakil
3.	Benhard M. Lumban Toruan, S.H., M.H.	197204092000031003	Hakim
4.	Benyamin, S.H	196409211999031001	Hakim
5.	Erhammadin, S.H., M.H.	197605022002121008	Hakim
6.	Yudi Eka Putra, S.H., M.H	197412312002121015	Hakim
7.	Sumaryono, S.H., M.H	197705182002121004	Hakim
8.	Sri Hasnawati, S.H., M.Kn	198012192003122002	Hakim
9.	Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.,H	198211142007041001	Hakim
10.	Muhammad Affan, S.H., M.H	197603242009041004	Hakim
11.	Kusmat Tirta Sasmita, S.H	-	Hakim Adhoc Tipikor
12.	Muji Kartika Rahayu, S.H., M.Fil.	-	Hakim Adhoc Tipikor
13.	Darjono Abadi, S.H., M.H.	-	Hakim Adhoc Tipikor
14.	Amir Mahmud Munte, S.H	-	Hakim Adhoc Tipikor
15.	Iis Siti Rochmah, S.H., M.H	-	Hakim Adhoc Tipikor
16.	Astiti Swanita Rini, S.H.,M.H	-	Hakim Adhoc PHI
17.	Dwi Harto Hanggono, S.H	-	Hakim Adhoc PHI
18.	Prapti Ramadhani, S.T, S.H., M.H	-	Hakim Adhoc PHI
19.	Hj. Sri Widarti, S.Sos., S.H	196703151990032001	Sekretaris
20.	Mansyah, S.H	197012131994031001	Panitera
21.	Teguh Budiono, S.H	198208092008051001	Panitera Muda Perdata
22.	I Gusti Bagus Sandhi, S.H	198406072008041001	Panitera Muda Pidana
23.	-	-	Panitera Muda Khusus PHI
24.	Efraim, S.H.	197504232006041001	Panitera Muda Khusus Tipikor
25.	Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H	197710117199503100 1	Panitera Muda Hukum
26.	Russianna, S.H.	196905161992032002	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Taa Laksana

27.	Nova Iraini, S.E., M.Si.	198411022009042007	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
28.	Marliyani, S.E.	198507212009042003	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Perencanaan
29.	Gusti Norliani	196506281991032002	Panitera Pengganti
30.	Rahmawati Fitri, S.H.	198407242009042011	Panitera Pengganti
31.	Riswan Adiputra, S.H	198602172009041003	Panitera Pengganti
32.	Taty, S.H	198502162006042001	Panitera Pengganti
33.	Sari Ramadhaniati, S.H.	198406142009042011	Panitera Pengganti
34.	Ika Melinda Meliala, S.H.	198710202011012014	Panitera Pengganti
35.	Jumiati, S.H	19870925 2006042002	Panitera Pengganti
36.	Lianova, S.H.	19750302 2009122001	Panitera Pengganti
37.	Wajidin	196905251993031005	Jurusita
38.	Ika Murtianingsih, S.H.	198004102006042003	Jurusita
39.	Salundik, S.H.	197107052014081002	Jurusita
40.	Mewikristya, S.Kom	198511072009042010	Penelaah Teknis Kebijakan
41.	Mandes, S.Kom.	198304032009121004	Penata Layanan Operasional
42.	Ainun Zaryah, S.E.	198712162009042005	Fungsional Pranata Keuangan APBN Penyelia
43.	Abdul kahar Mashuri	197211101993031002	Administrasi Perkantoran
44.	Laila Hayati, A.Md	198410172009122001	Pengolah Data dan Informasi
45.	Kristina Melati Pasaribu, S.H	199505082022032015	Analisis Perkara Peradilan (Cakim)
46.	Jesy Itasari Banjarnahor, S.H	199706122022032011	Analisis Perkara Peradilan (Cakim)
47.	Riri Lastiar Situmorang, S.H	199404052022032011	Analisis Perkara Peradilan (Cakim)
48.	Kevien Dicky Aldison, S.H	19909222022031003	Analisis Perkara Peradilan (Cakim)
49.	Putri Tresia Tampubolon, S.H	199710232022032011	Analisis Perkara Peradilan (Cakim)
50.	Anselmus Vialino Sinaga, S.H	199620232022031006	Analisis Perkara Peradilan (Cakim)
51.	Teresa Vrilda Hillary Lumban T, S.H	199704022022032016	Analisis Perkara Peradilan (Cakim)
52.	Bayu nAkbar Wicaksono, S.H	199602212022031004	Analisis Perkara Peradilan (Cakim)
53.	Monica Kristianti Sitompul, S.H	199206272022032008	Analisis Perkara Peradilan (Cakim)
54.	Nanda Mario Fernandos, A.Md	199608012020121005	Pengelola Penanganan Perkara

55.	Putri Prayana Tarigan, A.Md	199109112022032012	Pengelola Data dan Informasi
56.	Irmayani Roulina Simanjorang, A.Md	199212052022032007	Pengelola Penanganan Perkara
57.	Lukman Adi Ariviano, S.H	199603282024051001	Analisis Perkara Peradilan
58.	Eventy Velly Palawa, S.H	199608072024052001	Analisis Perkara Peradilan
59.	Gilan Rahadian Saputra, S.H	200107012024051001	Analisis Perkara Peradilan
60.	Agave Cristy Januarti Saragih	-	PPNPN
61.	Yoyo	-	PPNPN
62.	Firdana Priyo Handoko	-	PPNPN
63.	Ferry	-	PPNPN
64.	Jejen Jaeni	-	PPNPN
65.	Timotius Agni Angga Kusuma	-	PPNPN
66.	Kaspul	-	PPNPN
67.	Dean Barizka	-	PPNPN
68.	Gustaf Denovan	-	PPNPN
69.	Dandy Kurniawan	-	PPNPN
70.	Anggryanto Sulistyio	-	PPNPN
71.	Supriyanto	-	PPNPN
72.	Riska Paramita	-	PPNPN
73.	Berni Matheus Novrianus	-	PPNPN
74.	Jimi Ade Candra	-	PPNPN
75.	Siti Kifrah Suciana	-	PPNPN

III. Pengadilan Negeri Sampit

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Benny Octavianus, S.H., M.H.	197410122000031001	Ketua
2.	Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.	197807192001121004	Wakil Ketua
3.	Abdul Rasyid, S.H.	198404142009041005	Hakim
4.	Saiful HS, S.H., M.H.	198607302009041002	Hakim
5.	Firdaus Sodikin, S.H.	198511182009041002	Hakim
6.	Sulaeman, S.H., M.H.	198209192009041006	Hakim
7.	Anung Handono, S.H.	197303221993031003	Panitera
8.	Muhammad Noor, S.Kom.	197911282009121005	Sekretaris
9.	Noorhayati, S.Kom., S.H.	197708092009122002	Panitera Muda Pidana
10.	Ricky Rahman, S.H.	198708272011011011	Panitera Muda Perdata
11.	Sopyani Devi, S.H.	198510112005022002	Panitera Muda Hukum
12.	Septa Sujiati Eka Setia, S.E.	198509232006042001	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
13.	-	-	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
14.	Dimas Amoroso Aning Wijanarko, S.Kom.	199103012015031002	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
15.	Gustia Ningsih, A.Md., S.H.	198108192011012011	Panitera Pengganti

16.	Krista , S.H.	198506142006042001	Panitera Pengganti
17.	Syahrudin	197307041993031002	Jurusita
18.	Indra Lasmono, A.Md.	198707132019031008	Teknisi Sarana dan Prasarana
19.	Hanna Marsella Sihombing, A.Md.	199203032022032007	Pengelola Penanganan Perkara
20.	Iren Panjaitan, A.Md.	199503242022032018	Pengelola Penanganan Perkara
21.	Khansa Hanifah Oci, A.Md.,S.I.Ak.	199711282022032014	Pengolah Data dan Informasi
22.	Rizak Hirda Putra, S.H.	199711182024051001	Analisis Perkara Peradilan
23.	David Bagus Kuncoro, S.H.	199908102024051002	Analisis Perkara Peradilan
24.	Anatasya Giri Anjassari, S.H.	200006012024052001	Analisis Perkara Peradilan
25.	Kenmart Rajaguguk, S.H.		PPNPN/ Pramubhakti
26.	Hasan Basri, A.Md.		PPNPN/ Pramubhakti
27.	Robi Suhada, S.H.		PPNPN/ Pramubhakti
28.	Eko Wahyudi		PPNPN/ Pengemudi
29.	Erfan Syaiful Anam		PPNPN/ Pengemudi
30.	Juhan		PPNPN/ Pramubhakti
31.	Tompono		PPNPN/ Satpam
32.	Pyanto		PPNPN/ Satpam

IV. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.	197603172001121002	Ketua
2.	Ikha Tina, S.H., M.Hum.	197701272001122002	Wakil Ketua
3.	Erick Ignatius Christoffel, S.H.	198008052009041005	Hakim
4.	Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.	198809272011011005	Hakim
5.	Firmansyah, S.H., M.H.	198904142011011004	Hakim
6.	Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H.	199002202017121006	Hakim
7.	Harly Marlyn Simanjuntak, S.H.	197610012001121002	Panitera
8.	Husni Thamrin, S.T.	197803082009041003	Sekretaris
9.	Masrianor, S.H.	198310062009121008	Panitera Muda Pidana
10.	Hariyanto	197501151994031002	Panitera Muda Hukum
11.	Wahyudi, S.H.	197107101993031006	Panitera Muda Perdata
12.	Chanro Simamora, S.H.	198904042012121002	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
13.	Didik Sulaiman, S.H.	198110182012121003	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan
14.	Diyah Eka Prasetya Rini, S.I.P.	199405152019032013	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

15.	Bayu Sistiawan, A.Md., S.H.	198309232011011004	Panitera Pengganti
16.	Maya Agustina, S.H.	198408222014082001	Panitera Pengganti
17.	Rosilawati, S.E.	198407192009122002	Jurusita Pengganti
18.	Deni Nurmansyah, S.E.	198401012006041005	Analisis Pengelola Keuangan APBN
19.	Fera Aditias Ramadani, S.H.	199502122020122010	Analisis Perkara Peradilan
20.	Maria Herlina Angriyani Moi Wato, A.Md, S.H.	199812172022032010	Analisis Perkara Peradilan
21.	Soraya Isfandari, S.Pd.Sd	198707112009022002	Penata Layanan Operasional
22.	Sulistiyawati	198403062014082001	Penelaah Teknis Kebijakan
23.	Daniel Simanihuruk, S.Sos	199706302022031010	Penelaah Teknis Kebijakan
24.	Menak Manullang, A.Md	199211132022042001	Pengelola Data dan Informasi
25.	Tania Aurelia Timbung, S.H.	200012072024052001	Analisis Perkara Peradilan (CPNS)
26.	Yoga Aditama, S.H.	199801052024051001	Analisis Perkara Peradilan (CPNS)
27.	Dimas Edi Trianto, S.H.	199906212024051001	Analisis Perkara Peradilan (CPNS)
28.	Hiskia J. Aritonang	-	PPNPN / Pramubhakti
29.	Ega Ayu Ananda	-	PPNPN / Pramubhakti
30.	Nurul Hidayah	-	PPNPN / Pramubhakti
31.	Masrun	-	PPNPN / Pramubhakti
32.	Suci Paramita	-	PPNPN / Pramubhakti
33.	Erwin Tirajul Akbar	-	PPNPN / Pramubhakti
34.	Noor Maydah Lestika	-	PPNPN / Pramubhakti
35.	Kao M. Kaokabanullah	-	PPNPN / Pengemudi
36.	Muhamad Aji Purnomo	-	PPNPN / Satpam
37.	Samsi	-	PPNPN / Satpam
38.	Rexzy Adipura	-	PPNPN / Tenaga Kebersihan
39.	Harco Yosie	-	PPNPN / Satpam

V. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Arief Kadarmo, S.H., M.H.	197104052005021001	Ketua
2.	Christina Simanullang, S.H., M.H.	197602052001122002	Wakil Ketua
3.	Diah Pratiwi, S.H., M.H.	198706092017122002	Hakim
4.	Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.	199203072017122002	Hakim
5.	Syarli Kurnia Putri, S.H.	199110232017122001	Hakim
6.	Wuri Mulyandari, S.H.	19930625 2017122001	Hakim
7.	Pebrina Permata Sari, S.H.	198902122017122002	Hakim
8.	Dr Putri Nugraheni	199209122017122001	Hakim

	Septyaningrum, S.H., M.H.		
9.	Istiani, S.H.	199504042017122004	Hakim
10.	Amran Halim Zunaedi Pasaribu, S.H., M.H.	198406072007041001	Panitera
11.	Tilai, S.H.	196704061992032002	Sekretaris
12.	Rahmadi, S.H.	196507171992031005	Panitera Muda Pidana
13.	Agus Hairuddin, S.H.	196808171993031003	Panitera Muda Hukum
14.	Akhmad Rusadi, S.H., M.H.	198602102006041002	Panitera Muda Perdata
15.	Ernawati, S.H.	196603191992032001	Panitera Pengganti
16.	Rusmiati, S.H.	196803041990032003	Panitera Pengganti
17.	Mardiana	197208091991032002	Kasubbag Kepegawaian Dan Ortala
18.	Kiki Hidayanti, S.H.	198109202006042004	Panitera Pengganti
19.	Fernandos Pasaribu, S.H., M.H.	199204102014031002	Kasubbag Umum Dan Keuangan
20.	Jandelsem Andrevo Khairum, S.Kom	198901172015031002	Kasubbag PTIP
21.	Dedtran Natalia Marsetyo, S.H.	198412162009121002	Juru Sita
22.	Mariatul Khiftiah, S.H.	198611012009122006	Juru Sita
23.	Khadijah Nur Arafah, S.H.	199604272020122006	Analisis Perkara Peradilan
24.	Ilham Salim Tampubolon, A.Md., S.A.B.	199107152020121002	Penata Layanan Operasional
25.	Valentina Teacher Siagian, S.E.	199505102022032015	Penata Layanan Operasional
26.	Nadhifah Zahida, S.H.	200107042024052001	Analisis Perkara Peradilan
27.	Lia Hikmatul Maula, S.H.	200004032024052001	Analisis Perkara Peradilan
28.	Albi Yudisthira Adiyanto, S.H.	199903102024051001	Analisis Perkara Peradilan
29.	Muhammad Imron Rosiyadi, S.H.	196905231993031002	Pengadministrasi Perkantoran
30.	Amir Sinaga	-	PPNPN
31.	Muhammad Usman, S.H.	-	PPNPN
32.	Rachmat Hidayatullah	-	PPNPN
33.	Saifuddin, S.E.	-	PPNPN
34.	Nanda Kusuma Wardana	-	PPNPN
35.	Rya Fitriyadi	-	PPNPN
36.	Agus	-	PPNPN
37.	Joy Alexander	-	PPNPN

VI. Pengadilan Negeri Muara Teweh

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Sugiannur, S.H	198104092006041003	Ketua
2.	Edi Rahmad, S.H., M.Kn	199006252017121005	Hakim
3.	Denny Budi Kusuma, S.H., M.H	199212082017121003	Hakim
4.	Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H	199406102017121003	Hakim
5.	Mohammad Pandi Alam, S.H.,	199409142017121005	Hakim

	M.H		
6.	M. Iskandar Muda, S.H	198909182017121004	Hakim
7.	Edi Zargoni, S.H	198101302009041002	Panitera
8.	Yulie Christie Dewi Uda, S.Kom	197807242009042002	Sekretaris
9.	Hendra Sabar Parulian Siregar, SH.	198205312008051001	Panitera Muda Perdata
10.	Arif Rachman Hakim S.H	198811272014031002	Panitera Muda Pidana
11.	Richard R. Sampiterson Petrus, S.H.	198704172006041002	Panitera Muda Hukum
12.	Citra Sri Lestari, S.Kom	198409042011012019	Kasubbag Perencanaan ,TI dan Pelaporan
13.	Suparto, SE	196908211993031006	Kasubbag Umum dan Keuangan
14.	Maryanti Aritonang, S.E	199004082009122001	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
15.	Ubaidillah, SH	198506142009121009	Panitera Pengganti
16.	Arif Ferdian Junaedi, S.H	199801272020121003	Jurusita Pengganti
17.	Alqoerlah Reza Fahlevi, A.Md	199209122020121007	Jurusita Pengganti
18.	Luther Sianturi	196809121994031007	Pengadministrasi Persuratan
19.	Awaludin Nur	197802212014081001	Bendahara
20.	Danopan Daniel Naibaho, A.Md	199511282022031010	Pengelola Perkara
21.	Khoerul Umam, S.H	200003072024051001	Analisis Perkara Peradilan
22.	Dina Tiarawati, S.H.	-	PPNPN / Pramubakti
23.	Hartanto Chandra Sujana, S.H.	-	PPNPN / Pramubakti
24.	Pran Ary Gunadi	-	PPNPN / Pengemudi
25.	Mentari	-	PPNPN / Pramubakti
26.	M. Faisal Tandjung	-	PPNPN / Satpam
27.	Suandy Aries Setiady	-	PPNPN / Pengemudi
28.	Ahmad Syarifudin, A.Md.	-	PPNPN / Satpam
29.	Veronika Sihombing, S.Pd.	-	PPNPN / Pramubakti

VII. Pengadilan Negeri Buntok

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Ahmad Husaini, S.H., M.H.	197501152005021001	Ketua
2.	Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.	197504292006042001	Wakil Ketua
3.	Oktavia Mega Rani, S.H.	198810282017122002	Hakim
4.	Anjar Koholifano Mukti, S.H.	198909232017121002	Hakim
5.	Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.	198809082017121001	Hakim
6.	Niesya Mutiara Arindra, S.H.	199205012017122008	Hakim
7.	Asterika, S.H.	199305262017122001	Hakim
8.	Rizal Biduri, S.H.	197210291994031004	Panitera
9.	Anita Selvia, S.E.	197807062011012003	Sekretaris
10.	Sripah Nadiawati, S.H.	198611112006042002	Panitera Muda Perdata
11.	Evi Agustine, S.H.	198608032006042001	Panitera Muda Hukum
12.	Dewan Hadi Saputro, S.H.	198712072014031002	Panitera Pengganti
13.	Yuris. S.	197101162014081001	Jurusita
14.	Noryadin	197203052014081001	Jurusita
15.	Melrano Sutrisno, S.Kom.	198608152011011002	Penelaah Teknis Kebijakan
16.	Yudika August Feriyanto, S.AP.	198608222006041008	Penata Layanan Operasional
17.	Chelvia, A.Md., S.H.	198611252009042003	Penata Layanan Operasional
18.	Kian Teguh, S.H.	199704222020121006	Analisis Perkara Peradilan
19.	Riduan	198603072005021001	Pengadministrasi Perkantoran
20.	Budy Irawan	198709212006041001	Penata Layanan Operasional
21.	Arnold Jhon Harry Sinaga, A.Md.	199306242020121006	Pengelola Sarana dan Prasarana
22.	Natasha Sri Ulina Siringo-Ringo, A.Md.A.B.	199806242022032017	Pengelola Penanganan Perkara
23.	Salmin	198210142010011003	Pengadministrasi Perkantoran
24.	Novira Amalia, S.H.	200111262024052001	Analisis Perkara Peradilan
25.	Reni Anggrahini, S.E.	-	PPNPN / Pramubakti
26.	Febrina Rahmah, A.Md	-	PPNPN / Pramubakti
27.	Syarif Hidayatullah, S.Pd.I.	-	PPNPN / Satpam
28.	Windiyanti	-	PPNPN / Pramubakti
29.	Taufik Rahman	-	PPNPN / Pengemudi
30.	Erosusanto.RL	-	PPNPN / Pramubakti
31.	Arianto	-	PPNPN / Satpam

VIII. Pengadilan Negeri Tamiang Layang

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.	197906272003121001	Ketua
2.	Muhamad Iqbal, S.H.	198001102006041004	Wakil
3.	Arief Heryogi, S.H., M.H.	199208302017121002	Hakim
4.	Febdhy Setyana, S.H., M.H.	198602232017121001	Hakim
5.	Eddy Montana, S.H.	199402012017121004	Hakim
6.	Kharisma Laras Sulu, S.H.	199409072017121005	Hakim
7.	Maria Faustina Beata, S.H.	199511132017122002	Hakim
8.	Surya Harry Prayoga, S.H., M.H.	199105242009121002	Panitera
9.	Citra Adi Asmara, S.E.	108309092011011010	Sekretaris
10.	Hendy Pradipta, S.H.	198704302011011014	Panitera Muda Pidana
11.	Rony Oktavianus, S.H.	198410092009041005	Panitera Muda Hukum
12.	Mairita	196805201991032001	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
13.	Widiya Ayu Rekti, S.H.	198901262012122001	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
14.	Hendy Saputra, S.E.	198103152009011003	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
15.	Sepende	196909091993031005	Panitera Pengganti
16.	Zabal Akbar, S.H.	198810242014031001	Juru Sita
17.	Insa Marhandent, S.H.	198104082009011002	Juru Sita Pengganti
18.	An Mahmudah, S.E., M.M.	198412172007012002	Penata Layanan Operasional
19.	Hendra Pratama Marang, S.AB.	198309272010011018	Penelaah Teknis Kebijakan
20.	Aini, S.AP.	198307212010012007	Penata Layanan Operasional
21.	Zul Ikram, S.Sos.	198502212010011002	Penata Layanan Operasional
22.	Nordin Asaddiq	197408271993031003	Pengadministrasi Perkantoran
23.	Kristina Natalia, A.Md.	198512202010012025	Pengelola Layanan Pengadaan
24.	Muhammad Tirta Jaya, S.Sos.	198602022010011002	Penata Layanan Operasional
25.	Norlailawati, S.M.	198202012010012019	Penata Layanan Operasional
26.	Lie Ulien Nuha, S.H.	199410062024051001	Analisis Perkara Peradilan
27.	Yaro Wivesto Peranginangin, A.Md.Kom.	199803022020121002	Pengelola Penanganan Perkara
28.	Esmeralda Dasarwarsani, A.Md.A.B.	199810292022032011	Pengelola Penanganan Perkara

29.	Akhmad Dodo Wijayanto	-	PPNPN / Satpam
30.	Muhamad Alwi	-	PPNPN / Satpam
31.	Arbatson	-	PPNPN / Pengemudi
32.	Ahmad Wardani	-	PPNPN / Pramubakti
33.	Pirmansyah	-	PPNPN / Pramubakti
34.	Tada Mawisa	-	PPNPN / Pramubakti
35.	Mahdalina	-	PPNPN / Pramubakti
36.	Ifan Yuan Tanjung Sinduro	-	PPNPN / Pramubakti
37.	Erbi Hartako	-	PPNPN / Pramubakti

IX. Pengadilan Negeri Kasongan

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Nataria Cristina Triana, S.H., M.Hum.	197802072002122002	Ketua
2.	Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H.	197511302001122003	Wakil Ketua
3.	Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.	198902282017122001	Hakim
4.	Afriani Faryandi, S.H.	199104212017121004	Hakim
5.	Patar Panjaitan, S.H.	199208082017121006	Hakim
6.	Win Widarti, S.H.	199405192017122002	Hakim
7.	R. Imam Widiyanto, S.H.	197110272001121001	Panitera
8.	Jumadi, S.H.	196807171993031010	Sekretaris
9.	Atrikuasa, S.H.	198502012011011006	Panmud Pidana
10.	Wardanakusuma, S.H.	198310032009121006	Panmud Perdata
11.	Didid Suhartono, S.H.	19830502200904100	Panmud Hukum
12.	Mada Kristianto, S.H.	198503092012121002	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN
13.	Juli Hasianna Napitu, S.H.	198707112012122001	Kasubbag PTIP
14.	Siti Martinah, S.H.	198603312006042002	Kasubbag Umum dan Keuangan
15.	Ricky Darmawan, S.H., M.H.	198708182012121001	Jurusita
16.	Devi Triana Hutabarat, S.H.	199609132020122007	Analisis Perkara Peradilan
17.	Toto Isnadi, A.Md.	199410082020121007	Jurusita Pengganti
18.	Resi Arjun Ni'am, S.H.	199908242024051001	Analisis Perkara Peradilan/CPNS
19.	Yessi Rianita Sihombing, A.Md.	199411142022032010	Pengolah Data dan Informasi
20.	Adhyatma	-	PPNPN / Pengemudi
21.	Sentosa	-	PPNPN / Satpam
22.	Teguh Setiawan	-	PPNPN / Satpam
23.	Harlis, S.H.	-	PPNPN / Pramubakti
24.	Natalia Dhevinda, S.H.	-	PPNPN / Pramubakti
25.	Mensusana	-	PPNPN / Pramubakti

X. Pengadilan Negeri Kuala Kurun

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Dr. Galih Bawono, S.H., M.H.	198208132006041005	Ketua
2.	Raden Guntar Anggaputra S., S.H., M.H.	198709092017121001	Hakim
3.	Fransiskus Sinurat, S.H.	199403222017121004	Hakim
4.	Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.	19950421 201712 1 004	Hakim
5.	Akhmad Dillah, S.H.	198510082009121006	Panitera
6.	Exman Vryanto, S.E.	197311211993031002	Sekretaris
7.	Friady, S.H.	19821014 200912 1 005	Panitera Muda Pidana
8.	Muhamad Fadli, S.H.	19870526 200604 1 002	Panitera Muda Perdata
9.	Mersia Sibarani, S.E., S.H.	19771111 200912 2 004	Panitera Muda Hukum
10.	Achmad Syahrui, A.Md.	198410232007041005	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan
11.	Tubagus Ramdan, S.E.	198904232019031005	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
12.	Mangisi Gultom	198404292006041001	Jurusita
13.	Rahmat Salim Rumnie, S.E.	199102142020121006	Penata Layanan Operasional
14.	Yuldian Pratama, A.Md.	199207172020121007	Pengelola Penanganan Perkara
15.	Nita Silvestry, A.Md.	199804092022032019	Pengelola Penanganan Perkara
16.	Mardona	-	PPNPN / Pramubakti
17.	Solimah	-	PPNPN / Pramubakti
18.	Dede Rully Kurniawan	-	PPNPN / Pramubakti
19.	Septi Novela	-	PPNPN / Pramubakti
20.	Yongki Pranata	-	PPNPN / Satpam
21.	Fx. Ken Harrys Wikrama	-	PPNPN / Pramubakti
22.	Indra Lukmana	-	PPNPN / Pramubakti
23.	Eko Rahmat Nuryasin	-	PPNPN / Satpam

XI. Pengadilan Negeri Nanga Bulik

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Evan Setiawan Dese, S.H.	197805042007041001	Ketua
2.	Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.	198602012017121002	Hakim
3.	Rendi Abednego Sinaga, S.H.	199402262017121005	Hakim
4.	Ucok Richon Manik, S.H.	198306272006041003	Panitera
5.	Aang Sutopo, S.H.	198201132009121002	Sekretaris
6.	Ade Andiko, S.H.	198711192011011005	Panitera Muda Perdata
7.	Junipar Munte, S.H.	198405242012121002	Panitera Muda Pidana
8.	Vusi Rurianty, S.Kom	198603152009042008	Kasubbag. Umum dan Keuangan
9.	Aris Editio Telaumbanua, S.H., M.Han	198906232019031005	Kasubbag. Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
10.	M.Guntur, S.H.	199212082019031007	Panitera Pengganti
11.	Rudi Ihsan, S.H.	19821012 2006041003	Panitera Pengganti
12.	Thio Doly Pakpahan, S.H.	198311062006041001	Jurusita
13.	Beny Parlindungan L., S.H.	198904192020121002	Analisis Perkara Peradilan
14.	Periyaldi, A.Md	199402042020121006	Penata Layanan Operasional
15.	T.Firdaus, A.Md	199305112020121007	Pengelola Penanganan Perkara
16.	Adi Saputra Sibagariang, A.Md	199504142022031006	Pengelola Penanganan Perkara
17.	Riza Romadan	-	PPNPN
18.	Suriyanto	-	PPNPN
19.	Alfian Prasetya Nugroho, S.Ak.	-	PPNPN
20.	Nyai Shintan Dadie, S.Akun.	-	PPNPN
21.	Chandra Derino Sinaga, S.Pd.	-	PPNPN
22.	Yuliana	-	PPNPN
23.	Winda	-	PPNPN
24.	Indar Puspitaningrum, S.Kom.	-	PPNPN

XII. Pengadilan Negeri Pulang Pisau

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Mohamad Zakiuddin, S.H.	198111242006041004	Ketua
2.	Kurnia Fitrianiingsih, S.H.	198102082005022003	Wakil Ketua
3.	Ismaya Salindri, S.H., M.H.	199105012017122002	Hakim
4.	Herjanriasto Bekt Nugroho, S.H., M.H.	199201042017121003	Hakim
5.	Ishmatul Lu`Lu, S.H.	199312132017122001	Hakim
6.	Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.	199402102017122002	Hakim
7.	Silvia Kumalasari, S.H.	199408162017122002	Hakim
8.	Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.	198910082017122001	Hakim
9.	Noripansyah, S.H.	196904011991032002	Panitera
10.	I Made Landep, SH	197210041993031006	Sekretaris
11.	Lelo Herawan, S.H.	198501142009041003	Panitera Muda Hukum
12.	Dede Andreas, S.H., M.H.	198202122005021003	Panitera Muda Perdata
13.	Laili Rahmah, A.Md. S.H., M.H.	198012242009122005	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
14.	Reinhard Simanjuntak, S.H.	199408202019031005	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
15.	M. Zaldi Akbar, S.H.	199410122019031006	Panitera Pengganti
16.	Riviera Jesica Manurung, S.H.	199402082020122008	Panitera Pengganti
17.	Janward Sumuang Purba	197901102001121001	Juru Sita
18.	Ika April Yanti Sitanggang, A.Md., S.M.	199504172022032015	Penata Layanan Operasional
19.	Arofah Azhar, A.Md.	198903242020121002	Teknisi Sarana dan Prasarana
20.	Romi Nevriyandra, A.Md.	198907262020121002	Pengelola Penanganan Perkara
21.	Ahmad Faisal Rosadi	-	PPNPN / Satpam
22.	Rony	-	PPNPN / Satpam
23.	Alfi Fahmi	-	PPNPN / Pengemudi
24.	M. Dian G. M.	-	PPNPN / Pramubakti
25.	Geryawan	-	PPNPN / Pramubakti
26.	Vicky Krisli	-	PPNPN / Pramubakti
27.	Lessa Wara'a Ezzana	-	PPNPN / Pramubakti
28.	Rudianto	-	PPNPN / Pramubakti

A. Komposisi Sumber Daya Manusia

I. Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Hakim dan ASN

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama	IV/e	6
2	Pembina Utama Madya	IV/d	8
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-
4	Pembina Tk. I	IV/b	3
5	Pembina	IV/a	3
6	Penata Tk. I	III/d	15
7	Penata	III/c	8
8	Penata Muda Tk. I	III/b	6
9	Penata Muda	III/a	4
10	Pengatur Tk. I	II/d	3
11	Pengatur	II/c	3
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-
13	Pengatur Muda	II/a	-
14	Non Pangkat	-	5

Berdasarkan Pendidikan Hakim dan ASN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Doktoral (S-3)	3
2	Magister (S-2)	19
3	Sarjana (S-1)	36
4	Diploma (D-3)	5
5	SLTA/Sederajat	1
6	SLTP/Sederajat	-
7	SD/Sederajat	-

II. Pengadilan Negeri Palangkaraya

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Hakim dan ASN

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama	IV/e	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	3
4	Pembina Tk. I	IV/b	8
5	Pembina	IV/a	2
6	Penata Tk. I	III/d	15
7	Penata	III/c	5

8	Penata Muda Tk. I	III/b	3
9	Penata Muda	III/a	13
10	Pengatur Tk. I	II/d	-
11	Pengatur	II/c	3
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-
13	Pengatur Muda	II/a	-
14	Non Pangkat	-	16

Berdasarkan Pendidikan Hakim dan ASN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Doktoral (S-3)	1
2	Magister (S-2)	13
3	Sarjana (S-1)	39
4	Diploma (D-3)	4
5	SLTA/Sederajat	2
6	SLTP/Sederajat	-
7	SD/Sederajat	-

III. Pengadilan Negeri Sampit

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Hakim dan ASN

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama	IV/e	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	1
4	Pembina Tk. I	IV/b	1
5	Pembina	IV/a	1
6	Penata Tk. I	III/d	8
7	Penata	III/c	2
8	Penata Muda Tk. I	III/b	3
9	Penata Muda	III/a	3
10	Pengatur Tk. I	II/d	1
11	Pengatur	II/c	3
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-
13	Pengatur Muda	II/a	-
14	Non Pangkat	-	-

Berdasarkan Pendidikan Hakim dan ASN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Doktoral (S-3)	-
2	Magister (S-2)	4
3	Sarjana (S-1)	14
4	Diploma (D-3)	4

5	SLTA/Sederajat	1
6	SLTP/Sederajat	-
7	SD/Sederajat	-

IV. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Hakim dan ASN

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama	IV/e	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	1
4	Pembina Tk. I	IV/b	1
5	Pembina	IV/a	2
6	Penata Tk. I	III/d	7
7	Penata	III/c	2
8	Penata Muda Tk. I	III/b	7
9	Penata Muda	III/a	5
10	Pengatur Tk. I	II/d	2
11	Pengatur	II/c	-
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-
13	Pengatur Muda	II/a	-
14	Non Pangkat	-	-

Berdasarkan Pendidikan Hakim dan ASN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Doktoral (S-3)	-
2	Magister (S-2)	5
3	Sarjana (S-1)	20
4	Diploma (D-3)	1
5	SLTA/Sederajat	1
6	SLTP/Sederajat	-
7	SD/Sederajat	-

V. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Hakim dan ASN

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama	IV/e	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-
4	Pembina Tk. I	IV/b	2
5	Pembina	IV/a	1

6	Penata Tk. I	III/d	6
7	Penata	III/c	6
8	Penata Muda Tk. I	III/b	9
9	Penata Muda	III/a	5
10	Pengatur Tk. I	II/d	-
11	Pengatur	II/c	-
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-
13	Pengatur Muda	II/a	-
14	Non Pangkat	-	-

Berdasarkan Pendidikan Hakim dan ASN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Doktoral (S-3)	1
2	Magister (S-2)	8
3	Sarjana (S-1)	24
4	Diploma (D-3)	-
5	SLTA/Sederajat	4
6	SLTP/Sederajat	-
7	SD/Sederajat	-

VI. Pengadilan Negeri Muara Teweh

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Hakim dan ASN

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama	IV/e	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-
4	Pembina Tk. I	IV/b	-
5	Pembina	IV/a	2
6	Penata Tk. I	III/d	5
7	Penata	III/c	2
8	Penata Muda Tk. I	III/b	9
9	Penata Muda	III/a	1
10	Pengatur Tk. I	II/d	1
11	Pengatur	II/c	2
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-
13	Pengatur Muda	II/a	-
14	Non Pangkat	-	-

Berdasarkan Pendidikan Hakim dan ASN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Doktoral (S-3)	-
2	Magister (S-2)	5

3	Sarjana (S-1)	13
4	Diploma (D-3)	2
5	SLTA/Sederajat	2
6	SLTP/Sederajat	-
7	SD/Sederajat	-

VII. Pengadilan Negeri Buntok

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Hakim dan ASN

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama	IV/e	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-
4	Pembina Tk. I	IV/b	-
5	Pembina	IV/a	2
6	Penata Tk. I	III/d	4
7	Penata	III/c	2
8	Penata Muda Tk. I	III/b	8
9	Penata Muda	III/a	3
10	Pengatur Tk. I	II/d	1
11	Pengatur	II/c	4
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-
13	Pengatur Muda	II/a	-
14	Non Pangkat	-	-

Berdasarkan Pendidikan Hakim dan ASN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Doktoral (S-3)	-
2	Magister (S-2)	4
3	Sarjana (S-1)	16
4	Diploma (D-3)	3
5	SLTA/Sederajat	8
6	SLTP/Sederajat	-
7	SD/Sederajat	-

VIII. Pengadilan Negeri Tamiang Layang

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Hakim dan ASN

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama	IV/e	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-
4	Pembina Tk. I	IV/b	1

5	Pembina	IV/a	1
6	Penata Tk. I	III/d	3
7	Penata	III/c	6
8	Penata Muda Tk. I	III/b	13
9	Penata Muda	III/a	2
10	Pengatur Tk. I	II/d	1
11	Pengatur	II/c	1
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-
13	Pengatur Muda	II/a	-
14	Non Pangkat	-	-

Berdasarkan Pendidikan Hakim dan ASN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Doktoral (S-3)	-
2	Magister (S-2)	5
3	Sarjana (S-1)	17
4	Diploma (D-3)	3
5	SLTA/Sederajat	2
6	SLTP/Sederajat	1
7	SD/Sederajat	-

IX. Pengadilan Negeri Kasongan

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Hakim dan ASN

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama	IV/e	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-
4	Pembina Tk. I	IV/b	2
5	Pembina	IV/a	-
6	Penata Tk. I	III/d	4
7	Penata	III/c	4
8	Penata Muda Tk. I	III/b	4
9	Penata Muda	III/a	3
10	Pengatur Tk. I	II/d	1
11	Pengatur	II/c	1
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-
13	Pengatur Muda	II/a	-
14	Non Pangkat	-	-

Berdasarkan Pendidikan Hakim dan ASN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
----	--------------------	--------

1	Doktoral (S-3)	-
2	Magister (S-2)	4
3	Sarjana (S-1)	15
4	Diploma (D-3)	2
5	SLTA/Sederajat	4
6	SLTP/Sederajat	-
7	SD/Sederajat	-
8	Non Pendidikan	-

X. Pengadilan Negeri Kuala Kurun

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Hakim dan ASN

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama	IV/e	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-
4	Pembina Tk. I	IV/b	-
5	Pembina	IV/a	1
6	Penata Tk. I	III/d	5
7	Penata	III/c	-
8	Penata Muda Tk. I	III/b	6
9	Penata Muda	III/a	1
10	Pengatur Tk. I	II/d	1
11	Pengatur	II/c	1
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-
13	Pengatur Muda	II/a	-
14	Non Pangkat	-	-

Berdasarkan Pendidikan Hakim dan ASN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Doktoral (S-3)	1
2	Magister (S-2)	1
3	Sarjana (S-1)	9
4	Diploma (D-3)	3
5	SLTA/Sederajat	1
6	SLTP/Sederajat	-
7	SD/Sederajat	-
8	Non Pendidikan	-

XI. Pengadilan Negeri Nanga Bulik

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Hakim dan ASN

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama	IV/e	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-
4	Pembina Tk. I	IV/b	-
5	Pembina	IV/a	1
6	Penata Tk. I	III/d	4
7	Penata	III/c	1
8	Penata Muda Tk. I	III/b	6
9	Penata Muda	III/a	2
10	Pengatur Tk. I	II/d	1
11	Pengatur	II/c	1
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-
13	Pengatur Muda	II/a	-
14	Non Pangkat	-	-

Berdasarkan Pendidikan Hakim dan ASN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Doktoral (S-3)	-
2	Magister (S-2)	3
3	Sarjana (S-1)	11
4	Diploma (D-3)	2
5	SLTA/Sederajat	-
6	SLTP/Sederajat	-
7	SD/Sederajat	-

XII. Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Hakim dan ASN

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama	IV/e	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-
4	Pembina Tk. I	IV/b	-
5	Pembina	IV/a	2
6	Penata Tk. I	III/d	4
7	Penata	III/c	-
8	Penata Muda Tk. I	III/b	10
9	Penata Muda	III/a	2
10	Pengatur Tk. I	II/d	2
11	Pengatur	II/c	-

12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-
13	Pengatur Muda	II/a	-
14	Non Pangkat	-	-

Berdasarkan Pendidikan Hakim dan ASN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Doktoral (S-3)	-
2	Magister (S-2)	5
3	Sarjana (S-1)	12
4	Diploma (D-3)	2
5	SLTA/Sederajat	1
6	SLTP/Sederajat	-
7	SD/Sederajat	-

B. Mutasi

- Data Mutasi Masuk Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN/SATKER LAMA	JABATAN/SATKER BARU
1.	Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.	Wakil Ketua PT Bandung	Ketua PT Palangkaraya
2.	Maskur, S.H.	Hakim PN Jakarta Utara	Hakim Tinggi PT Palangkaraya
3.	Sari Sudarmi, S.H.	Hakim PN Semarang	Hakim Tinggi PT Palangkaraya
4.	Suswanti, S.H., M.Hum.	Hakim PN Surabaya	Hakim Tinggi PT Palangkaraya
5.	Sundari, S.H., M.H.	Hakim PN Klaten	Hakim Tinggi PT Palangkaraya
6.	Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.	Hakim PN Surakarta	Hakim Tinggi PT Palangkaraya
7.	Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.	Hakim PN Jakarta Selatan	Hakim Tinggi PT Palangkaraya
8.	Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.	Hakim PN Sidoarjo	Hakim Tinggi PT Palangkaraya
9.	Gorga Guntur, S.H., M.H.	Hakim PN Pemalang	Hakim Non Palu PT Palangkaraya
10.	Hasan Udi, S.H., M.H.	Panitera PN Pati	Panitera PT Palangkaraya
11.	Ruspeliati, S.H.	Panitera PN Pulang Pisau	Panmud. Pidana PT Palangkaraya
12.	Samsul Rizal, S.H.	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan PN	Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran PT Palangkaraya

		Pulang Pisau	
13.	Leon, S.H.	Panitera PN Kasongan	Panitera Pengganti PT Palangkaraya
14.	Sri Hasnawati, S.H., M.Kn	Hakim Yustisial Kelas II PT Pontianak	Hakim PN Palangkaraya
15.	Teguh Budiono, S.H	Panmud. Perdata Sampit	Panmud. Khusus PHI PN Palangkaraya
16.	Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H	Panmud. Pidana PN Kuala Kurun	Panmud. Hukum PN Palangkaraya
17.	Mansyah, S.H	Panitera PN Martapura	Panitera PN Palangkaraya
18.	Muhammad Rifa Rizah, S.H	Hakim PN Kediri	Hakim PN Palangkaraya
19.	Ricky Fardinand, S.H.,M.H	Wakil Ketua PN Tanjung Pinang	Ketua PN Palangkaraya
20.	Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.	Hakim Madya Muda PN Yogyakarta	Wakil Ketua PN Sampit
21.	Sulaeman, S.H., M.H.	Hakim PN Poso	Hakim PN Sampit
22.	Anung Handono, S.H	Panitera PN Ketapang	Panitera PN Sampit
23.	Noorhayati, S.Kom., S.H.	Panmud. Pidana PN Pulang Pisau	Panmud. Pidana PN Sampit
24.	Sopyani Devi, S.H.	Panitera Pengganti PN Palangkaraya	Panmud. Hukum PN Sampit
25.	Ikha Tina, S.H., M.Hum.	Hakim PN Serang	Wakil Ketua PN Pangkalan Bun
26.	Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.	Wakil Ketua PN Kebumen	Ketua PN Pangkalan Bun
27.	Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H.	Hakim PN Pangkalan Balai	Hakim PN Pangkalan Bun
28.	Harly Marlyn Simanjuntak, S.H.	Panitera PN Singkawang	Panitera PN Pangkalan Bun
29.	Christina Simanullang, S.H., M.H.	Hakim PN Cibinong	Wakil Ketua PN Kuala Kapuas Kelas
30.	Muhammad Riduansyah, S.H.	Hakim PN Jombang	Wakil Ketua PN Muara Teweh
31.	Edi Zarqoni, S.H.	Panmud. Perdata PN Palangkaraya	Panitera PN Muara Teweh
32.	Arif Rachman Hakim, S.H.	Panmud. Hukum PN Buntok	Panmud. Pidana PN Muara Teweh
33.	Ubaidillah, S.H.	Jurusita Pengganti PN Kuala Kapuas	Panitera Pengganti PN Muara Teweh
34.	Surya Harry Prayoga, S.H., M.H.	Panmud. Perdata PN Kandangan	Panitera PN Tamiang Layang
35.	Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H.	Hakim PN Klaten	Wakil Ketua PN Kasongan
36.	R. Imam Widiyanto, S.H.	Panmud. Perdata PN Purwokerto	Panitera PN Kasongan
37.	Didid Suhartono, S.H.	Panmud. Hukum PN	Panmud. Hukum PN

		Kuala Kurun	Kasongan
38.	Muhammad Deny Firdaus, S.H.	Hakim PN Lubuk Linggau	Wakil Ketua PN Kuala Kurun
39.	Muhamad Fadli, S.H.	Panitera Pengganti PN Kasongan	Panmud. Hukum PN Kuala Kurun
40.	Mersia Sibarani, S.E., S.H.	Panitera Pengganti PN Sampit	Panmud. Hukum PN Kuala Kurun
41.	Noripansyah, S.H.	Panmud. Hukum PN Banjarmasin	Panitera PN Pulang Pisau

• Data Mutasi Keluar Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Sujatmiko, S.H., M.H.	Ketua PT Palangkaraya	Ketua PT Denpasar
2.	Maurid Sinaga, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Hakim Tinggi PT Banten
3.	Togar, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Hakim Tinggi PT Surabaya
4.	Diris Sinambela, S.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Hakim Tinggi PT Medan
5.	Siti Jamzanah, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Hakim Tinggi PT Yogyakarta
6.	Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Hakim Tinggi PT Riau
7.	Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Hakim Tinggi PT Pontianak
8.	Didit Susilo Guntono, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Hakim Tinggi PT Banjarmasin
9.	Suharno, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Hakim Tinggi PT Banjarmasin
10.	Lestijono Warsito, S.H., M.H.	Panitera PT Palangkaraya	Panitera PT Banjarmasin
11.	Erni Kusumawati, S.H., M.H.	Hakim PN Palangkaraya	Hakim PN Yogyakarta
12.	Teguh Budiono, S.H.	Panmud. PHI PN Palangkaraya	Panmud. Perdata PN Palangkaraya
13.	Febri Purnamavita, S.H., M.H.	Ketua PN Sampit	Hakim PN Jakarta Barat
14.	Hendra Novriyandie, S.H.,	Hakim PN Sampit	Hakim PN Banjarbaru

	M.H.		
15.	Supriadi, S.H.	Panitera PN Sampit	Panitera PN Purworejo
16.	Teguh Budiono, S.H.	Panmud. Perdata PN Sampit	Panmud. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) PN Palangkaraya
17.	Mersia Sibarani, S.E., S.H.	Panitera Pengganti PN Sampit	Panmud. Hukum PN Kuala Kurun
18.	I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.	Ketua PN Pangkalan Bun	Ketua PN Wates
19.	Budiyon Noor, S.H.	Panitera PN Pangkalan Bun	Panitera PN Tulungagung
20.	Ubaidillah, S.H.	Juru Sita PN Kuala Kapuas Kelas	Panitera Pengganti PN Muara Teweh
21.	Ray Irawan Al-Madrusi, S.H	Analisis Perkara Peradilan PN Muara Teweh	Diklat Cakim Terpadu (Magang) pada PA Bandung
22.	Berly, S.E., S.H	Panitera PN Muara Teweh	Panitera PN Kediri
23.	Firdaus Amin, S.E.,M.M.	Kasubbag. Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana PN Buntok	Penata Layanan Operasional pada PTTUN Palembang
24.	Fridho Tumon, S.H	Panmud. Pidana PN Buntok	Panitera PN Kutai Barat
25.	Arif Rachman Hakim, S.H	Panitera Pengganti PN Buntok	Panmud. Pidana PN Muara Teweh
26.	Patwiansyah, S.H.	Panitera PN Tamiang Layang Panitera	Panitera PN Salatiga
27.	Guntur Nurjadi, S.H.	Wakil Ketua PN Kasongan	Ketua PN Ketapang
28.	Muhamad Fadli, S.H.	Panitera Pengganti PN	Panmud. Hukum PN

		Kasongan	Kuala Kurun
29.	Jonathan Hiero Tambunan, S.H.	Cakim PN Kasongan	Cakim PN Pontianak
30.	Gerry Geovant Supranata Kaban, S.H.	Cakim PN Kasongan	Cakim PN Blitar
31.	Didid Suhartono, S.H.	Panmud. Hukum PN Kuala Kurun	Panmud. Hukum PN Kasongan
32.	Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.	Panmud. Pidana PN Kuala Kurun	Panmud. Hukum PN Palangkaraya
33.	Ghesa Agnanto Hutomo, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PN Kuala Kurun	Cakim PN Tangerang
34.	Devi Tri Mulyani, S.H., M.Kn.	Analisis Perkara Peradilan PN Kuala Kurun	Analisis Perkara Peradilan PN Purwokerto
35.	Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.	Hakim PN Kuala Kurun	Hakim PN Sangatta
36.	Muhammad Deny Firdaus, S.H.	Wakil Ketua PN Kuala Kurun	Hakim PN Jambi
37.	Achmad Soberi, S.H., M.H.	Ketua PN Nanga Bulik	Hakim PN Malang
38.	Toni Aprianto, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PN Nanga Bulik	Analisis Perkara Peradilan PN Amuntai
39.	Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li.	Ketua PN Pulang Pisau	Ketua PN Trenggalek
40.	Noorhayati, S.Kom., S.H.	Panmud. Pidana PN Pulang Pisau	Panmud. Pidana PN Sampit
41.	Dismas Lukito Ornasto, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PN Pulang Pisau	Analisis Perkara Peradilan/Calon Hakim PN Surakarta
42.	Ruspeliati, S.H.	Panitera PN Pulang Pisau	Panmud. Pidana PT Palangkaraya
43.	Samsul Rizal, S.H.	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan PN	Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran PT Palangkaraya

		Pulang Pisau	
--	--	--------------	--

C. Promosi

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Hasan Udi, S.H., M.H.	Panitera PN Pati	Panitera PT Palangkaraya
2.	Linda, S.H.	Panitera Pengganti PT Palangkaraya	Panmud. Hukum PT Palangkaraya
3.	Ruspeliati, S.H.	Panitera PN Pulang Pisau	Panmud. Pidana PT Palangkaraya
4.	Samsul Rizal, S.H.	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan PN Pulang Pisau	Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran PT Palangkaraya
5.	Leon, S.H.	Panitera PN Kasongan	Panitera Pengganti PT Palangkaraya
6.	I Wayan Wasta, S.H.	Panmud. Hukum PT Palangkaraya	Panitera Pengganti PT Palangkaraya
7.	Monalisa Agustina Toewak, S.E.	Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran PT Palangkaraya	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda PT Palangkaraya
8.	Junaldi Singarimbun, S.E., S.H.	Penata Layanan Operasional pada Subbag Keuangan & Pelaporan PT Palangkaraya	Pranata Keuangan APBN Penyelia PT Palangkaraya
9.	Yogi Nugraha Putra, S.Kom.	Penata Layanan Operasional pada Subbag. Rencana Program dan Anggaran PT Palangkaraya	Pranata Komputer Ahli Pertama PT Palangkaraya
10.	Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H	Hakim PN Palangkaraya	Wakil Ketua PN Tebo

11.	Agung Sulistiyono, S.H., S.Sos., M.Hum	Ketua Palangkaraya	PN	Hakim Tinggi PT Banjarmasin
12.	Edi Zarqoni, S.H	Panmud. Perdata Palangkaraya	PN	Panitera PN Muara Teweh
13.	Febri Purnamavita, S.H., M.H.	Ketua PN Sampit		Hakim PN Jakarta Barat
14.	Benny Octavianus, S.H., M.H.	Wakil Ketua Sampit	PN	Ketua PN Sampit
15.	Hendra Novriyandie, S.H., M.H.	Hakim PN Sampit		Hakim PN Banjarbaru
16.	Supriadi, S.H.	Panitera PN Sampit		Panitera PN Purworejo
17.	Teguh Budiono, S.H.	Panmud. Perdata Sampit	PN	Panmud. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) PN Palangkaraya
18.	Mersia Sibarani, S.E., S.H.	Panitera PN Sampit		Panmud. Hukum PN Kuala Kurun
19.	Ubaidillah, S.H.	Juru Sita Kapas Kelas	PN	Panitera Pengganti PN Muara Teweh
20.	Firdaus Amin, S.E., M.M.	Kasubbag. Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana Buntok	PN	Penata Layanan Operasional pada PTTUN Palembang
21.	Fridho Tumon, S.H	Panmud. Pidana Buntok	PN	Panitera PN Kutai Barat
22.	Arif Rachman Hakim, S.H	Panitera PN Buntok	Pengganti	Panmud. Pidana PN Muara Teweh
23.	Insa Marhandent, S.H.	Analisis Peradilan Tamiang Layang	Perkara PN	Juru Sita Pengganti PN Tamiang Layang
24.	Mada Kristianto, S.H.	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata		Analisis Pengelolaan Keuangan APBN PN Kasongan

		Laksana Kasongan	PN	
25.	Friady, S.H.	Panmud. Perdata Kuala Kurun	PN	Panmud. Pidana Kuala Kurun
26.	Muhamad Fadli, S.H.	Panmud. Hukum Kuala Kurun	PN	Panmud. Perdata Kuala Kurun
27.	Rahmat Salim Rumnie, S.E.	Penata Operasional Kuala Kurun	Layanan PN	Kasubbag. Umum Dan Keuangan Kuala Kurun
28.	Evan Setiawan Dese, S.H., M.H.	Wakil Ketua Nanga Bulik	PN	Ketua PN Nanga Bulik
29.	Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li.	Ketua Pisau	PN Pulang	Ketua PN Trenggalek
30.	Noorhayati, S.Kom., S.H.	Panmud. Pidana Pulang Pisau	PN	Panmud. Pidana Sampit
31.	Dismas Lukito Ornasto, S.H.	Analisis Peradilan Pisau	Perkara PN Pulang	Analisis Peradilan/ Calon Hakim PN Surakarta
32.	Ruspeliati, S.H.	Panitera Pisau	PN Pulang	Panmud. Pidana Palangkaraya
33.	Riviera Jesica Manurung, S.H.	Analisis Peradilan Pisau	Perkara PN Pulang	Panitera Pengganti PN Pulang Pisau
34.	Ika April Yanti Sitanggang, A.Md., S.M.	Pengelola Penanganan PN Pulang Pisau	Perkara PN	Penata Layanan Operasional Pulang Pisau

D. Pensiun dan Pemberhentian

NO	NAMA	JABATAN	TMT	KETERANGAN
1.	M. Yunan, S.H	Panitera Pengganti PT Palangkaraya	01 Maret 2024	Batas Usia Pensiun (BUP)
2.	H. Ajidinnor, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Palangkaraya	01 Agustus 2024	Meninggal Dunia
3.	Drs. Nur Insan	Hakim Adhoc PHI PN Palangkaraya	19 Agustus 2024	Pensiun Normal
4.	Muhammad Suhri Burhan, S.H., M.H	Hakim Adhoc PHI PN Palangkaraya	11 September 2024	Pensiun Normal
5.	Rosmini Huzaimah	Pengadministrasi Registrasi Perkara	1 November 2024	Pemberhentian dengan Hormat

		PN Muara Teweh		Tidak Atas Permintaan Sendiri
--	--	----------------	--	-------------------------------------

E. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

NO	NAMA	JABATAN	DIKLAT YANG DIKUTI
1.	Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	• Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak
2.	Bonny Sanggah S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	• Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak
3.	Suswanti, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	• Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak
4.	Sari Sudarmi, S.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	• Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak
5.	Didit Susilo Guntono, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	• Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) di Lingkungan Peradilan Umum
6.	Heru Budyanto, S.H, M.H	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	• Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) di Lingkungan Peradilan Umum
7.	Abdul Wahib S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	• Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) di Lingkungan Peradilan Umum
8.	Agung Iswanto, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor PT Palangkaraya	• Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum dan Auditor Pemerintah dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi di Provinsi Kalimantan Tengah
9.	Erry Theresia, S.H., M.H	Hakim Ad Hoc Tipikor PT Palangkaraya	• Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum dan Auditor Pemerintah dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi di

			Provinsi Kalimantan Tengah
10.	Dr. Lily Solichul Mukminah, S.H., M.H	Hakim Ad Hoc Tipikor PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum dan Auditor Pemerintah dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi di Provinsi Kalimantan Tengah
11.	Lestijono Warsito, S.H., M.H.	Panitera PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik
12.	Meidyawati, S.E., M.E.	Sekretaris PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik
13.	Isti Yani, S.Si., M.E.	Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Manajemen ASN
14.	Fitriya Nor Aini, S.E.	Kasubbag. Keuangan dan Pelaporan PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara
15.	Wahyu Teguh, S.E., S.H.	Kasubbag. Kepegawaian dan TI PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Manajemen ASN
16.	Abdul Yusuf, S.Sos.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Kepegawaian
17.	Ginta Murli, S.E.	Arsiparis Ahli Pertama PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> • Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
18.	Levriana Saraswati S.E.	Perencana Ahli Pertama PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> • Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
19.	Muthiah Az-zahra Rasyid S.H.	Analisis Perkara Peradilan pada Kepaniteraan Hukum PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Bahasa Isyarat (SIBI/BISINDO)
20.	Ricky Fardinand, S.H., M.H.	Ketua PN Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan sertifikasi Hakim Persaingan Usaha Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum • Undangan Kolokium Yudisial tanggal 9-13 Desember 2024 di Surabaya
21.	Muhammad Affan, S.H., M.H	Hakim PN Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Bagi Hakim

			dilingkungan Peradilan Umum
22.	In Gusti Bagus Sandhi, S.H	Panmud Pidana Palangkaraya PN	• Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota Tanggap Narkoba
23.	Seluruh Hakim, Hakim Adhoc PHI, dan Hakim Adhoc Tipikor PN Palangkaraya	Hakim, Hakim Adhoc PHI/Tipikor PN Palangkaraya	• Penugasan Judicial Dialog Tentang Rahasia Dagang melalui Zoom di Satker PN PLK
24.	Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H	Panmud Hukum Palangkaraya PN	• Sosialisasi data statistic di Walikota Palangkaraya
25.	Astiti Swanita Rini, S.H., M.H	Hakim Adhoc PHI Palangkaraya PN	• Pelatihan Hubungan Industrial tentang jaminan sosial tenaga kerja
26.	Widarti, S.Sos., S.H	Sekretaris Palangkaraya PN	• Undangan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPP Kota Palangkaraya 2025 dan RPJPP Kota Palangkaraya tahun 2025
27.	Astiti Swanita Rini, S.H., M.H	Hakim adhoc PHI Palangkaraya PN	• Undangan Tenaga kerja dan transmigrasi pemerintah provinsi Kalimantan tengah
28.	<ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Ramdes, S.H • Sri Widarti, S.Sos., S.H. • Jon Makmus Saragih, S.H., M.H. • Edi Zarqoni, S.H. • I Gusti Bagus Sandhi, S.H. • Efraim, S.H • Teguh Budiono, S.H. • Gustaf Denovan 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua Palangkaraya PN • Sekretaris Palangkaraya PN • Panitera Palangkaraya PN • Panmud Perdata Palangkaraya PN • Panmud Pidana Palangkaraya PN • Panmud Tipikor Palangkaraya PN • Panmud PHI Palangkaraya PN • PPNPN Palangkaraya PN 	• Undangan Sosialisasi Nasional Pengajuan Upaya Hukum Kasasi/PK secara elektronik
29.	Seluruh Cakim Palangkaraya PN	Cakim PN Palangkaraya	• Pelatihan Diklat I Program PPCH Terpadu Peradilan Umum
30.	• Erni Kusumawati,	Hakim PN Palangkaraya	• Bimtek dari PT.PR Tgl 10

	<p>S.H., M.H.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sri Hasnawati, S.H., M.Kn. • Muhammad affan, S.H., M.H. 		<p>Januari 2024</p>
31.	<ul style="list-style-type: none"> • Kusmat Tirta Sasmita, S.H • Amir Mahmud Munte, S.H • Iis Siti Rochmah, S.H., M.h 	<p>Hakim Adhoc Tipikor PN Palangkaraya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan KPK Tgl 23 April 2024 di Palangkaraya
32.	<ul style="list-style-type: none"> • Muhammad ramdes, S.H • Erni Kusumawati, S.H., M.H. • Sri Hasnawati, S.H., M.kn 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua PN Palangkaraya • Hakim Palangkaraya PN • Hakim Palangkaraya PN 	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek Penanganan Perkara Berbasis keadilan restoratif
33.	<ul style="list-style-type: none"> • Kusmat Tirta Sasmita, S.H • Amir Machmud Munte, S.H • Iis Siti Rochmah, S.H., M.H 	<p>Hakim Adhoc Tipikor PN Palangkaraya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek Peningkatan Kemampuan Aparat Penega Hakim Tindak Pidana Korupsi
34.	<p>Ainun Zaryah, S.E</p>	<p>Bendahara Pengeluaran PN Palangkaraya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek Kegiatan Refresment penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran
35.	<ul style="list-style-type: none"> • Agung Sulistiyono • Mansyah • Nanda Mario Fernandus • Timotius Agni Angga Kusuma 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua PN Palangkaraya • PN Palangkaraya Panitera, • Pengelola Penanganan Perkara PN Palangkaraya • PPNPN PN Palangkaraya 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Monev Monitoring Penyelesaian Perkara elektronik serta kelengkapan berkas perkara
36.	<p>Kusmat Tirta Sasmita, S.H</p>	<p>Hakim Adhoc Tipikor PN Palangkaraya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek Pelatihan Penyusunan Laporan kinerja Gelombang IV Kelas A secara Online di Satker
37.	<p>Kusmat Tirta Sasmita, Darjono Abadi</p>	<p>Hakim Adhoc Tipikor PN Palangkaraya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan koordinasi dan Sosialisasi tentang implementasi keadilan restorative bagi pelaku dewasa

38.	<ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Ramdes • Sri Hasnawati 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua PN Palangkaraya 	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek Pelatihan Perempuan berhadapan dengan hukum CPBH
39.	Putri Prayana Tarigan	Pengelola Data dan Informasi PN Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis penggunaan Siman V2 Batch III dan IV
40.	Muhammad Affan	Hakim PN Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek Kegiatan Pendaftaran Kelas E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi
41.	Ainun Zaryah	Fungsional Keuangan Penyelia Palangkaraya Pranata APBN PN	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek Kegiatan Perhatian dan Dukungan Teknis • Kegiatan Diskusi Bersama Customer Service Officer-CSO (SiBRO) dengan tema serba serbi Bekanja Perjanan Dinas
42.	Ainun Zaryah	Fungsional Keuangan Penyelia Palangkaraya Pranata APBN PN	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Diskusi Bersama Customer Service Officer-CSO (SiBRO) dengan tema serba serbi Bekanja Perjanan Dinas
43.	Muhammad Affan	Hakim PN Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek Pelatihan bagi Pelatih Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bagi Hakim dan Hakim Adhoc
44.	Astiti Swanita Rini	Hakim Adhoc PHI PN Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan bagi Pelatih Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bagi Hakim dan hakim Adhoc
45.	Muhammad Affan	Hakim PN Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bagi Hakim dan hakim Adhoc
46.	Astiti Swanita Rini, Dwi Harto Hanggono, Prapti Ramadani	Hakim adhoc PHI PN Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Sertifikasi Hakim PHI bagi Hakim Karier dan Hakim Adhoc Peradilan Umum seluruh Indonesia
47.	<ul style="list-style-type: none"> • Mewikristya • Abdul Kahar Mashuri 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelaah Kebijakan PTIP • Pengadministrasi Perkantoran subbag Umum dan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek Pemertaan Pegawai di Lingkungan MARI dan Badan Peradilan Umum

48.	<ul style="list-style-type: none"> • Mandes • Laila Hayati 	<ul style="list-style-type: none"> • Penata Layanan Operasional Subbag PTIP • Pengolah data dan Informasi subbag Kepegawaian Ortala 	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek Pemertaan Pegawai di Lingkungan MARI dan Badan Peradilan Umum tanggal 28 November 2024 secara Daring
49.	Benny Octavianus, S.H., M.H.	Ketua PN Sampit	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Angkatan XX
50.	Yulanto Prafifto Utomo, S.H., M.H.	Wakil Ketua PN Sampit	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Hak Kekayaan Intelektual • Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga Bidang Kepailitan dan PKPU Bagi Hakim Peradilan Seluruh Indonesia
51.	Muhammad Noor, S.Kom.	Sekretaris PN Sampit	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2024
52.	Dimas Amoroso Aning Wijanarko, S.Kom.	Kasubbag. Umum dan Keuangan PN Sampit	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara
53.	Hanna Marsela Sihombing, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara PN Sampit	<ul style="list-style-type: none"> • <i>E-learning</i> bendahara penerima Angkatan I Tahun 2024
54.	Iren Panjaitan, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara PN Sampit	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Jarak Jauh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pembantu Angkatan III Tahun 2024
55.	Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.	Ketua PN Pangkalan Bun	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga Bidang Kepailitan dan PKPU Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia Tahap II • Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga Bidang Hak Kekayaan Intelektual Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia Tahap II
56.	Budiyon Noor, S.H.	Panitera PN Pangkalan Bun	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Pengadilan Inklusi ke 4 yang diadakan

			oleh SAPDA
57.	Husni Thamrin, S.T.	Sekretaris PN Pangkalan Bun	• Pelatihan Pengadilan Inklusi ke 4 yang diadakan oleh SAPDA
58.	Didik Sulaiman, S.H.	Kasubbag. Umum dan Keuangan PN Pangkalan Bun	• Pelatihan Pengadilan Inklusi ke 4 yang diadakan oleh SAPDA
59.	Diyah Eka Prasetya Rini,S.I.P	Kasubbag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan PN Pangkalan Bun	• Pelatihan Pengadilan Inklusi ke 4 yang diadakan oleh SAPDA
60.	Muhammad Purnomo Aji	PPNPN PN Pangkalan Bun	• Pelatihan Pengadilan Inklusi ke 4 yang diadakan oleh SAPDA
61.	Harco Yossie	PPNPN PN Pangkalan Bun	• Pelatihan Pengadilan Inklusi ke 4 yang diadakan oleh SAPDA
62.	Samsi	PPNPN PN Pangkalan Bun	• Pelatihan Pengadilan Inklusi ke 4 yang diadakan oleh SAPDA
63.	Noor Maydah Lestika, S.Pd.	PPNPN PN Pangkalan Bun	• Pelatihan Pengadilan Inklusi ke 4 yang diadakan oleh SAPDA
64.	Ega Ayu Ananda, S.H.	PPNPN PN Pangkalan Bun	• Pelatihan Pengadilan Inklusi ke 4 yang diadakan oleh SAPDA
65.	Suci Paramita, S.H.	PPNPN PN Pangkalan Bun	• Pelatihan Pengadilan Inklusi ke 4 yang diadakan oleh SAPDA
66.	Nurul Hidayah, S.Ak.	PPNPN PN Pangkalan Bun	• Pelatihan Pengadilan Inklusi ke 4 yang diadakan oleh SAPDA
67.	Daniel Simanihuruk, S.Sos	Penelaah Teknik Kebijakan PN Pangkalan Bun	• Diklat Manajemen Administrasi Peradilan Tingkat Dasar Angkatan II • Diklat Kepemimpinan Dasar Bela Negara Angkatan II
68.	Sulistyawati	Bendahara PN Pangkalan Bun	• Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara Daring (Online) • Pemetaan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada
69.	Budiyon Noor, S.H.	Panitera PN Pangkalan Bun	• Sertifikasi Mediator bagi Hakim dan Panitera

70.	Chanro Simamora, S.H.	Kasubbag. Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana PN Pangkalan Bun	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Manajemen ASN Gelombang III Angkatan IV
71.	Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.	Hakim PN Pangkalan Bun	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana anak bagi Hakim Tk. I Peradilan Umum Seluruh Indonesia Tahap II
72.	Soraya Isfandari, S.Pd.SD.	Analisis Tatalaksana PN Pangkalan Bun	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya secara daring (Online)
73.	Menak Manullang, A.Md.	Pengelola Data dan Informasi PN Pangkalan Bun	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Bendahara Penerimaan
74.	Jandelsem Andrevo Khairum, S.Kom.	Kasubbag. PTIP PN Kuala Kapuas	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan <i>Stakeholder Day</i> KPPN Palangkaraya
75.	Khadijah Nur Arafah, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PN Kuala Kapuas	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan Angkatan II Tahun 2024
76.	Saptono, S.H., M.H.	Ketua PN Kuala Kapuas	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia
77.	<ul style="list-style-type: none"> • Fernandos Pasaribu, S.H., M.H. • Jandelsem Andrevo Khairum, S.Kom. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kasubbag. Umum dan Keuangan PN Kuala Kapuas • Kasubbag. PTIP PN Kuala Kapuas 	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Tata Cara Penyampaian LPJ Bendahara Melalui SAKTI
78.	Fernandos Pasaribu, S.H., M.H.	Kasubbag. Umum dan Keuangan PN Kuala Kapuas	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Tindak Lanjut Penyelesaian Penerbitan BMN Dalam Rangka Implementasi SIMAN v2
79.	<ul style="list-style-type: none"> • Ubaidillah, S.H. • Ilham Salim Tampubolon, A.Md., S.A.B. 	<ul style="list-style-type: none"> • Juru Sita PN Kuala Kapuas • Penata Layanan Operasional PN Kuala Kapuas 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Perpajakan KP2KP Kuala Kapuas
80.	<ul style="list-style-type: none"> • Saptono, S.H., M.H. • Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H. • Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. • Wuri Mulyandari, S.H. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua PN Kuala Kapuas • Hakim PN Kuala Kapuas • Hakim PN Kuala Kapuas 	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

		<ul style="list-style-type: none"> • Hakim PN Kuala Kapuas 	
81.	<ul style="list-style-type: none"> • Saptono, S.H., M.H. • Amran Halim Zunaedi Pasaribu, S.H., M.H. • Muhammad Usman, S.H. • Nanda Kusuma Wardana, S.H. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua PN Kuala Kapuas • Panitera PN Kuala Kapuas • PPNPN PN Kuala Kapuas • PPNPN PN Kuala Kapuas 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik
82.	Akhmad Rusadi, S.H., M.H.	Panmud. Perdata PN Kuala Kapuas	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Penyusunan Kinerja
83.	<ul style="list-style-type: none"> • Saptono, S.H., M.H. • Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. • Wuri Mulyandari, S.H. • Amran Halim Zunaedi Pasaribu, S.H., M.H. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua PN Kuala Kapuas • Hakim PN Kuala Kapuas • Hakim PN Kuala Kapuas • Panitera PN Kuala Kapuas 	<ul style="list-style-type: none"> • Seminar dan Diskusi Sehari Hakim Peradilan Umum Se-Wilayah Kalimantan Tengah
84.	Saptono, S.H., M.H.	Ketua PN Kuala Kapuas	<ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi Pengembangan dan Pembinaan Kota Tanggap Ancaman Narkoba Sektor Kelembagaan
85.	Rahmadi, S.H.	Panmud. Pidana PN Kuala Kapuas	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi PKPU Nomor 8 Tahun 2024
86.	Christina Simanullang, S.H., M.H.	Wakil Ketua PN Kuala Kapuas	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Sistem Peradilan Anak (SPPA)
87.	Jandelsen Andrevo Khairum, S.Kom.	Kasubbag. PTIP PN Kuala Kapuas	<ul style="list-style-type: none"> • Pahandut Pembayaran <i>Common Expenses</i> dengan <i>Platform</i> Pembayaran Pemerintah
88.	<ul style="list-style-type: none"> • Fernandos Pasaribu, S.H., M.H. • Jandelsem Andrevo Khairum, S.Kom 	<ul style="list-style-type: none"> • Kasubbag. Umum dan Keuangan PN Kuala Kapuas • Kasubbag. PTIP PN Kuala Kapuas 	<ul style="list-style-type: none"> • Perhatian dan Dukungan Teknis Untuk Topik Tertentu (PAHANDUT) dengan tema Pengelolaan Belanja Pegawai melalui Aplikasi Gaji Web dan Kegiatan Diskusi Bersama Customer Service Officer – CSO (SiBRO) dengan tema Serba – Serbi Belanja Perjalanan Dinas
89.	Arief Kadarmo, S.H.,	Wakil Ketua PN Kuala	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Sertifikasi Hakim

	M.H.	Kapuas	Persaingan Usaha Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia Tahap I
90.	Sugiannur, S.H., M.H	Ketua PN Muara Teweh	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Ketua Mahkamah Agung Republik • Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum • Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
91.	M. Iskandar Muda, S.H	Hakim PN Muara Teweh	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia
92.	Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H	Hakim PN Muara Teweh	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia
93.	Yulie Christie Dewi Uda, S.Kom	Sekretaris PN Muara Teweh	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan SPIP Integratif Gelombang II Tahun 2024 yang kerjasama dengan Pusdiklatwas BPKP
94.	Ahmad Husaini, S.H., M.H.	Ketua PN Buntok	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek Penanganan Perkara Berbasis Keadilan RJ • Sosialisasi Monitoring Penyelesaian Perkara
95.	Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.	Hakim PN Buntok	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online SIPP • <i>e-Learning</i> Peningkatan Penahanan Gratifikasi
96.	Melrano Sutrisno, S.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan PN Buntok	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Bendahara Penerima

97.	Riduan	Pengadministrasi Perkantoran PN Buntok	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Bendahara Pengeluaran
98.	Arnold Jhon Harry Sinaga	Pengelola Sarana Dan Prasarana PN Buntok	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Bendahara Penerima
99.	Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.	Hakim PN Buntok	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek Penanganan Perkara Berbasis Keadilan RJ
100.	M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.	Hakim PN Buntok	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek Penanganan Perkara Berbasis Keadilan RJ
101.	Anita Selvia, S.E.	Sekretaris PN Buntok	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek Tindak Lanjut SIMAN
102.	Chelvia, A.Md, S.H.	Kasubbag. Umum Dan Keuangan PN Buntok	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek Tindak Lanjut SIMAN • Bimtek Refreshment Aplikasi Sakti dan Refreshment Bendahara Satuan Kerja Mitra KPPN Buntok
103.	Budy Irawan	Pengadministrasi Perkantoran PN Buntok	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek Tindak Lanjut SIMAN • Mengikuti Kegiatan Edukasi <i>Coretax</i>
104.	Rizal Biduri, S.H.	Panitera PN Buntok	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Monitoring Penyelesaian Perkara
105.	Kian Teguh, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PN Buntok	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Monitoring Penyelesaian Perkara
106.	Noryadin	Jurusita PN Buntok	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Monitoring Penyelesaian Perkara
107.	Yudika August Feriyanto, S.A.P	Penata Layanan Operasional PN Buntok	<ul style="list-style-type: none"> • <i>e-Learning</i> Bendahara Penerima • Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
108.	Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.	Ketua PN Tamiang Layang	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pemilihan Umum Bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia • Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Lingkungan Peradilan Umum
109.	Arief Heryogi, S.H.,	Hakim PN Tamiang	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Penyusunan

	M.H.	Layang	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
110.	Kharisma Laras Sulu, S.H.	Hakim PN Tamiang Layang	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi • Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2024
111.	Maria Faustian Beata, S.H.	Hakim PN Tamiang Layang	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2024
112.	Citra Adi Asmara, S.E.	Sekretaris PN Tamiang Layang	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
113.	Widia Ayu Rekti, S.H.	Kasubbag Bagian Umum dan Keuangan PN Tamiang Layang	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara Batch VI
114.	Hendy Saputra, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan PN Tamiang Layang	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Kompetensi Negara PPSPM Tersertifikasi (SNT) • Sertifikat Kompetensi PPK Negara Tersertifikasi (PNT)
115.	Zul Ikram, S.Sos.	Penata Layanan Operasional PN Tamiang Layang	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Kompetensi Negara PPSPM Tersertifikasi (SNT)
116.	Nataria Cristina Triana, S.H., M.Hum.	Ketua PN Kasongan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pemilu Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia • Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum • Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik
117.	Kurnia Sari Alkas, S.H.,	Wakil Ketua PN	<ul style="list-style-type: none"> • Seminar dan Lokakarya

	M.H.	Kasongan	Tata Kelola Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Keadilan Iklim
118.	Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.Hum.	Hakim PN Kasongan	<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum
119.	Win Widarti, S.H.	Hakim PN Kasongan	<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum
120.	R. Imam Widiyanto, S.H.	Panitera PN Kasongan	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik
121.	Mada Kristianto, S.H.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN PN Kasongan	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pelatihan Jarak Jauh Bendahara Penerimaan Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen
122.	Siti Martinah, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan PN Kasongan	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan SPIP Integratif Gelombang V Tahun 2024 Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pelatihan Online Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara
123.	Toto Isnadi, A.Md.	Jurusita Pengganti PN Kasongan	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Bidang Perbendaharaan pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
124.	Devi Triana Hutabarat, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PN Kasongan	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik
125.	Ricky Darmawan, S.H., M.H.	Jurusita PN Kasongan	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Bidang Perbendaharaan pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
126.	Yessi Rianita	Pengelola Perkara PN	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Bidang

	Sihombing, A.Md.	Kasongan	Perbendaharaan pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
127.	Dr. Galih Bawono, S.H., M.H.	Ketua PN Kuala Kurun	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI; • Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik; • Seminar dan Diskusi Sehari Hakim Peradilan Umum Se-Wilayah Kalimantan Tengah di Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
128.	R. Guntar A.S., S.H., M.H.	Hakim PN Kuala Kurun	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI • Seminar dan Diskusi Sehari Hakim Peradilan Umum Se-Wilayah Kalimantan Tengah di Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
129.	Fransiskus Sinurat, S.H.	Hakim PN Kuala Kurun	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
130.	Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.	Hakim PN Kuala Kurun	<ul style="list-style-type: none"> • Seminar dan Diskusi Sehari Hakim Peradilan Umum Se-Wilayah Kalimantan Tengah di Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
131.	Akhmad Dillah, S.H.	Panitera PN Kuala Kurun	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik; • Seminar dan Diskusi Sehari Hakim Peradilan

			Umum Se-Wilayah Kalimantan Tengah di Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
132.	Exman Vryanto, S.E.	Sekretaris PN Kuala Kurun	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Stakeholder day KPPN Palangkaraya hal Evaluasi dan Apresiasi Kinerja Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Satker K/L Semester I TA 2024.
133.	Akhmad Syahrui	Kasubbag. PTIP PN Kuala Kurun	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Perhatian dan Dukunagn Teknis untuk Topik Tertentu (PAHANDUT) dengan tema Penyamaan Persepsi dan Sosialisasi Langkah-Langkah dalam menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024. • Kegiatan Stakeholder day KPPN Palangkaraya hal Evaluasi dan Apresiasi Kinerja Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Satker K/L Semester I TA 2024.
134.	Rahmat Salim Rumnie, S.E.	Penata Layanan Operasional PN Kuala Kurun	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara Secara <i>Blended Learning</i> Anggakatan II Tahun 2024 pada Badan Litbang, Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung; • Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan Secara <i>Blended Learning</i> Anggakatan II Tahun 2024 pada Badan Litbang, Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung; • Bimbingan Teknis Tata Cara Penyampaian LPJ Bendahara melalui APlikasi SAKTI oleh KPPN Palangkaraya. • Kegiatan <i>Refresment</i>

			<p>Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran oleh KPPN Palangkaraya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Perhatian dan Dukungan Teknis untuk Topik Tertentu (PAHANDUT) dengan tema Pengelolaan Belanja Pegawai melalui Aplikasi Gaji Web dan Diskusi bersama <i>Customer Service Officer-CSO</i> (SiBRO) dengan tema Belanja Perjalanan Dinas. • <i>Workshop</i> Pendaftaran dan Penggunaan kartu Kredit Pemerintah.
135.	Nita Silvestry, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara PN Kuala Kurun	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik.
136.	Solimah	PPNPN PN Kuala Kurun	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Penggunaan SIMAn v2 Batch III dan IV oleh KPKNL Palangkaraya
137.	Evan Setiawan Dese, S.H.	Ketua PN Nanga Bulik	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Nasional Pengajuan Upaya Hukum Kasasi / PK Secara Elektronik • Sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2023 • Sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2022 • Melaksanakan Bimbingan Teknis Perkara Berbasis Keadilan Restoratif ke Banjarmasin • Pelaksanaan Pelatihan teknis Yudisial Tindak Pidana Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia • Koordinasi dan Sosialisasi Dandapala Digital • Sosialisasi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 • Sosialisasi terhadap Peraturan Mahkamah

			<p>Agung Nomor 1 Tahun 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022
138.	Rendi Abednego Sinaga, S.H.	Hakim PN Nanga Bulik	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Nasional Pengajuan Upaya Hukum Kasasi / PK Secara Elektronik • Sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2023 • Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI Batch 1 Tahap 2 • Sosialisasi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 • Sosialisasi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022
139.	Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.	Hakim PN Nanga Bulik	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Nasional Pengajuan Upaya Hukum Kasasi / PK Secara Elektronik • Sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2023 • Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI Batch 1 Tahap 2 • Seminar dan Diskusi Sehari Hakim Peradilan Umum Se-Wilayah Kalimantan Tengah • Sosialisasi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 • Sosialisasi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022
140.	Ucok Richon Manik,	Panitera PN Nanga Bulik	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Nasional

	S.H.		<p>Pengajuan Upaya Hukum Kasasi / PK Secara Elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2023 • Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi Panitera Pengadilan Negeri Kelas I.B Tahun 2024 di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia • Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik • Seminar dan Diskusi Sehari Hakim Peradilan Umum Se-Wilayah Kalimantan Tengah • Sosialisasi Layanan Kepegawaian Tenaga Teknis Kepaniteraan • Sosialisasi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022
141.	Aang Sutopo, S.H.	Sekretaris PN Nanga Bulik	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Nasional Pengajuan Upaya Hukum Kasasi / PK Secara Elektronik • Sosialisasi Penertiban BMN dalam Rangka Implementasi SIMAN V2 secara Daring
142.	Ade Andiko, S.H.	Panmud. Perdata PN Nanga Bulik	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Nasional Pengajuan Upaya Hukum Kasasi / PK Secara Elektronik • Sosialisasi Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama versi 5.6.0 dan Aplikasi e-Court 6.0.0 • Sosialisasi Tindak Pidana Pilkasa 2024 • Sosialisasi Layanan Kepegawaian Tenaga Teknis Kepaniteraan

143.	Vusi Rurianty, S.Kom	Kasubbag. Umum dan Keuangan PN Nanga Bulik	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Penertiban BMN dalam Rangka Implementasi SIMAN V2 secara Daring • Pelatihan Online Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara Batch VI Bekerjasama dengan Diklat PKN BPK RI • Penyelesaian Penertiban BMN dalam Rangka Implementasi SIMAN v2 • Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI Batch 1 Tahap 2
144.	Junipar Munte, S.H.	Panmud. Pidana PN Nanga Bulik	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Nasional Pengajuan Upaya Hukum Kasasi / PK Secara Elektronik • Sosialisasi Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama versi 5.6.0 dan Aplikasi e-Court 6.0.0 • Sosialisasi Tindak Pidana Pilkada 2024 • Sosialisasi Layanan Kepegawaian Tenaga Teknis Kepaniteraan • Sosialisasi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022
145.	Aris Telaumbanua, M.Han	Editio S.H., Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana PN Nanga Bulik	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Layanan Adminstrasi Kepegawaian, Kepaniteraan, secara Daring • Pelatihan Manajemen ASN Gelombang III Angkatan IV secara Online Tahun 2024 • Sertifikasi Kompetensi Teknis Manajemen ASN, jenjang Pengawas/Setara Kerjasama Mahkamah Agung Angkatan V (PNBP) secara Online
146.	M.Guntur, S.H.	Panitera Pengganti PN	<ul style="list-style-type: none"> • Seminar dan Diskusi

		Nanga Bulik	<p>Sehari Hakim Peradilan Umum Se-Wilayah Kalimantan Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama versi 5.6.0 dan Aplikasi e-Court 6.0.0
147.	Rudy Ihsan, S.H.	Panitera Pengganti PN Nanga Bulik	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi SIMAN v2 • Sosialisasi Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama versi 5.6.0 dan Aplikasi e-Court 6.0.0 • Sosialisasi Layanan Kepegawaian Tenaga Teknis Kepaniteraan
148.	Beny Parlindungan Lumbantoruan, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PN Nanga Bulik	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Nasional Pengajuan Upaya Hukum Kasasi / PK Secara Elektronik • Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik
149.	Thio Doly Pakpahan, S.H.	Jurusita PN Nanga Bulik	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Nasional Pengajuan Upaya Hukum Kasasi / PK Secara Elektronik • Sosialisasi Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama versi 5.6.0 dan Aplikasi e-Court 6.0.0
150.	Periyaldi, A.Md	Pengelola Sistem dan Jaringan PN Nanga Bulik	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI Batch 1 Tahap 2 • Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik • Seminar dan Diskusi Sehari Hakim Peradilan Umum Se-Wilayah Kalimantan Tengah
151.	T. Firdaus, A.Md.	Pengadministrasi Registrasi Perkara PN Nanga Bulik	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Penertiban BMN dalam Rangka Implementasi SIMAN V2 secara Daring

			<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi SIMAN v2
152.	Adi Saputra Sibagariang, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara PN Nanga Bulik	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Nasional Pengajuan Upaya Hukum Kasasi / PK Secara Elektronik
153.	Mohamad Zakiuddin, S.H.	Ketua PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pemilu Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum • Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum • Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik • Bimbingan Teknis Eksekusi Secara <i>Online</i> di Lingkungan Peradilan Umum
154.	Kurnia Fitrianiingsih, S.H.	Wakil Ketua PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pemilu Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum • Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum • Bimbingan Teknis Eksekusi Secara <i>Online</i> di Lingkungan Peradilan Umum • Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
155.	Ismaya Salindri, S.H., M.H.	Hakim PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan <i>Online</i> Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP) • Bimbingan Teknis

			Eksekusi Secara <i>Online</i> di Lingkungan Peradilan Umum
156.	Riviera Jesica Manurung, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan secara <i>Blended Learning</i> • Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara secara <i>Blended Learning</i> • Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik
157.	I Made Landep, S.H.	Sekretaris PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Tata Cara Penyampaian LPJ Bendahara Melalui Sakti
158.	Reinhard Simanjuntak, S.H.	Kasubag. Umum dan Keuangan PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Tata Cara Penyampaian LPJ Bendahara Melalui Sakti • Bimbingan Teknis Penggunaan SIMAN v2 • Kegiatan Bimbingan Teknis Layanan Barang Milik Negara secara <i>Online</i> • Pelatihan <i>Online</i> Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara.
159.	Arofah Azhar, A.Md.	Teknisi Sarana dan Prasarana PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Tata Cara Penyampaian LPJ Bendahara Melalui Sakti • Bimbingan Teknis Penggunaan SIMAN v2
160.	Ishmatul Lu'lu, S.H.	Hakim PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum • Bimbingan Teknis Eksekusi Secara <i>Online</i> di Lingkungan Peradilan Umum
161.	Ruspeliati, S.H.	Panitera PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik • Bimbingan Teknis Eksekusi Secara <i>Online</i> di Lingkungan Peradilan Umum

162.	M. Zaldi Akbar, S.H.	Panitera Pengganti PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik
163.	Laili Rahmah, A.Md., S.H., M.H.	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Manajemen ASN Gelombang III Angkatan IV Secara <i>Online</i>
164.	Herjanriasto Bekti Nugroho, S.H., M.H.	Hakim PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Eksekusi Secara <i>Online</i> di Lingkungan Peradilan Umum
165.	Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.	Hakim PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Eksekusi Secara <i>Online</i> di Lingkungan Peradilan Umum
166.	Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.	Hakim PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Eksekusi Secara <i>Online</i> di Lingkungan Peradilan Umum
167.	Silvia Kumalasari, S.H.	Hakim PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Eksekusi Secara <i>Online</i> di Lingkungan Peradilan Umum
168.	Romi Nevriyandra, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan <i>e-Learning</i> Bendahara Penerimaan
169.	Ika April Yanti Sitanggang, A.Md., S.M.	Penata Layanan Operasional PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pembantu Tahun Anggaran 2024 Secara <i>Online</i>

F. Hukuman Disiplin

NO	NAMA	SATUAN KERJA	HUKDIS YANG DIBERIKAN	TINGKAT HUKDIS
1	R H	Pengadilan Negeri Muara Teweh	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Terhitung mulai tanggal 1 November 2024.	Berat
2	C	Pengadilan Negeri Buntok	Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024.	Berat

3	M	Pengadilan Negeri Buntok	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2024.	Berat
---	---	--------------------------	---	-------

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

80 PENGELOLAAN KEUANGAN

89 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

110 PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

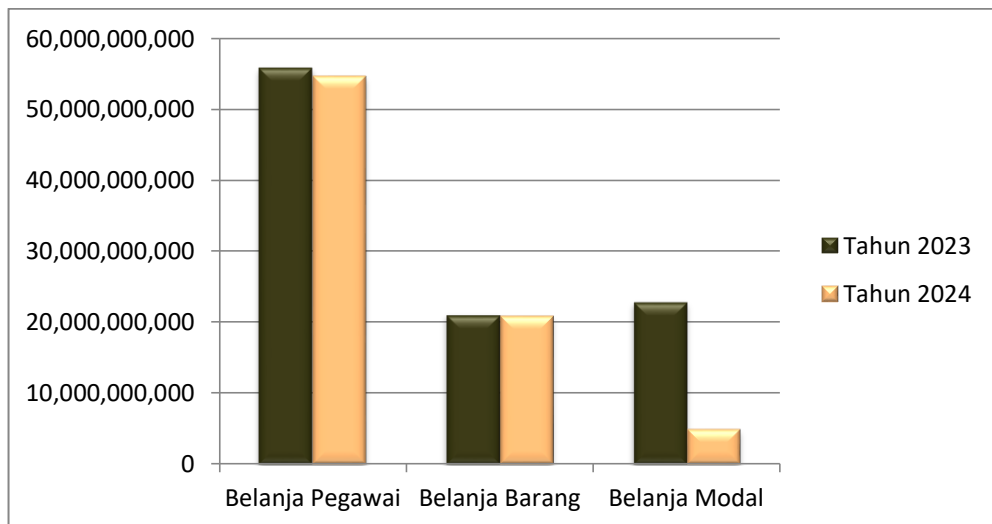
A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Peradilan Umum se-Wilayah Hukum Kalimantan Tengah memperoleh anggaran sebesar **Rp.82.707.969.000** yang terdiri dari DIPA 01 BUA (Badan Urusan Administrasi) sebesar **Rp. 80.650.141.000** dan DIPA 03 BADILUM (Badan Peradilan Umum) sebesar **Rp. 2.057.828.000**.

Jika dilihat dari pagu anggaran DIPA 01 selama tahun 2024, maka anggaran paling besar ada pada Belanja Pegawai yaitu sebesar **Rp.54.707.564.000** atau sekitar **67,83%** dari jumlah Pagu anggaran yang ada, kemudian disusul oleh Belanja Barang sebesar **Rp.20.965.712.000** atau **26%** dari total pagu anggaran, dan Belanja Modal dengan nilai pagu **Rp.4.976.865.000** atau **6,17%**.

Tabel : Perbandingan Anggaran DIPA 01 Tahun 2023 dan Tahun 2024

Jenis Belanja	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	55.880.893.000	54.707.564.000
Belanja Barang	21.199.997.000	20.965.712.000
Belanja Modal	22.960.372.000	4.976.865.000
Jumlah	100.041.262.000	80.650.141.000



Grafik Perbandingan Anggaran DIPA 01 Tahun 2023 dan Tahun 2024

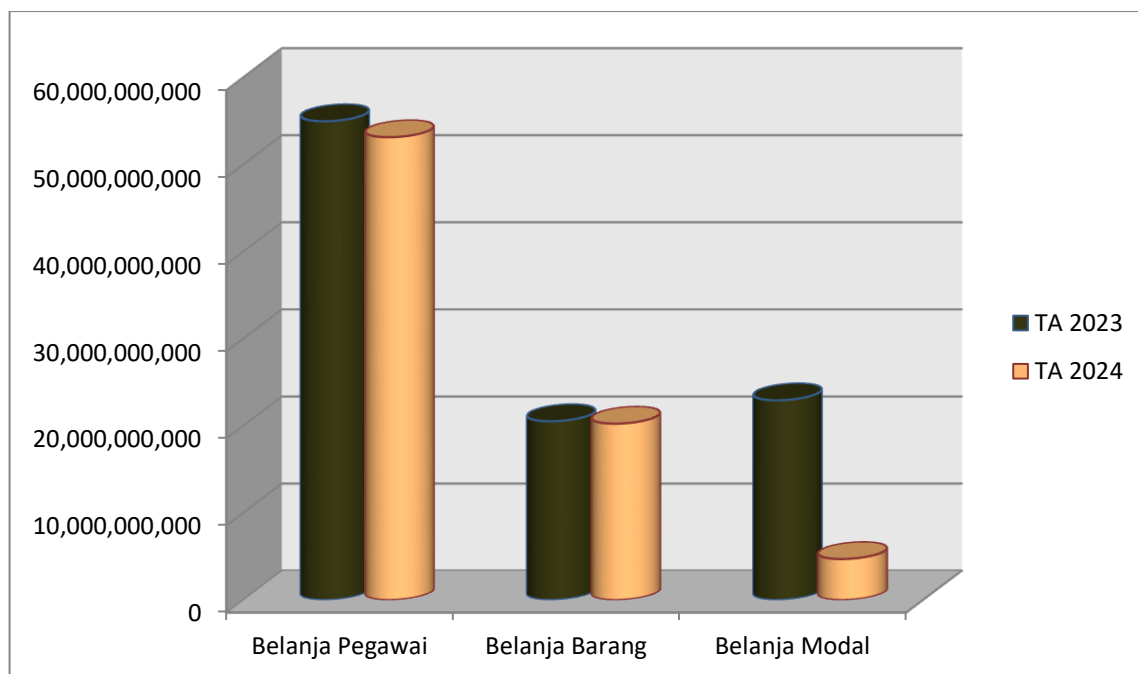
Tabel : Perbandingan Anggaran DIPA 03 Tahun 2023 dan Tahun 2024

Jenis Belanja	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Belanja Barang	1.742.060.000	2.057.828.000

Realisasi belanja DIPA 01 tahun anggaran 2024 sebesar **Rp.78.083.697.408** dengan persentase **96,82%** dari besarnya pagu anggaran, sedangkan tahun anggaran 2023 sebesar **Rp.98.431.268.084** atau sebesar **98,39 %** dari besar pagu anggaran. Jika dilihat dari persentase realisasi anggaran tahun ini realisasi anggaran tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia karena tidak ada terdapat pagu minus.

Tabel : Realisasi DIPA 01 Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Jenis Belanja	Tahun Anggaran 2023		Tahun Anggaran 2024	
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	55.880.893.000	54.977.558.124	54.707.564.000	53.144.518.606
Belanja Barang	21.199.997.000	20.524.881.062	20.965.712.000	20.242.324.678
Belanja Modal	22.960.372.000	22.928.828.898	4.976.865.000	4.696.854.124
Jumlah	100.041.262.000	98.431.268.084	80.650.141.000	78.083.697.408

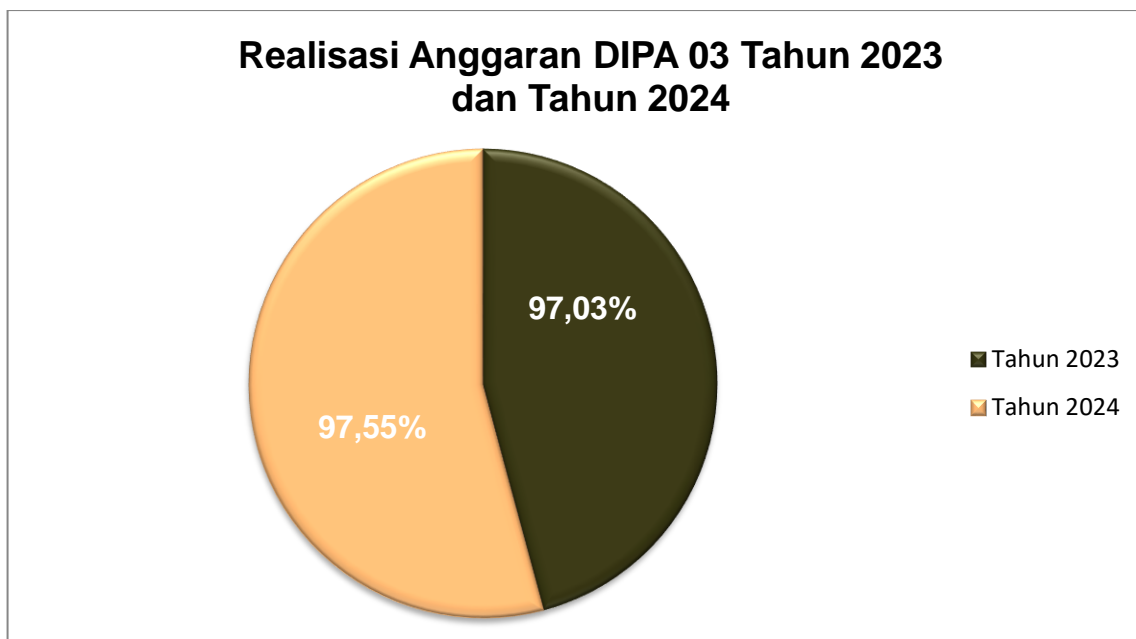


Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Realisasi belanja DIPA 03 tahun anggaran 2024 sebesar **Rp.2.008.417.271** dengan persentase **97,60%** dari besarnya pagu anggaran, sedangkan tahun anggaran 2023 sebesar **Rp.1.699.313.929** atau sebesar **97,55%** dari besar pagu anggaran.

Tabel : Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2023 dan Tahun 2024

Jenis Belanja	Tahun Anggaran 2023		Tahun Anggaran 2024	
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang	1.742.060.000	1.699.313.929	2.057.828.000	2.008.417.271



Adapun secara rinci Pagu dan Realisasi pada setiap Pengadilan per DIPA dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

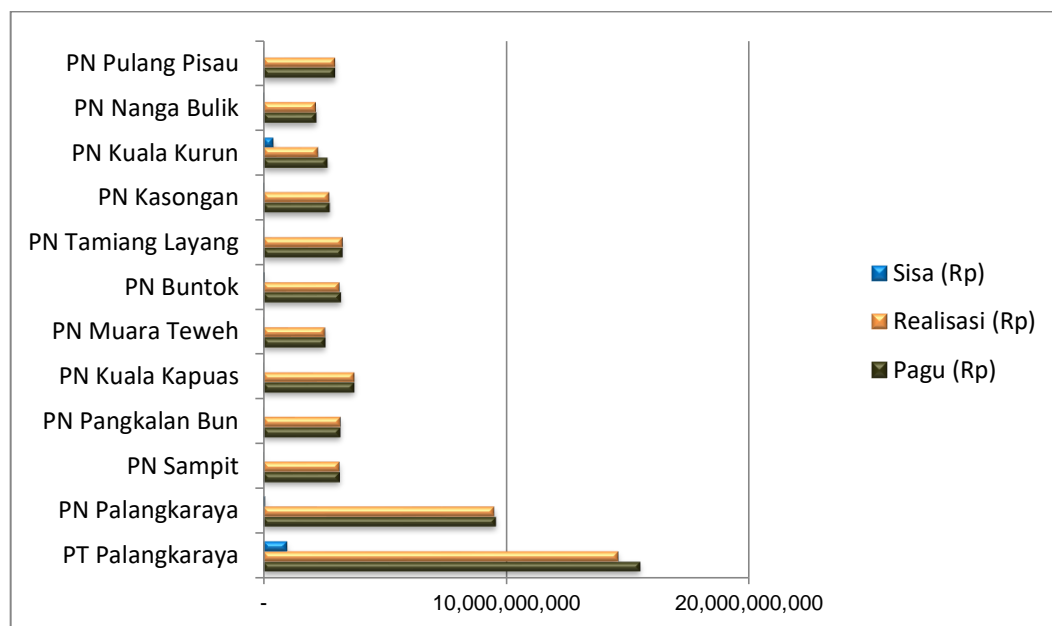
A. Belanja Pegawai (51)

Anggaran Belanja Pegawai untuk Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: Belanja Pegawai

No	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1.	PT Palangkaraya	5.502.413.000	14.582.507.091	919.905.909	94,07%
2.	PN Palangkaraya	9.573.189.000	9.493.123.001	80.065.999	99,16%
3.	PN Sampit	3.146.912.000	3.133.379.879	13.532.121	99,57%
4.	PN Pangkalan Bun	3.177.060.000	3.174.228.286	2.831.714	99,91%
5.	PN Kuala Kapuas	3.748.067.000	3.742.993.320	5.073.680	99,86%
6.	PN Muara Teweh	2.552.612.000	2.541.500.732	11.111.268	99,56%
7.	PN Buntok	3.198.113.000	3.132.143.348	65.969.652	97,94%
8.	PN Tamiang Layang	3.259.423.000	3.256.459.817	2.963.183	99,91%
9.	PN Kasongan	2.742.969.000	2.714.664.689	28.304.311	98,97%
10.	PN Kuala Kurun	2.656.911.000	2.262.053.339	394.857.661	85,14%

11.	PN Nanga Bulik	2.182.744.000	2.157.141.021	25.602.979	98,83%
12.	PN Pulang Pisau	2.967.151.000	2.954.324.083	12.826.917	99,57%
Jumlah		54.707.564.000	53.144.518.606	1.563.045.394	97,14%



Grafik Belanja Pegawai (51) Tahun Anggaran 2024

B. Belanja Barang (52)

Pada tahun anggaran 2024 Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya mendapat anggaran sebesar **Rp.20.965.712.000** dengan pencapaian realisasi sebesar **Rp.20.242.324.678** dengan persentase sebesar **96,55%**. Belanja Barang terdiri dari:

a) Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri :

- Belanja Keperluan Perkantoran;
- Belanja Langganan Daya dan Jasa;
- Belanja Pemeliharaan Kantor;
- Belanja Perjalanan Dinas;
- Honor yang terkait dengan operasional Satker;
- Belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

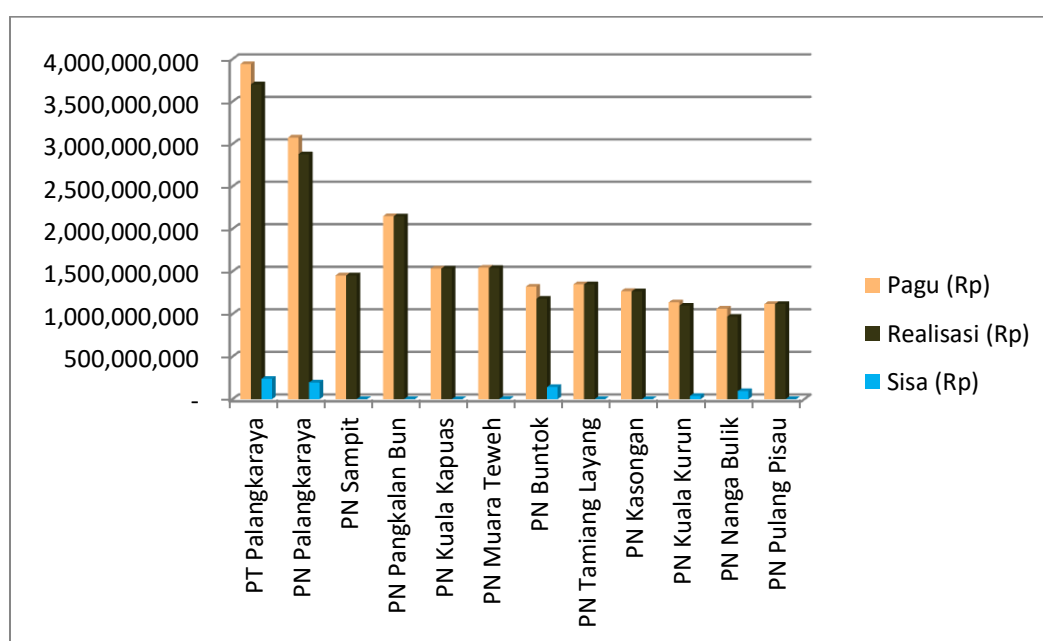
b) Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Jenis pengeluaran terdiri dari :

- a. Honor yang terkait dengan output kegiatan;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel;
- c. Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kantor, antara lain biaya paket rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang transportasi lokal, biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan.

Tabel: Belanja Barang

No	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	PT Palangkaraya	3.941.825.000	3.702.872.378	238.952.622	93,94%
2	PN Palangkaraya	3.076.187.000	2.880.094.027	196.092.973	93,63%
3	PN Sampit	1.454.047.000	1.453.445.575	601.425	99,96%
4	PN Pangkalan Bun	2.151.122.000	2.148.749.669	2.372.331	99,89%
5	PN Kuala Kapuas	1.534.038.000	1.533.763.382	274.618	99,98%
6	PN Muara Teweh	1.544.818.000	1.540.631.062	4.186.938	99,73%
7	PN Buntok	1.322.771.000	1.179.532.205	143.238.795	89,17%
8	PN Tamiang Layang	1.350.268.000	1.349.711.202	556.798	99,96%
9	PN Kasongan	1.269.807.000	1.267.056.429	2.750.571	99,78%
10	PN Kuala Kurun	1.138.482.000	1.099.255.988	39.226.012	96,55%
11	PN Nanga Bulik	1.064.031.000	969.336.999	94.694.001	91,10%
12	PN Pulang Pisau	1.118.316.000	1.117.875.762	440.238	99,96%
Jumlah		20.965.712.000	20.242.324.678	723.387.322	96,55%



Grafik Belanja Barang (52) Tahun Anggaran 2024

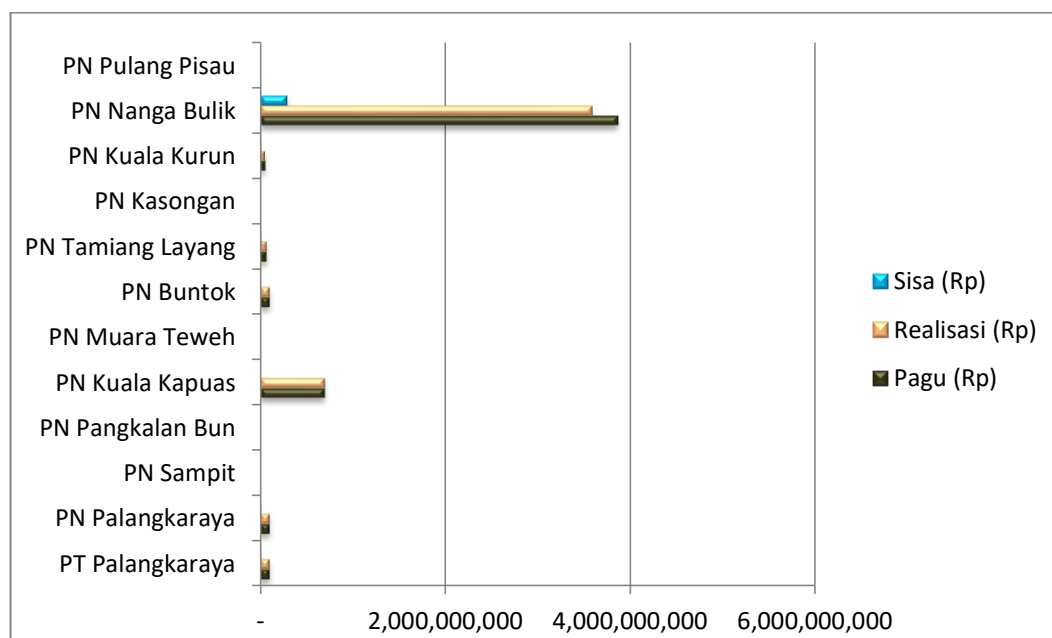
C. Belanja Modal (53)

Pada Tahun 2024 Belanja Modal untuk Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebesar **Rp.4.976.865.000** dengan realisasi sebesar **Rp.4.696.854.124** atau mencapai **94,37%**.

Apabila dilihat, belanja modal yang terlaksana yaitu berupa program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya, program tersebut dapat dikategorikan sudah mencapai sasaran sesuai target, yang bertujuan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan. Anggaran Belanja Modal pada satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: Belanja Modal

No	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	PT Palangkaraya	100.000.000	99.933.300	66.700	99,93%
2	PN Palangkaraya	99.900.000	99.500.000	400.000	99,60%
3	PN Sampit	-	-	-	0,00%
4	PN Pangkalan Bun	-	-	-	0,00%
5	PN Kuala Kapuas	695.000.000	695.000.000	-	100,00%
6	PN Muara Teweh	-	-	-	0,00%
7	PN Buntok	99.708.000	99.708.000	-	100,00%
8	PN Tamiang Layang	66.886.000	66.622.200	263.800	99,61%
9	PN Kasongan	-	-	-	0,00%
10	PN Kuala Kurun	51.892.000	50.115.000	1.777.000	96,58%
11	PN Nanga Bulik	3.863.479.000	3.585.975.624	277.503.376	92,82%
12	PN Pulang Pisau	-	-	-	0,00%
Jumlah		4.976.865.000	4.696.854.124	280.020.876	94,37%



Grafik Belanja Modal (53) Tahun Anggaran 2024

Pada tahun anggaran 2024 terdapat 5 (lima) Satuan Kerja yang tidak mendapatkan Belanja Modal yaitu Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Muara Teweh, Pengadilan Kasongan dan Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Belanja modal pada tahun 2024 selain memang sudah dianggarkan dalam DIPA juga diperoleh dari Hibah Pemerintah Daerah dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada tahun anggaran berjalan.

2. DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)

Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk DIPA 03 mendapatkan anggaran sebesar **Rp.2.057.828.000** dengan realisasi sebesar **Rp.2.008.417.271** atau **97.60%** dari pagu anggaran.

DIPA 03 hanya terdiri dari belanja barang saja. Belanja Barang tersebut digunakan untuk mendukung peningkatan manajemen peradilan, dengan tujuan agar perkara dapat terselesaikan tepat waktu baik pada Peradilan Tingkat Banding maupun Peradilan Umum lainnya. Belanja Barang terdiri dari :

- a) Belanja operasional terdiri dari belanja pengiriman surat dinas pos pusat.
- b) Belanja non operasional terdiri dari belanja bahan dan belanja non operasional lainnya.
- c) Belanja persediaan
- d) Belanja jasa untuk konsultasi
- e) Belanja perjalanan dinas

Tabel: Anggaran DIPA 03

No	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	PT Palangkaraya	285.700.000	274.028.230	11.671.770	95,91%
2	PN Palangkaraya	245.450.000	229.473.150	15.976.850	93,49%
3	PN Sampit	255.500.000	254.908.500	591.500	99,77%
4	PN Pangkalan Bun	205.000.000	204.938.000	62.000	99,97%
5	PN Kuala Kapuas	203.500.000	198.800.000	4.700.000	97,69%
6	PN Muara Teweh	172.510.000	170.161.125	2.348.875	98,64%
7	PN Buntok	109.500.000	100.602.432	8.897.568	91,87%
8	PN Tamiang Layang	84.840.000	84.271.000	569.000	99,33%
9	PN Kasongan	109.500.000	109.207.996	292.004	99,73%
10	PN Kuala Kurun	88.922.000	86.519.500	2.402.500	97,30%
11	PN Nanga Bulik	103.815.000	102.975.623	839.377	99,19%
12	PN Pulang Pisau	193.591.000	192.531.715	1.059.285	99,45%
Jumlah		2.057.828.000	2.008.417.271	49.410.729	97,60%

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya merupakan salah satu penyumbang ke kas negara sebagai sumber penerimaan dalam pembiayaan belanja pemerintah. Pengelolaan PNBP pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya dilaksanakan secara akurat, transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2024 realisasi PNBP pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebesar **Rp.647.894.593** dengan perincian sebagai berikut :

**BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA
DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

No	Kode Akun	Jenis Pendapatan (Rp)	Satuan Kerja											Jumlah per Kode Akun	
			PT Palangkaraya	PN Palangkaraya	PN Sampit	PN Pangkalan Bun	PN Kuala Kapuas	PN Muara Tehew	PN Buntok	PN Tamiang Layang	PN Kasongan	PN Kuala Kurun	PN Nanga Bulik		PN Pulang Pisau
1	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	4.365.500	-	-	-	973.300	-	-	-	-	-	-	-	5.338.800
2	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	26.724.027	18.488.837	17.330.801	19.497.100	8.047.658	12.802.148	16.812.144	117.000	943.866	-	100.500	-	120.864.081
3	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	-	120.000	30.000	-	1.160.000	-	-	-	-	-	20.000	-	1.330.000
4	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitia Badan Peradilan	-	5.640.000	4.470.000	180.000	1.330.000	520.000	680.000	20.000	830.000	270.000	1.300.000	10.000	15.250.000
5	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	-	15.965.000	13.710.000	7.100.000	3.500.000	2.740.000	2.250.000	3.460.000	2.160.000	2.510.000	3.100.000	1.290.000	57.785.000
6	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.510.000	79.873.000	30.772.000	27.353.500	14.377.900	7.531.500	4.918.000	6.835.000	6.017.000	6.453.500	8.524.000	2.493.000	196.658.400
7	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	-	-	-	131.770	-	-	-	-	-	-	131.770
8	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu	349.810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349.810
10	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.670.000	31.770.000	33.440.000
11	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang lalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.844.466	67.902.266	216.746.732
Jumlah per Satker			32.949.337	120.086.837	66.312.801	54.130.600	29.388.858	23.725.418	24.660.144	10.432.000	9.950.866	9.233.500	163.558.966	103.465.266	647.894.593

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Tahun 2024 bagian kesekretariatan khususnya Bagian Umum pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas untuk menyiapkan dan memelihara sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok yaitu proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Prasarana yang disiapkan selalu dipelihara agar dapat tetap berfungsi dengan baik selama tahun 2024 berupa bangunan gedung kantor, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan tempat parker dan lain-lain.

Demikian juga halnya dengan sarana yang disiapkan selalu dipelihara agar tetap dapat berfungsi dengan baik selama tahun 2024 diantaranya berupa kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4, alat pengolah data serta peralatan dan fasilitas perkantoran lainnya.

1. Gedung Kantor

Gedung Kantor di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya berjumlah 14 unit dengan rincian sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Gedung Kantor (Unit)	Kondisi	Keterangan
1	PT Palangkaraya	2	Baik	1 Gedung Kantor Depan 1 Gedung Kantor Belakang
2	PN Palangkaraya	2	Baik	1 Gedung Kantor PN 1 Gedung Kantor Pengadilan Tipikor
3	PN Sampit	1	Baik	
4	PN Pangkalan Bun	1	Baik	
5	PN Kuala Kapuas	1	Baik	
6	PN Muara Teweh	2	Baik	1 Gedung Kantor PN 1 Bangunan Zetting Plate
7	PN Buntok	1	Baik	
8	PN Tamiang Layang	1	Baik	
9	PN Kasongan	1	Baik	
10	PN Kuala Kurun	1	Baik	
11	PN Nanga Bulik	1	Baik	Mulai operasional pada tanggal 11 Maret 2024
12	PN Pulang Pisau	1	Baik	
Jumlah		14	Baik	

2. Rumah Dinas

Rumah Dinas yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya berjumlah 59 unit dengan rincian sebagai berikut :

No	Satker	Rumah Dinas (Unit)	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	PT Palangkaraya	10	10	-	-
2	PN Palangkaraya	9	8	-	1
3	PN Sampit	8	5	3	-
4	PN Pangkalan Bun	10	10	-	-
5	PN Kuala Kapuas	8	-	8	-
6	PN Muara Teweh	5	5	-	-
7	PN Buntok	9	9	-	-
8	PN Tamiang Layang	-	-	-	-
9	PN Kasongan	-	-	-	-
10	PN Kuala Kurun	-	-	-	-
11	PN Nanga Bulik	-	-	-	-
12	PN Pulang Pisau	-	-	-	-
Jumlah		59	47	11	1

3. Tempat Ibadah

Tempat Ibadah yang ada di lokasi kantor di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya berjumlah 7 unit dengan rincian sebagai berikut :

No	Satker	Tempat Ibadah (Unit)	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	PT Palangkaraya	1	1	-	-
2	PN Palangkaraya	-	-	-	-
3	PN Sampit	1	1	-	-
4	PN Pangkalan Bun	1	1	-	-
5	PN Kuala Kapuas	1	1	-	-
6	PN Muara Teweh	-	-	-	-
7	PN Buntok	1	1	-	-
8	PN Tamiang Layang	1	1	-	-
9	PN Kasongan	-	-	-	-
10	PN Kuala Kurun	-	-	-	-
11	PN Nanga Bulik	-	-	-	-
12	PN Pulang Pisau	-	-	-	-
Jumlah		6	6	-	-

4. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas roda 4 yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya berjumlah 52 unit, sedangkan roda 2 berjumlah 51 unit dengan rincian sebagai berikut :

No	Satker	Kendaraan Dinas (Unit)	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)					
1	PT. Palangkaraya	8	8	-	-
2	PN. Palangkaraya	5	5	-	-
3	PN. Sampit	4	2	2	-
4	PN. Pangkalan Bun	5	5	-	-
5	PN. Kuala Kapuas	4	3	-	1
6	PN. Muara Teweh	4	4	-	-
7	PN. Buntok	4	4	-	-
8	PN. Tamiang Layang	3	3	-	-
9	PN. Kasongan	5	4	1	-
10	PN. Kuala Kurun	3	3	-	-
11	PN. Nanga Bulik	4	4	-	-
12	PN. Pulang Pisau	3	3	-	-
Jumlah		52	48	-	-
Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)					
1	PT. Palangkaraya	8	7	-	1
2	PN. Palangkaraya	8	4	-	4
3	PN. Sampit	6	3	3	-
4	PN. Pangkalan Bun	6	5	-	1
5	PN. Kuala Kapuas	5	-	3	2
6	PN. Muara Teweh	4	1	-	3
7	PN. Buntok	4	3	-	1
8	PN. Tamiang Layang	2	2	-	-
9	PN. Kasongan	2	2	-	-
10	PN. Kuala Kurun	2	2	-	-
11	PN. Nanga Bulik	2	2	-	-
12	PN. Pulang Pisau	2	2	-	-
Jumlah		51	33	6	12

5. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

a. Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Peralatan dan fasilitas perkantoran yang ada di Pengadilan Tinggi Palangkaraya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Peralatan Dan Mesin		Sat	Saldo Per 31 Desember 2024	
No.	Uraian		Kuant	Nilai
1	2	3	4	5
1	A.C. Split	Buah	29	177,421,500
2	Penangkal Petir	Buah	1	550,000
3	Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)	Buah	1	350,000
4	Hub	Buah	3	4,340,075
5	Meja Telepon	Buah	4	1,200,000
6	Rak Kayu	Buah	12	10,431,000
7	Stationary Generating Set	Unit	1	353,540,000
8	Kursi Kayu	Buah	40	48,265,000
9	Sound System	Buah	2	28,640,000
10	Router	Buah	4	16,576,600
11	Lambang Instansi	Buah	1	4,475,828
12	Jeep	Unit	1	491,362,400
13	Tangga Aluminium	Buah	1	3,000,000
14	Filing Cabinet Besi	Buah	9	20,900,000
15	Rak Server	Buah	1	14,960,000
16	Kaca Hias	Buah	7	109,000
17	Brandkas	Buah	1	309,000
18	Unit Power Supply	Buah	6	3,626,875
19	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	2,750,000
20	Stabilisator	Buah	1	94,927
21	Meja Kerja Kayu	Buah	66	98,037,000
22	Gordyin/Kray	Buah	3	87,500,000
23	Rak Besi	Buah	16	32,168,500
24	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	1	1,485,000
25	Tabung Pemadam Api	Buah	8	9,240,000
26	LCD Projector/Infocus	Buah	3	43,868,000
27	Facsimile	Buah	2	4,221,000
28	LCD Monitor	Buah	2	2,900,000
29	Lemari Es	Buah	1	1,300,000
30	Loudspeaker	Buah	8	48,626,500
31	Microphone/Boom Stand	Buah	2	1,210,000
32	Audio Mixing Portable	Buah	2	7,210,000
33	Mesin Absensi	Buah	2	10,315,000
34	CCTV - Camera Control Television System	Buah	2	31,910,000
35	Digital Keyboard Technics	Buah	1	12,000,000
36	Mesin Pemotong Rumput	Buah	1	6,490,000
37	Kipas Angin	Buah	4	1,480,000
38	Meja Komputer	Buah	10	4,302,000
39	Server	Buah	3	137,930,600

**BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA
DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

40	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	39,327,546
41	Camera Digital	Buah	1	8,400,000
42	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	27	72,179,109
43	Alat Kantor Lainnya	dum my	3	22,485,000
44	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dum my	1	66,000,000
45	Microphone	Buah	15	17,200,000
46	Mimbar/Podium	Buah	1	253,000
47	Kabel	Buah	3	1,300,000
48	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	6	42,306,000
49	Partisi	Buah	7	16,592,200
50	Peralatan Personal Komputer Lainnya	dum my	4	1,960,000
51	Sedan	Unit	2	445,991,420
52	Network Monitoring System	Buah	1	3,026,100
53	Peralatan Jaringan Lainnya	dum my	3	24,690,700
54	Drone	Buah	1	9,600,000
55	Perkakas Kantor Lainnya	dum my	3	87,000
56	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	dum my	1	199,999,930
57	Wireless Amplifier	Buah	2	7,900,000
58	Modulation Monitor Speaker Kabaret	Buah	1	1,600,000
59	P.C Unit	Buah	31	361,584,725
60	Sice	Buah	15	58,640,000
61	Lemari Besi/Metal	Buah	4	64,877,000
62	Meja Makan Kayu	Buah	1	231,000
63	Alat Pendingin Lainnya	dum my	3	89,347,000
64	Station Wagon	Unit	1	260,000,000
65	Microphone Table Stand	Buah	1	760,000
66	Karpet	Buah	4	12,075,000
67	Monitor	Buah	3	9,145,075
68	Microphone/Wireless MIC	Buah	3	8,775,000
69	White Board	Buah	7	232,000
70	Power Amplifier	Buah	1	3,550,000
71	Televisi	Buah	15	82,100,000
72	Handy Talky (HT)	Buah	4	8,000,000
73	Lap Top	Buah	32	400,996,830
74	Buffet	Buah	4	1,279,000
75	Palu Sidang	Buah	1	11,000
76	Camera Conference	Buah	3	45,789,594
77	Sepeda Motor	Unit	7	93,874,000
78	Asbak Tinggi	Buah	5	3,750,000
79	Meja Resepsionis	Buah	8	40,784,000
80	Handy Cam	Buah	1	6,545,000
81	Telephone (PABX)	Buah	1	17,510,000
82	Meja Rapat	Buah	9	49,605,500
83	Kursi Besi/Metal	Buah	234	223,167,250
84	Wireless Access Point	Buah	13	11,654,500

85	Lemari Kayu	Buah	52	68,217,000
86	Tiang Bendera	Buah	2	20,000

b. Pengadilan Negeri Palangkaraya

Peralatan dan fasilitas perkantoran yang ada di Pengadilan Negeri Palangkaraya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Peralatan Dan Mesin		Sat	Saldo Per 31 Desember 2024	
No.	Uraian		Kuant	Nilai
1	2	3	4	5
1	Papan Visual/Papan Nama	Buah	13	25,357,216
2	Audio Mixing Portable	Buah	3	17,138,000
3	Loudspeaker	Buah	12	97,736,000
4	Meja Komputer	Buah	4	3,062,000
5	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	2,155,620
6	Mesin Absensi	Buah	3	17,100,000
7	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	1	188,000
8	Peralatan Permainan Lainnya	dum my	1	3,500,000
9	Server	Buah	4	195,457,171
10	CCTV - Camera Control Television System	Buah	17	36,270,000
11	Gantungan Jas	Buah	1	1,100,000
12	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	4	9,240,000
13	Camera Digital	Buah	1	9,076,814
14	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	8	96,312,000
15	Jam Elektronik	Buah	6	3,553,848
16	Internet	Buah	1	9,575,000
17	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	13	29,546,520
18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	23	88,211,882
19	Sedan	Unit	2	387,170,396
20	Alat Press Kertas	Buah	1	9,051,504
21	Network Monitoring System	Buah	1	3,026,100
22	Netware Interface External	Buah	6	1,800,000
23	Mesin Antrian	Buah	2	44,500,000
24	Perkakas Kantor Lainnya	dum my	4	5,364,616
25	Peralatan Jaringan Lainnya	dum my	5	65,810,000
26	Station Wagon	Unit	1	69,000,000
27	Audio Mixing Console	Buah	1	16,483,500
28	Lemari Besi/Metal	Buah	10	24,418,564
29	Lap Top	Buah	24	321,783,756
30	Sice	Buah	17	136,175,364
31	Televisi	Buah	8	81,599,000
32	Buffet	Buah	3	19,813,764
33	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	10,461,000
34	Digital LED Running Text	Buah	1	10,000,000
35	P.C Unit	Buah	70	930,468,092

**BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA
DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

36	Monitor	Buah	4	23,471,700
37	Sepeda Motor	Unit	4	64,450,000
38	Hard Disk	Buah	2	8,500,000
39	Meja Rapat	Buah	6	7,680,000
40	Speaker Komputer	Buah	6	2,760,000
41	Mic Conference	Buah	8	10,560,000
42	Meja Resepsionis	Buah	2	29,368,000
43	Mesin Barcode	Buah	1	1,500,000
44	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	165,000,000
45	Treng Air/Tandon Air	Buah	1	96,000,000
46	Palu Sidang	Buah	4	2,863,142
47	Asbak Tinggi	Buah	6	2,640,000
48	Telephone (PABX)	Buah	20	25,000,000
49	Camera Conference	Buah	3	116,706,900
50	Tablet PC	Buah	1	3,976,925
51	Teralis	Buah	1	124,800,000
52	A.C. Split	Buah	67	384,825,349
53	Kursi Besi/Metal	Buah	177	264,835,584
54	Charger	Buah	1	2,000,000
55	Tiang Bendera	Buah	8	4,181,528
56	Lemari Kayu	Buah	73	168,462,376
57	Alat Pemadam Kebakaran	Buah	2	1,600,000
58	Alat Pemotong Kertas	Buah	3	1,776,924
59	Hub	Buah	2	1,622,000
60	Bangku Panjang Kayu	Buah	16	22,880,000
61	TV Monitor	Buah	1	1,800,000
62	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	72	89,192,263
63	Alat Studio Lainnya	dum my	1	5,000,000
64	Tameng	Buah	5	6,750,000
65	Kursi Kayu	Buah	71	130,589,618
66	Router	Buah	1	3,159,300
67	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	3,740,781
68	Lambang Instansi	Buah	2	8,779,820
69	Rak Server	Buah	1	6,600,000
70	Brandkas	Buah	3	20,751,612
71	Dispenser	Buah	4	3,865,232
72	Filing Cabinet Besi	Buah	20	44,920,000
73	Kursi Dorong	Buah	1	1,300,000
74	Lambang Garuda Pancasila	Buah	5	3,238,224
75	Sound System	Buah	1	15,000,000
76	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	17,840,000
77	Buku Buta Warna	Buah	7	12,950,000
78	Video Monitor	Buah	1	49,395,000
79	Rak Besi	Buah	103	330,094,350
80	LCD Projector/Infocus	Buah	1	6,000,000
81	Facsimile	Buah	1	1,400,000
82	LCD Monitor	Buah	3	33,594,900
83	Gordyin/Kray	Buah	3	97,705,382
84	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	8	205,394,000

85	Meja Kerja Kayu	Buah	141	490,696,695
86	Genset	Buah	1	234,110,000

c. Pengadilan Negeri Sampit

Peralatan dan fasilitas perkantoran yang ada di Pengadilan Negeri Sampit dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Peralatan Dan Mesin		Sat	Saldo Per 31 Desember 2024	
No.	Uraian		Kuant	Nilai
1	2	3	4	5
1	CCTV - Camera Control Television System	Buah	2	49,750,000
2	Meja Komputer	Buah	1	615,000
3	Personal Komputer Lainnya	dum my	1	7,674,641
4	Alat Kesehatan Umum Lainnya	dum my	1	13,470,000
5	Meja Marmer	Buah	1	4,345,000
6	Mobile File	Buah	2	55,000,000
7	Loudspeaker	Buah	5	23,900,000
8	Personal Computer	Buah	6	51,810,000
9	Air Conditioning (AC)	Buah	5	28,000,000
10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	21	57,909,085
11	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	9	78,330,250
12	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	4	10,136,000
13	Microphone	Buah	11	12,100,000
14	Server	Buah	2	124,310,000
15	Note Book	Buah	11	154,782,737
16	Mesin Absensi	Buah	1	9,850,000
17	Sketsel	Buah	3	6,567,000
18	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	3	79,830,000
19	Gordyin/Kray	Buah	32	21,540,000
20	Genset	Buah	1	198,000,000
21	Komputer Unit Lainnya	dum my	8	98,378,250
22	Mesin Antrian	Buah	1	27,500,000
23	Peralatan Jaringan Lainnya	dum my	2	102,043,000
24	Kamera Digital	Buah	1	5,000,000
25	Sice	Buah	5	57,628,000
26	Lap Top	Buah	4	59,960,000
27	Station Wagon	Unit	2	281,464,117
28	Sofa	set	1	14,800,000
29	Televisi	Buah	9	47,931,000
30	P.C Unit	Buah	22	268,172,408
31	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	Buah	1	1,748,000
32	External/ Portable Hardisk	Buah	1	1,100,000

33	Meja Rapat	Buah	1	15,320,000
34	Camera Conference	Buah	1	56,100,000
35	Sepeda Motor	Unit	6	85,643,900
36	Meja Resepsionis	Buah	1	2,500,000
37	Speaker Komputer	Buah	1	391,364
38	Telephone (PABX)	Buah	1	9,900,000
39	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Buah	1	9,350,000
40	Oxygen Therapy Set	Buah	1	1,515,000
41	A.C. Split	Buah	14	62,119,000
42	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	1	3,500,000
43	Lemari Kayu	Buah	4	9,595,000
44	Kursi Besi/Metal	Buah	27	69,990,000
45	Timbangan Orang	Buah	1	23,000
46	Lambang Instansi	Buah	1	3,895,309
47	Rak Server	Buah	2	24,266,590
48	Kursi Kayu	Buah	41	143,433,000
49	Acces Point	Buah	1	880,000
50	Router	Buah	3	9,300,415
51	Audio Mixing Stationer	Buah	1	12,375,000
52	Sound System	Buah	2	53,830,000
53	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	17,840,000
54	Splitter	Buah	1	2,530,000
55	Meja Kerja Kayu	Buah	7	94,160,000

d. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Peralatan dan fasilitas perkantoran yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Peralatan Dan Mesin		Sat	Saldo Per 31 Desember 2024	
No.	Uraian		Kuant	Nilai
1	2	3	4	5
1	Meja Komputer	Buah	7	4,100,000
2	Kursi Roda	Unit	1	3,000,000
3	Kipas Angin	Buah	1	600,000
4	Mesin Pemotong Rumput	Buah	1	2,750,000
5	CCTV - Camera Control Television System	Buah	3	32,249,100
6	Loudspeaker	Buah	4	22,400,000
7	Server	Buah	3	139,060,000
8	Mesin Absensi	Buah	2	14,999,000
9	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	7	32,434,000
10	Microphone	Buah	11	13,750,000
11	Camera Digital	Buah	1	7,000,000
12	Alat Rumah Tangga Lainnya	dum my	3	3,798,000
13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	27	59,951,333
14	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	8	76,576,500

15	Papan Pengumuman	Buah	2	1,600,000
16	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Buah	2	9,000,000
17	P.C Unit	Buah	34	430,816,800
18	Televisi	Buah	9	63,123,400
19	Buffet	Buah	2	2,500,000
20	Lemari Besi/Metal	Buah	9	28,700,000
21	Sice	Buah	3	4,850,000
22	Switch	Buah	1	4,000,000
23	Digital LED Running Text	Buah	1	3,350,000
24	Lap Top	Buah	17	223,973,320
25	Karpet	Buah	6	10,998,000
26	Sepeda Motor	Unit	6	63,570,000
27	Meja Rapat	Buah	1	17,450,000
28	Handy Cam	Buah	1	6,000,000
29	Meja Resepsionis	Buah	2	16,100,000
30	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	3	262,514,828
31	Camera Conference	Buah	1	56,006,000
32	Telephone (PABX)	Buah	1	5,150,000
33	Tempat Tidur Besi	Buah	1	450,000
34	Lemari Kayu	Buah	11	26,414,000
35	Kursi Besi/Metal	Buah	66	91,400,000
36	Bangku Panjang Kayu	Buah	30	30,000,000
37	Wireless	Buah	1	3,000,000
38	A.C. Split	Buah	22	116,181,830
39	Brandkas	Buah	2	7,022,000
40	Kursi Kayu	Buah	32	24,020,000
41	Filing Cabinet Besi	Buah	7	12,300,000
42	Dispenser	Buah	2	1,225,000
43	Rak Server	Buah	3	15,466,590
44	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	3	118,165,000
45	Router	Buah	1	8,000,000
46	Audio Mixing Stationer	Buah	1	13,444,000
47	Lambang Instansi	Buah	1	4,174,500
48	Rak Besi	Buah	30	43,750,000
49	Amplifier	Buah	3	5,625,000
50	Genset	Buah	2	132,800,000
51	Tabung Pemadam Api	Buah	4	4,800,000
52	Meja Kerja Kayu	Buah	37	62,540,000
53	Gordyin/Kray	Buah	44	13,200,000
54	Facsimile	Buah	1	4,000,000

e. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Peralatan dan fasilitas perkantoran yang ada di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Peralatan Dan Mesin		Sat	Saldo Per 31 Desember 2024	
No.	Uraian		Kuant	Nilai
1	2	3	4	5
1	Loudspeaker	Buah	4	41,736,000
2	Mesin Absensi	Buah	1	10,000,000
3	Papan Visual/Papan Nama	Buah	12	5,340,000
4	Mesin Pemotong Rumput	Buah	1	1,250,000
5	Server	Buah	3	147,292,000
6	Kipas Angin	Buah	2	1,500,000
7	CCTV - Camera Control Television System	Buah	3	27,693,000
8	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	2,155,620
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	25	64,180,000
10	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	8	36,868,520
11	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	11	89,255,000
12	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	9	33,836,000
13	Internet	Buah	1	15,257,500
14	Finger Print Camera	Buah	1	6,023,000
15	Professional Sound System	Buah	1	5,500,000
16	Kamera Digital	Buah	1	19,161,000
17	Peralatan Komputer Lainnya	dum my	2	46,600,000
18	Lemari Besi/Metal	Buah	10	23,859,000
19	Station Wagon	Unit	1	157,000,003
20	Lap Top	Buah	18	260,310,000
21	Televisi	Buah	3	25,500,000
22	Sice	Buah	8	4,866,000
23	Microphone Table Stand	Buah	1	8,428,000
24	P.C Unit	Buah	36	469,254,910
25	Sofa	set	5	45,590,000
26	Monitor	Buah	1	1,540,000
27	Microphone/Wireless MIC	Buah	4	24,854,000
28	Audio Mixing Console	Buah	1	16,483,500
29	Palu Sidang	Buah	2	1,410,000
30	Sepeda Motor	Unit	2	32,485,000
31	Camera Conference	Buah	3	31,518,900
32	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	328,000,000
33	Meja Rapat	Buah	2	1,850,000
34	A.C. Split	Buah	37	369,661,000
35	Kursi Besi/Metal	Buah	105	171,826,000
36	Lemari Kayu	Buah	26	38,735,000
37	Bangku Panjang Kayu	Buah	26	12,155,000
38	Rak Kayu	Buah	11	2,618,000
39	Hub	Buah	1	2,870,500
40	Tiang Bendera	Buah	6	4,824,000
41	Local Area Network (LAN)	Buah	1	10,862,000
42	Filing Cabinet Besi	Buah	20	30,674,900
43	Kursi Kayu	Buah	60	119,336,000

44	Sound System	Buah	3	33,705,500
45	Rak Server	Buah	2	19,866,590
46	Brandkas	Buah	3	10,094,000
47	Lambang Instansi	Buah	1	3,895,309
48	Router	Buah	1	7,150,000
49	Lambang Garuda Pancasila	Buah	4	3,730,000
50	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	17,840,000
51	Genset	Buah	1	96,000,000
52	LCD Monitor	Buah	4	22,644,900
53	Rak Besi	Buah	28	25,552,000
54	Meja Kerja Kayu	Buah	72	153,545,900
55	Facsimile	Buah	1	2,273,000
56	Tabung Pemadam Api	Buah	6	9,010,000
57	LCD Projector/Infocus	Buah	1	10,000,000

f. Pengadilan Negeri Muara Teweh

Peralatan dan fasilitas perkantoran yang ada di Pengadilan Negeri Muara Teweh dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Peralatan Dan Mesin		Sat	Saldo Per 31 Desember 2024	
No.	Uraian		Kuant	Nilai
1	2	3	4	5
1	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Buah	1	4,294,000
2	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	Buah	1	2,342,000
3	Lemari Besi/Metal	Buah	7	2,507,000
4	Lemari Kayu	Buah	28	75,573,960
5	Rak Besi	Buah	5	3,860,000
6	Rak Kayu	Buah	22	23,375,000
7	Filing Cabinet Besi	Buah	2	1,364,000
8	Brandkas	Buah	2	14,024,000
9	Buffet	Buah	1	275,000
10	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	4,790,000
11	Papan Visual/Papan Nama	Buah	5	60,000
12	Peta	Buah	1	20,000
13	Mesin Absensi	Buah	2	14,769,091
14	Meja Kerja Kayu	Buah	105	142,238,564
15	Kursi Besi/Metal	Buah	114	129,291,692
16	Kursi Kayu	Buah	12	22,268,295
17	Sice	Buah	43	153,148,607
18	Bangku Panjang Kayu	Buah	18	2,681,000
19	Meja Resepsionis	Buah	2	15,571,450
20	Jam Mekanis	Buah	3	119,000
21	Mesin Pemotong Rumput	Buah	1	2,123,000
22	A.C. Split	Buah	14	90,640,000
23	Kipas Angin	Buah	5	271,000
24	Televisi	Buah	1	19,933,538

25	Loudspeaker	Buah	4	41,736,000
26	Unit Power Supply	Buah	23	42,742,078
27	Tiang Bendera	Buah	5	109,000
28	Palu Sidang	Buah	2	30,000
29	Lambang Instansi	Buah	1	3,895,309
30	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	2,155,620
31	Audio Mixing Console	Buah	1	16,483,500
32	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	6	12,850,520
33	LCD Monitor	Buah	1	10,644,900
34	Camera Conference	Buah	1	25,518,900
35	Facsimile	Buah	1	1,442,000
36	Genset	Buah	2	389,750,000
37	Kursi Zeis	Buah	18	27,024,723
38	Background	Buah	1	14,496,020
39	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	2	116,515,000
40	P.C Unit	Buah	37	490,844,316
41	Lap Top	Buah	19	286,465,938
42	Monitor	Buah	1	1,456,000
43	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	12	37,970,156
44	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	37,823,466
45	Server	Buah	2	120,710,000
46	Router	Buah	1	9,220,000
47	Rak Server	Buah	1	9,866,590

g. Pengadilan Negeri Buntok

Peralatan dan fasilitas perkantoran yang ada di Pengadilan Negeri Buntok dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Peralatan Dan Mesin		Sat	Saldo Per 31 Desember 2024	
No.	Uraian		Kuant	Nilai
1	2	3	4	5
1	Meja Komputer	Buah	14	8,870,000
2	Papan Visual/Papan Nama	Buah	18	6,534,000
3	Mesin Absensi	Buah	1	10,000,000
4	CCTV - Camera Control Television System	Buah	3	29,490,000
5	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	2,155,620
6	Loudspeaker	Buah	7	46,986,000
7	Kipas Angin	Buah	16	5,766,000
8	Electric Generating Set Lainnya	dum my	1	241,980,000
9	Server	Buah	2	123,935,567
10	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	6	17,170,520
11	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	37,487,300
12	Partisi	Buah	3	3,840,000
13	Air Conditioning (AC)	Buah	4	16,900,000
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	19	52,350,400
15	Camera Digital	Buah	1	6,355,000

**BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA
DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

16	Peta	Buah	1	30,000
17	Alat Kantor Lainnya	dum my	1	750,000
18	Kamera/Video dengan tempatnya U/ Bawah Air (Sea & Sea)	Buah	1	3,000,000
19	Papan Pengumuman	Buah	1	2,750,000
20	Peralatan Komputer Lainnya	dum my	7	18,754,850
21	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	1,815,000
22	Sedan	Unit	1	267,025,000
23	Refrigerator	Buah	1	1,750,000
24	Celling Mount Bracket	Buah	1	339,500
25	Televisi	Buah	4	26,880,000
26	Audio Mixing Console	Buah	1	16,483,500
27	Digital LED Running Text	Buah	1	5,352,000
28	P.C Unit	Buah	43	565,017,360
29	Handy Talky (HT)	Buah	1	1,880,000
30	Alat Tenis Meja	Buah	1	4,308,000
31	Station Wagon	Unit	1	162,314,828
32	White Board	Buah	7	290,000
33	Lemari Besi/Metal	Buah	1	25,000,000
34	Lap Top	Buah	18	275,539,320
35	Sice	Buah	17	88,069,000
36	Camera Conference	Buah	1	25,518,900
37	Sepeda Motor	Unit	3	34,850,000
38	Meja Rapat	Buah	6	9,449,000
39	Handy Cam	Buah	1	3,122,000
40	Meja Resepsionis	Buah	4	25,034,000
41	Meubelair Lainnya	dum my	2	3,740,000
42	Meja Telepon	Buah	3	1,800,000
43	Wireless	Buah	1	11,950,000
44	Lemari Kayu	Buah	53	104,093,000
45	A.C. Split	Buah	30	172,450,000
46	Bangku Panjang Kayu	Buah	23	25,817,000
47	Kursi Besi/Metal	Buah	75	89,436,000
48	Video Conference	Buah	1	16,725,000
49	Diaso Printer, 404	Buah	2	9,400,000
50	Rak Server	Buah	1	9,866,590
51	Mainframe (Komputer Jaringan)	Buah	1	50,000,000
52	Router	Buah	1	10,000,000
53	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	17,840,000
53	Kursi Kayu	Buah	31	102,703,000
55	Intercom Unit	Buah	2	25,018,000
56	Lambang Instansi	Buah	1	3,895,309
57	Brandkas	Buah	3	5,788,000
58	Lambang Garuda Pancasila	Buah	7	566,000
59	Filing Cabinet Besi	Buah	11	18,881,000
60	Sound System	Buah	2	24,950,000
61	Jeep	Unit	2	568,844,121
62	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	4	21,359,000
63	Facsimile	Buah	1	200,000

64	Rak Besi	Buah	16	14,245,000
65	LCD Projector/Infocus	Buah	1	7,623,000
66	Tabung Pemadam Api	Buah	10	13,380,000
67	Hand Metal Detector	Buah	1	500,000
68	LCD Monitor	Buah	5	30,644,900
69	Meja Kerja Kayu	Buah	97	124,148,000

h. Pengadilan Negeri Tamiang Layang

Peralatan dan fasilitas perkantoran yang ada di Pengadilan Negeri Tamiang Layang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Peralatan Dan Mesin		Sat	Saldo Per 31 Desember 2024	
No.	Uraian		Kuant	Nilai
1	2	3	4	5
1	Papan Visual/Papan Nama	Buah	12	8,400,000
2	Loudspeaker	Buah	4	41,736,000
3	Kipas Angin	Buah	2	3,940,000
4	Desicator (Size) 4	Buah	2	13,640,000
5	Server	Buah	2	124,310,000
6	Meja Komputer	Buah	12	8,850,000
7	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	4,790,000
8	Mesin Absensi	Buah	2	20,000,000
9	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	2,155,620
10	Rak Besi	Buah	14	29,450,000
11	Gordyin/Kray	Buah	1	70,000,000
12	Facsimile	Buah	1	1,980,000
13	Meja Kerja Kayu	Buah	86	148,566,000
14	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dum my	5	4,500,000
15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	12	28,188,370
16	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	5	11,170,520
17	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	29,850,000
18	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	22	42,500,000
19	Air Conditioning (AC)	Buah	10	51,950,000
20	Meja Ketik	Buah	2	2,400,000
21	Komputer Unit Lainnya	dum my	15	136,069,000
22	Peralatan Komputer Lainnya	dum my	5	44,757,000
23	Peralatan Jaringan Lainnya	dum my	7	11,760,000
24	Kamera Digital	Buah	1	3,200,000
25	Televisi	Buah	1	4,940,000
26	Lap Top	Buah	20	282,309,300
27	Lemari Besi/Metal	Buah	27	79,531,095
28	Monitor	Buah	1	1,940,000
29	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Buah	3	7,380,000

30	P.C Unit	Buah	31	419,800,910
31	Sice	Buah	7	62,250,000
32	Audio Mixing Console	Buah	1	16,483,500
33	Meja Resepsionis	Buah	1	1,500,000
34	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	2	466,400,000
35	Meja Rapat	Buah	1	7,999,000
36	Camera Conference	Buah	1	25,518,900
37	Sepeda Motor	Unit	2	37,228,000
38	Lemari Kayu	Buah	30	39,395,000
39	Kursi Besi/Metal	Buah	98	107,720,724
40	TV Monitor	Buah	2	34,500,000
41	Wireless Access Point	Buah	4	12,400,000
42	Rak Kayu	Buah	6	6,400,000
43	A.C. Split	Buah	7	35,000,000
44	Local Area Network (LAN)	Buah	2	22,630,000
45	Bangku Panjang Kayu	Buah	20	10,500,000
46	Hub	Buah	1	8,470,000
47	Brandkas	Buah	3	26,272,200
48	Lambang Instansi	Buah	2	8,650,328
49	Filing Cabinet Besi	Buah	18	36,720,000
50	Kursi Kayu	Buah	13	12,100,000
51	Rak Server	Buah	1	9,866,590
52	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	17,840,000
53	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	17	44,710,000
54	Router	Buah	2	12,000,000
55	LCD Monitor	Buah	1	10,644,900
56	PC Workstation	Buah	1	13,500,000
57	Sketsel	Buah	7	106,600,000
58	Genset	Buah	1	100,000,000

i. Pengadilan Negeri Kasongan

Peralatan dan fasilitas perkantoran yang ada di Pengadilan Negeri Kasongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Peralatan Dan Mesin		Sat	Saldo Per 31 Desember 2024	
No.	Uraian		Kuant	Nilai
1	2	3	4	5
1	Loudspeaker	Buah	4	41,736,000
2	Papan Visual/Papan Nama	Buah	2	6,600,000
3	Note Book	Buah	0	0
4	Server	Buah	2	124,130,000
5	Meja Komputer	Buah	9	7,200,000
6	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	2,155,620
7	Lemari Es	Buah	2	5,600,000
8	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	4,645,000
9	Layar Proyektor	Buah	2	3,950,000
10	Mesin Absensi	Buah	1	5,500,000

**BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA
DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

11	Air Conditioning (AC)	Buah	8	53,600,000
12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	22	43,140,000
13	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	1	1,034,520
14	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	29,750,000
15	Closed Circuit Television (CCTV)	Buah	2	39,105,000
16	Papan Pengumuman	Buah	1	1,100,000
17	Digital LED Running Text	Buah	1	3,500,000
18	Sice	Buah	7	61,042,760
19	Televisi	Buah	2	10,450,000
20	Serial Scanner/Printer	Buah	2	10,000,000
21	P.C Unit	Buah	26	363,380,910
22	Lap Top	Buah	19	253,086,320
23	Audio Mixing Console	Buah	1	16,483,500
24	Sepeda Motor	Unit	2	26,355,100
25	Meja Resepsionis	Buah	2	28,200,000
26	Meja Rapat	Buah	11	24,200,000
27	Palu Sidang	Buah	2	1,485,000
28	Speaker Komputer	Buah	7	4,570,000
29	External/ Portable Hardisk	Buah	2	3,190,000
30	Meubelair Lainnya	dum my	12	10,560,000
31	Camera Conference	Buah	1	25,518,900
32	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	3	1,096,590,0 00
33	Video Conference	Buah	1	1,370,000
34	Lemari Kayu	Buah	28	57,719,090
35	Rak Kayu	Buah	1	2,700,000
36	Kursi Besi/Metal	Buah	80	115,111,260
37	Bangku Panjang Kayu	Buah	16	17,850,000
38	Tiang Bendera	Buah	2	1,092,000
39	A.C. Split	Buah	17	148,752,000
40	Local Area Network (LAN)	Buah	1	15,895,000
41	Unit Power Supply	Buah	6	6,600,000
42	Kursi Kayu	Buah	24	50,613,750
43	Brandkas	Buah	2	49,940,000
44	Rak Server	Buah	2	18,666,590
45	Sound System	Buah	1	14,960,000
46	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	17,840,000
47	Lambang Instansi	Buah	1	4,174,500
48	Router	Buah	1	9,130,000
49	Genset	Buah	1	242,830,000
50	Gordyin/Kray	Buah	1	49,500,000
51	Meja Kerja Kayu	Buah	76	222,473,750
52	Rak Besi	Buah	5	7,920,000
53	LCD Projector/Infocus	Buah	2	10,850,000
54	LCD Monitor	Buah	1	10,644,900

j. Pengadilan Negeri Kuala Kurun

Peralatan dan fasilitas perkantoran yang ada di Pengadilan Negeri Kuala Kurun dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Peralatan Dan Mesin		Sat	Saldo Per 31 Desember 2024	
No.	Uraian		Kuant	Nilai
1	2	3	4	5
1	Rak Besi	Buah	5	10,750,000
2	CCTV - Camera Control Television System	Buah	8	46,123,000
3	Mesin Absensi	Buah	1	2,750,000
4	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	79,136,997
5	Kursi Roda	Unit	1	1,100,000
6	Tripot Background	Buah	2	3,200,000
7	Mixer Sound Sistem	unit	1	2,670,000
8	Loudspeaker	Buah	6	44,476,000
9	Server	Buah	2	122,890,000
10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	16	51,957,860
11	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	49,855,000
12	Alat Kantor Lainnya	dum my	1	10,260,000
13	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	6	23,470,520
14	Camera Digital	Buah	1	6,395,000
15	Partisi	Buah	3	23,700,000
16	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	2,155,620
17	Layar Proyektor	Buah	2	12,300,000
18	LCD Monitor	Buah	1	10,644,900
19	Meja Kerja Kayu	Buah	72	346,960,517
20	Rak Server	Buah	1	9,866,590
21	Brandkas	Buah	1	11,875,000
22	Peralatan Jaringan Lainnya	dum my	3	9,963,600
23	Perkakas Kantor Lainnya	dum my	4	111,850,525
24	Kursi Zeis	Buah	71	145,112,500
25	Monitor	Buah	1	4,788,000
26	Televisi	Buah	4	27,716,040
27	Sice	Buah	6	69,948,000
28	Lap Top	Buah	19	275,648,000
29	Switch	Buah	1	5,232,600
30	P.C Unit	Buah	35	464,899,650
31	Audio Mixing Console	Buah	1	16,483,500
32	Station Wagon	Unit	1	257,680,000
33	Pompa Air	Unit	2	11,413,645
34	External/ Portable Hardisk	Buah	2	2,698,000
35	Meja Rapat	Buah	3	30,875,000
36	Camera Conference	Buah	1	25,518,900
37	Sepeda Motor	Unit	2	42,320,000
38	Kursi Besi/Metal	Buah	31	67,600,000

39	Vertikal Blind	Buah	36	116,138,150
40	A.C. Split	Buah	26	129,467,000
41	Lemari Kayu	Buah	29	228,697,958
42	Stationary Generating Set	Unit	1	437,195,813
43	DC / AC Standard	Buah	3	104,430,000
44	Tiang Bendera	Buah	1	74,126,836
45	Kursi Kayu	Buah	14	38,950,000
46	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	17,840,000
47	Sound System	Buah	1	5,225,000
48	Router	Buah	20	23,980,000

k. Pengadilan Negeri Nanga Bulik

Peralatan dan fasilitas perkantoran yang ada di Pengadilan Negeri Nanga Bulik dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Peralatan Dan Mesin		Sat	Saldo Per 31 Desember 2024	
No.	Uraian		Kuant	Nilai
1	2	3	4	5
1	LCD Projector/Infocus	Buah	2	27,400,000
2	Loudspeaker	Buah	4	41,736,000
3	Server	Buah	2	122,890,000
4	Camera Film	Buah	1	27,000,000
5	Mesin Absensi	Buah	2	10,250,000
6	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	34,006,500
7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	11	33,382,140
8	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	18	95,804,100
9	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	5	11,170,520
10	Drone	Buah	1	23,000,000
11	Network Attach Storage (NAS)	unit	1	17,400,000
12	P.C Unit	Buah	21	300,280,910
13	Audio Mixing Console	Buah	1	16,483,500
14	Meja Makan Kayu	Buah	5	16,500,000
15	Televisi	Buah	1	10,950,000
16	Lap Top	Buah	16	229,156,500
17	Sofa	set	2	39,772,410
18	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	4,800,000
19	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	2,155,620
20	Genset	Buah	0	0
21	Sepeda Motor	Unit	2	49,990,700
22	Camera Conference	Buah	1	25,518,900
23	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	3,400,000
24	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	3	1,036,300,000
25	A.C. Split	Buah	6	36,432,000
26	Meja Ruang Tamu	Buah	2	7,007,430
27	Kursi Besi/Metal	Buah	67	201,480,120
28	Hub	Buah	1	4,400,000

29	Wireless Access Point	Buah	1	3,400,000
30	Lemari Kayu	Buah	2	11,385,000
31	Stationary Generating Set	Unit	1	580,000,000
32	Sound System	Buah	1	9,080,000
33	Router	Buah	2	16,900,000
34	Rak Server	Buah	1	9,866,590
35	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	17,840,000
36	LCD Monitor	Buah	2	17,244,900
37	Meja Kerja Kayu	Buah	39	198,167,440

I. Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Peralatan dan fasilitas perkantoran yang ada di Pengadilan Negeri Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Peralatan Dan Mesin		Sat	Saldo Per 31 Desember 2024	
No.	Uraian		Kuant	Nilai
1	2	3	4	5
1	CCTV - Camera Control Television System	Buah	2	15,975,000
2	Loudspeaker	Buah	4	41,736,000
3	Personal Komputer Lainnya	dum my	2	32,518,400
4	Kabel UTP	Buah	1	2,650,000
5	Meja Marmer	Buah	2	6,000,000
6	Camera Film	Buah	1	15,114,000
7	Server	Buah	2	122,890,000
8	Mixer Sound Sistem	unit	3	16,665,000
9	Mesin Absensi	Buah	2	7,250,000
10	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	4,531,000
11	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	2,155,620
12	Kursi Roda	Unit	1	2,500,000
13	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	7	55,285,000
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	26	82,833,500
15	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	6	17,940,520
16	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	6	20,700,000
17	Mimbar/Podium	Buah	1	5,000,000
18	Drone	Buah	1	18,000,000
19	Papan Pengumuman	Buah	1	1,313,978
20	Peralatan Jaringan Lainnya	dum my	1	12,450,000
21	Filing Cabinet Kayu	Buah	1	5,483,101
22	P.C Unit	Buah	23	322,280,910
23	Sice	Buah	10	114,913,442
24	Buffet	Buah	1	3,200,000
25	Televisi	Buah	7	40,657,500
26	Peralatan Bantu Lainnya	dum my	1	2,000,000
27	Sofa	set	3	23,437,500
28	Meja Makan Kayu	Buah	1	4,550,197

**BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA
DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

29	Lemari Besi/Metal	Buah	4	14,800,000
30	Digital LED Running Text	Buah	1	5,027,000
31	Switch	Buah	1	8,250,000
32	Microphone/Wireless MIC	Buah	5	18,577,500
33	Lap Top	Buah	19	273,985,900
34	Audio Mixing Console	Buah	1	16,483,500
35	Monitor	Buah	1	6,430,000
36	Layar Film/Projector	Buah	2	11,000,000
37	Audio Amplifier	Buah	4	21,560,000
38	Camera Conference	Buah	11	40,934,300
39	Tempat Tidur Besi	Buah	1	6,506,400
40	Meja Resepsionis	Buah	3	11,343,270
41	Lemari Display	Buah	3	6,674,896
42	Locker	Buah	8	26,454,976
42	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	2,802,800
44	Sepeda Motor	Unit	2	40,444,010
45	Meja Rapat	Buah	19	133,561,853
46	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	2	579,830,000
47	Meja Ruang Tamu	Buah	3	10,000,000
48	A.C. Split	Buah	50	373,606,600
49	Vertikal Blind	Buah	33	57,054,000
50	Kursi Besi/Metal	Buah	209	355,381,907
51	Lemari Kayu	Buah	46	143,384,900
52	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	dum my	3	9,611,800
52	Camera Video	Buah	1	9,400,000
54	Hub	Buah	1	8,640,000
55	Wireless Access Point	Buah	20	58,740,000
56	Tiang Bendera	Buah	8	8,000,000
57	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	5	10,010,000
58	Rak Server	Buah	2	21,473,790
59	Brandkas	Buah	1	11,757,900
60	Filing Cabinet Besi	Buah	20	31,716,320
61	Kursi Kayu	Buah	25	71,914,350
62	Meja Makan Besi	Buah	2	3,924,184
62	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	17,840,000
63	Router	Buah	1	5,700,000
64	Alat Pembersih Lainnya	dum my	2	7,607,600
65	LCD Monitor	Buah	1	10,644,900
66	Sketsel	Buah	3	9,009,000
67	Genset	Buah	1	388,500,000
68	Rak Besi	Buah	32	58,210,976
69	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	1	1,617,000
70	Termometer Standar	Buah	2	5,005,000

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam Rangka mewujudkan Badan Peradilan yang Agung dan *Modern* serta mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menempatkan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta organisasi *modern* berbasis TI terpadu. Kebijakan yang diambil salah satunya adalah pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisi, *operator* maupun *user* dalam implementasi dari masing-masing aplikasi dilakukan secara rutin. Berikut uraian mengenai Implementasi Pengelolaan TI yang ada di Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri dibawahnya.

1. Perangkat pendukung server:

No	Satuan Kerja	Jumlah Server	Model/Type Server	Fungsi Server	Kondisi
1	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	3	IBM 3250 MS Integrated Lenovo	BACKUP SINKORNISASI SIPP PN	Baik
			Fujitsu PRIMERGY TX 1330 M4	PTSP, MAKBIDA, SIMASDOK, ANTRIAN PTSP	Baik
			VPS	SAGITA, SIAP-PADUKA, SIDAT	Baik
2	Pengadilan Negeri Palangkaraya	3	Fujitsu Primergy TX1330 M4	SIPP, PTSP, MIS, Antrian Sidang	Baik
			Fujitsu Primergy RX1330 M1	Server Cadangan	Baik
			System x3530 M4 4	Server Cadangan	Baik
3	Pengadilan Negeri Sampit	2	Fujitsu PRIMERGY RX1330 M1	Aplikasi PTSP Plus, Aplikasi Antrian PTSP	Baik
			Fujitsu TX 1330 M4	MIS, SIPP, Aplikasi	Baik

				Panggilan Sidang,	
4	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	2	Fujitsu TX 1330 M4	SIPP, PTSP, MIS dan Aplikasi Inovasi (SIMPAN)	Baik
			Fujitsu RX 1330 M1	Backup, Aplikasi Sharing	Baik
5	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	2	Fujitsu RX 1330 M1	SIPP, MIS, PTSP, e-ATK	Baik
			Fujitsu TX 1330 M4	Backup Data	Baik
6	Pengadilan Negeri Muara Teweh	2	Fujitsu Primergy RX1330 M1	Backup Data dan Backup Aplikasi	Baik
			Fujitsu Primergy TX1330 M4	Aplikasi SIPP, MIS, PTSP+, e-Library	Baik
7	Pengadilan Negeri Buntok	2	Fujitsu RX 1330 M1	SIPP, PTSP, MIS, TUSSUK	Baik
			Fujitsu TX 1330 M4	Tidak Digunakan	Baik
8	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	2	Fujitsu RX 1330 M1	SIPP, PTSP, MIS, Aplikasi Inovasi	Baik
			Fujitsu TX 1330 M4	Backup Data	Baik
9	Pengadilan Negeri Kasongan	2	Fujitsu RX 100 S7p	SIPP dan MIS	Baik
			Fujitsu TX 1330 M4	PTSP dan Folder Sharing (Bank Data)	Baik
10	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	2	Fujitsu Primergy RX1330 M2	SIPP, MIS, PTSP, SIMATA, e-ATK, Audio Gratifikasi, Slide IKM & IPK	Baik
			Fujitsu TX 1330 M4	Tidak digunakan	Baik
11	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	2	Fujitsu RX 1330 M2	SIPP, PTSP, MIS,	Baik

				Aplikasi Inovasi	
			Fujitsu RX 1330 M4	Server Backup dan Sinkronisasi, Server Mirroring SIPP, Server File Sharing	Baik namun perlu penggantian HDD
12	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	2	Fujitsu RX 1330 M2	SIPP, PTSP, MIS, Aplikasi Inovasi	Baik
			Fujitsu RX 1330 M4	Backup SIPP, Backup PTSP, Backup MIS, Server Sinkronisasi, Server NAS	Baik

2. Perangkat pendukung jaringan internet:

No	Satuan Kerja	Nama Penyedia Internet	Bandwidth Internet	Jumlah Mikrotik/Router	Jumlah Akses Point	Keterangan
1	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	PT. Indonesia Comnets Plus	100 Mbps (Dedicated)	1	20	Cukup Memadai
2	Pengadilan Negeri Palangkaraya	PT. Indonesia Comnets Plus	120 Mbps 1:1 (Dedicated)	1	16	Cukup Memadai
3	Pengadilan Negeri Sampit	VokasiNET	150 Mbps 1:1	1	13	Cukup Memadai
4	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	PT. Indonesia Comnets Plus	70 Mbps 1:1 Dedicated	1	7	Cukup Memadai
5	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	PT. Indonesia Comnets Plus	70 Mbps 1:1 (Dedicated)	1	5	Kurang Memadai
6	Pengadilan Negeri	Astinet TELKOM	50 Mbps 1:4 (Dedicated)	1	1	Cukup Memadai

	Muara Teweh					
7	Pengadilan Negeri Buntok	Astinet TELKOM	55 Mbps 1:1 (Dedicated)	1	20	Cukup Memadai
8	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	Astinet TELKOM	60 Mbps 1:1 + 60 Mbps Indihome Up To	1	5	Cukup Memadai
9	Pengadilan Negeri Kasongan	PT. Indonesia Comnets Plus	100 Mbps 1:1 (Dedicated)	1	17	Cukup Memadai
10	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	Lintasarta	50 Mbps 1:4	1	14	Kurang Memadai
11	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	PT. Indonesia Comnets Plus	70 Mbps 1:1 (Dedicated)	1	16	Cukup Memadai
12	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Fibernet	100 Mbps 1:4	1	16	Cukup Memadai

3. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pengadilan yang transparan dan akuntabel, begitu pentingnya keterbukaan (transparansi) dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, maka diciptakanlah sebuah sistem baru yang diberi nama SIPP. SIPP adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah.

SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk melakukan update informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah, karena melalui SIPP mulai dari pendaftaran, perjalanan perkara dan biaya perkara semua bisa ditelusuri oleh masyarakat kapanpun dimanapun.

No	Satuan Kerja	Versi SIPP Lokal	Versi SIPP Web	Alamat SIPP Web
1	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	-	-	sipp-banding.mahkamahagung.go.id
2	Pengadilan Negeri Palangkaraya	5.6.4	5.2.0	sipp.pn-palangkaraya.go.id
3	Pengadilan Negeri Sampit	5.6.4	5.2.0	sipp.pn-sampit.go.id
4	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	5.6.4	5.2.0	sipp.pn-pangkalanbun.go.id
5	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	5.6.4	5.2.0	sipp.pn-kualakapuas.go.id
6	Pengadilan Negeri Muara Teweh	5.6.4	5.2.0	sipp.pn-muarateweh.go.id
7	Pengadilan Negeri Buntok	5.6.4	5.2.0	sipp.pn-buntok.go.id
8	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	5.6.4	5.2.0	sipp.pn-tamianglayang.go.id
9	Pengadilan Negeri Kasongan	5.6.4	5.2.0	sipp.pn-kasongan.go.id
10	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	5.6.4	5.2.0	sipp.pn-kualakurun.go.id
11	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	5.6.4	5.2.0	sipp.pn-nangabulik.go.id
12	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	5.6.4	5.2.0	sipp.pn-pulangpisau.go.id

NO	SATUAN KERJA	TANGGAL SINKRONISASI TERAKHIR	VERSI SIPP
1	Pengadilan Negeri Palangkaraya	2024-12-19 18:20:52	5.6.4
2	Pengadilan Negeri Sampit	2024-12-05 18:51:50	5.6.4
3	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	2024-12-19 15:08:18	5.6.4
4	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	2024-12-05 17:11:41	5.6.4
5	Pengadilan Negeri Muara Teweh	2024-12-27 08:44:24	5.6.4
6	Pengadilan Negeri Buntok	2024-12-13 17:12:43	5.6.4
7	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	2024-12-24 13:32:08	5.6.4
8	Pengadilan Negeri Kasongan	2024-12-05 14:56:51	5.6.4
9	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	2024-12-24 10:53:33	5.6.4
10	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	2024-12-24 12:04:10	5.6.4
11	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	2024-12-26 06:42:40	5.6.4

Bahwa dari 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di Kalimantan Tengah telah terpasang SIPP versi 5.6.4., dan implementasi SIPP oleh Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Tengah, dapat dipantau dan diadaptasi oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya melalui aplikasi yang disebut dengan Monitoring Implementasi SIPP (MIS) Sedangkan statistik dan keadaan penanganan perkara di Pengadilan Tinggi Palangkaraya adalah sebagai berikut:

Kategori	Rasio Penanganan Perkara	1	2	3	4	5					
Perdata	98%	Belum Proses Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025	93	Sisa Perkara Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025	6	Masuk Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2024	90	Putus Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2024	94	Sisa Akhir Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2024	2
Pidana Biasa	98%	Belum Proses Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025	298	Sisa Perkara Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025	5	Masuk Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2024	260	Putus Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2024	261	Sisa Akhir Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2024	4
Pidana Tipikor	100%	Belum Proses Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025	16	Sisa Perkara Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025	-	Masuk Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2024	16	Putus Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2024	16	Sisa Akhir Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2024	-
Pidana Khusus Anak	100%	Belum Proses Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025	7	Sisa Perkara Sampai Dengan Tanggal 01.01.2025	-	Masuk Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2024	7	Putus Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2024	7	Sisa Akhir Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2024	-

4. Website Pengadilan

Salah satu pemanfaatan Teknologi informasi adalah diwajibkannya setiap Pengadilan mempunyai website termasuk Pengadilan Tinggi Palangkaraya sendiri. Dalam era digitalisasi sekarang ini website mempunyai peran sangat penting, Adanya website menciptakan transparansi terhadap segala kegiatan yang ada di badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, khususnya Peradilan Umum. Melalui website, keterbukaan informasi dan pelayanan publik akan mudah diakses oleh masyarakat pengguna pengadilan.

Website Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

a. Pengadilan Tinggi Palangkaraya



b. Pengadilan Negeri Palangkaraya



c. Pengadilan Negeri Sampit



d. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



e. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas



f. Pengadilan Negeri Muara Teweh



g. Pengadilan Negeri Buntok



h. Pengadilan Negeri Tamiang Layang



i. Pengadilan Negeri Kasongan



j. Pengadilan Negeri Kuala Kurun



k. Pengadilan Negeri Nanga Bulik



I. Pengadilan Negeri Pulang Pisau



5. Implementasi Sertifikat Elektronik

No	Satuan Kerja	Jumlah yang sudah memiliki Sertifikat Elektronik (TTE)
1	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	8
2	Pengadilan Negeri Palangkaraya	4
3	Pengadilan Negeri Sampit	8
4	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	4
5	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	6
6	Pengadilan Negeri Muara Teweh	3
7	Pengadilan Negeri Buntok	10
8	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	9
9	Pengadilan Negeri Kasongan	9
10	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	5
11	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	10
12	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	8

6. Implementasi E-COURT (The Electronic Justice System)

Penerapan Layanan e-Court sudah aktif dan terimplementasi dengan baik pada 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di wilayah Kalimantan Tengah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Selama tahun 2024, Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah mengimplementasi E-Court dengan rincian sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Perkara Gugatan	Perkara Gugatan Sederhana	Perkara Bantahan	Permohonan
1	PN Palangkaraya	1257	116	13	510
2	PN Sampit	81	18	0	244
3	PN Pangkalan Bun	57	27	2	100
4	PN Kuala Kapuas	54	25	0	14
5	PN Muara Teweh	25	3	0	37
6	PN Buntok	21	8	0	37
7	PN Tamiang Layang	72	25	2	19
8	PN Kasongan	32	9	0	24
9	PN Kuala Kurun	50	2	0	15
10	PN Nanga Bulik	48	5	1	36
11	PN Pulang Pisau	36	8	0	21

Pada tanggal 19 Agustus 2020 Ketua Mahkamah Agung meresmikan aplikasi *e-court* tingkat banding. *E-court* pengadilan tingkat banding diterapkan pada upaya hukum banding atas putusan-putusan pengadilan tingkat pertama yang sejak awal diproses dengan menggunakan acara secara elektronik. Pada sistem baru ini, pernyataan upaya hukum serta segala proses administrasi permohonan banding termasuk pengiriman berkas perkara banding dilakukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* oleh pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tingkat banding. Pada Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menerima Perkara Banding melalui *E- Court* sebanyak **87** perkara.

7. E-BERPADU (Elektronik Berkas Pidana Terpadu)

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis TI, Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah meluncurkan Aplikasi E-Court yang kemudian pada tahun 2019 disempurnakan dengan e-Litigation dan upaya hukum banding secara elektronik. Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2023 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi E-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Aplikasi E-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Implementasi E-Berpadu di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya dapat dilihat di tabel berikut:

No	Satuan Kerja	Pelimpahan Berkas	Penggeledahan	Penyitaan	Perpanjangan Penahanan	Izin Besuk Tahanan	Izin Pinjam Pakai Barang Bukti	Diversi	Pembantaran
1	PN Palangkaraya	472	310	1270	398	-	9	5	1
2	PN Sampit	591	292	1119	296	47	0	4	0
3	PN Pangkalan Bun	422	98	560	137	134	5	1	0
4	PN Kuala Kapuas	247	73	30	46	265	1	0	0
5	PN Muara Teweh	163	49	307	97	1	3	0	1
6	PN Buntok	88	51	110	58	0	6	4	0
7	PN Tamiang Layang	108	37	169	47	102	1	0	0
8	PN Kasongan	142	69	176	36	0	0	1	0
9	PN Kuala Kurun	131	51	219	108	0	1	0	0
10	PN Nanga Bulik	86	43	122	29	2	7	1	0
11	PN Pulang Pisau	90	36	130	7	84	8	1	0

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

124 SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL
DAN TANGGUH (AMPUH)

127 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

134 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. SERTIFIKASI PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)

Program Akreditasi Penjaminan Mutu telah dilaksanakan di lingkungan peradilan umum sejak tahun 2014. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI menilai perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja pengadilan, sehingga diluncurkanlah program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh) Di Lingkungan Peradilan Umum.

Sasaran sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) tidak terlepas dari sasaran yang sudah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya manajemen pelayanan dukungan penyelesaian perkara peradilan umum.
2. Meningkatnya kompetensi dan integritas tenaga teknis peradilan umum.
3. Meningkatnya tertib administrasi perkara kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
4. Meningkatnya manajemen pelayanan di lingkungan peradilan umum.

Adapun ruang lingkup program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sesuai Maklumat Pelayanan dan Standar Layanan yang meliputi aspek :

1. Manajemen peradilan.
2. Administrasi perkara.
3. Administrasi persidangan.
4. Administrasi umum.
5. Pelayanan publik.
6. Pengelolaan Kas
7. Pengadaan barang dan jasa
8. Pengawasan
9. Penanganan Pengaduan

yang dilaksanakan oleh :

1. Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua)
2. Hakim/ Majelis Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Kepaniteraan Muda, yang terdiri dari:
 - a. Panitera Muda Perdata
 - b. Panitera Muda Pidana
 - c. Panitera Muda Hukum
 - d. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)
 - e. Panitera Muda Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)
 - f. Panitera Muda Niaga
 - g. Panitera Muda Perikanan
 - h. Panitera Muda Hak Asasi Manusia (HAM)
6. Panitera Pengganti
7. Jurusita
8. Seluruh jajaran kesekretariatan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menyelenggarakan proses asesmen yaitu Opening Meeting Asesmen AMPUH internal dan Closing Meeting Asesmen AMPUH internal pada tanggal 12 Agustus 2024. Sebelum dilaksanakannya asesmen oleh tim penilai dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2024. Setelah melalui tahap Opening Meeting Asesmen AMPUH dan Closing Meeting Asesmen AMPUH, dihasilkan Laporan Kerja Evaluasi yang menjadi dasar penilaian kinerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Sementara itu, asesmen terhadap Pengadilan Negeri sewilayah hukum telah dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang telah tersertifikasi sebagai asesor AMPUH.

Rapat Keputusan sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) yaitu rapat yang dilakukan oleh tim sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) untuk membahas dan mengambil keputusan atas hasil asesmen kinerja yang dilakukan oleh tim Asesor Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan tim Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang dilaksanakan pada 20 November 2024 secara daring.

Berdasarkan Salinan Putusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024 Tentang Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, Kelas IA, Kelas IB Dan Kelas II Tahun 2024. Adapun predikat sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul

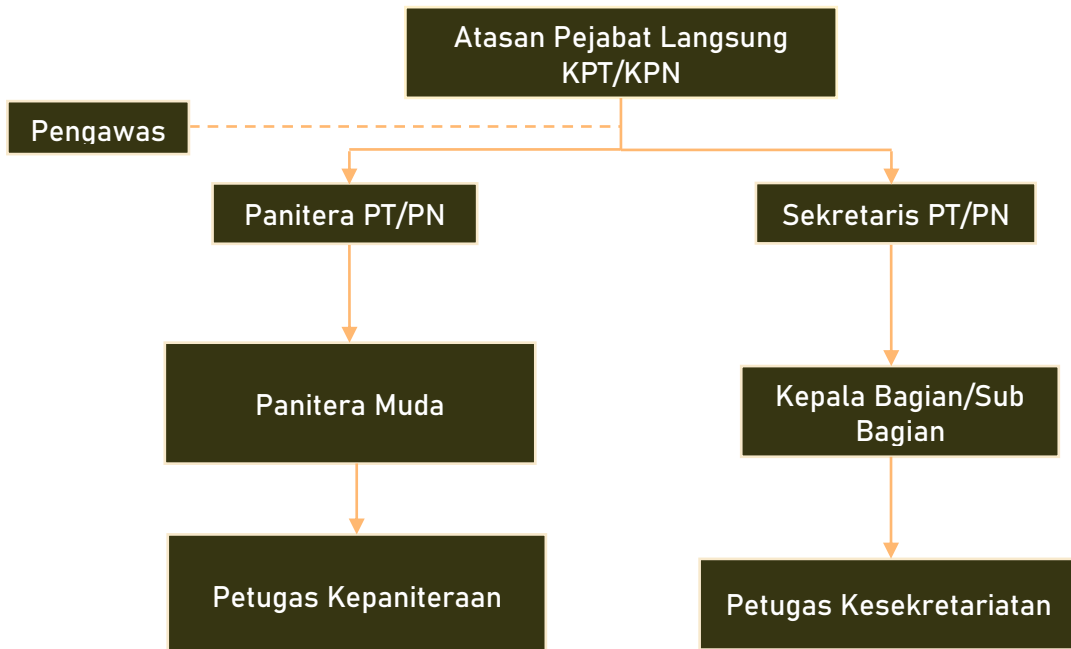
dan tangguh (AMPUH) yang diraih pada tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya adalah :

NO	NAMA PENGADILAN	Type/Kelas	Nilai AMPUH 2024	Predikat
1	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	B	887,77	Unggul
2	Pengadilan Negeri Palangkaraya	IA	804,5	Utama
3	Pengadilan Negeri Sampit	IB	787,96	Utama
4	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	IB	791,88	Utama
5	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	II	770,45	Utama
6	Pengadilan Negeri Muara Teweh	II	790,04	Utama
7	Pengadilan Negeri Buntok	II	803,47	Unggul
8	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	II	789,38	Utama
9	Pengadilan Negeri Kasongan	II	785,26	Utama
10	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	II	775,94	Utama
11	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	II	790,53	Utama
12	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	II	776,54	Utama

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah telah melaksanakan Sistem Satu Pintu yang dikenal dengan istilah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau *One Gate System*.

Berdasarkan kedua Surat Keputusan tersebut, struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah sebagai berikut:



1. Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Ketua Pengadilan Tinggi untuk PTSP pada Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri untuk PTSP pada Pengadilan Negeri.
2. Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Penanggungjawab pelaksanaan pada setiap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah masing-masing Panitera Muda dan seluruh Kepala Bagian/Sub Bagian pada Kesekretariatan.

4. Petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pegawai atau staf Kepaniteraan Muda Perdata/Pidana/Tipikor/PHI yang bertugas pada Meja I, staf Kepaniteraan Muda Hukum dan staf pada Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keterpaduan;
- b. Efektif, Efisien, Ekonomis;
- c. Koordinasi;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Aksesibilitas.

I. PTSP Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Meskipun tidak melayani masyarakat secara langsung, Pengadilan Tinggi Palangkaraya juga menyediakan meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Layanan PTSP Pengadilan Tinggi Palangkaraya, meliputi:

1. Bagian Kesekretariatan

Layanan ini menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri. Tata kelola persuratan juga telah dilakukan secara elektronik yang menggunakan aplikasi;

2. Bagian Kepaniteraan

a. Kepaniteraan Hukum:

▪ Pengaduan.

Untuk Pengaduan meskipun telah tersedia aplikasi pengaduan secara online, meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga melayani pengaduan secara langsung;

▪ E-Buku Tamu.

Setiap tamu yang datang ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya harus diregister secara manual dan elektronik, dengan persetujuan pimpinan Pengadilan;

▪ Pendaftaran Penyumpahan Advokat.

Bagi organisasi yang akan mendaftarkan anggotanya untuk disumpah sebagai advokat, selain telah disediakan aplikasi pendaftarannya, juga dilayani langsung di meja PTSP;

▪ Permohonan Informasi

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada Meja PTSP di Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi

memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi.

- Ijin Penelitian

Untuk mahasiswa atau akademisi yang akan melakukan penelitian di seluruh Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah. Untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan layanan ini, Pengadilan Tinggi Palangkaraya mempunyai Inovasi Pelayanan SIPRES, sehingga mahasiswa atau akademisi yang akan melakukan penelitian tidak harus datang ke kantor Pengadilan Tinggi Palangkaraya tapi cukup mengupload data yang dibutuhkan lewat aplikasi SIPRES.

- Meja E-Court.

Meja E-Court di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Palangkaraya melayani membantu advokat dalam rangka validasi sebagai pengguna terdaftar E-Court.

Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. Bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Prima terhadap kaum difabel/penyandang disabilitas yang berurusan di Pengadilan Tinggi Palangkaraya maka telah disediakan Layanan Prioritas bagi masyarakat pencari keadilan penyandang disabilitas.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menetapkan Duta Difabel yang bertugas memberikan pendampingan terhadap Kaum Difabel/Penyandang Disabilitas selama berada di gedung Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan membantu penyelesaian layanan yang dimohonkan baik Layanan PTSP maupun dalam proses persidangan.

Hal ini bertujuan guna meningkatkan performa pelayanan dan dalam rangka memberikan Pelayanan Prima bagi Kaum Difabel/Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, semakin menyempurnakan Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai Pengadilan yang Inklusif

Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Desember 2024 Nomor 1158/DJU/SK.KP3.4.4/XII/2024 tentang Penetapan Pemenang Penilaian Kinerja Bagi Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai Peringkat II (dua) Lomba Layanan Pengadilan/ PTSP Tahun 2024 Kategori Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB sebagai Peringkat Terbaik X (sepuluh) kategori kelas Pengadilan

Negeri Kelas IB dan Pengadilan Negeri Kelas II Lomba PTSP yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Prestasi ini sebagai bagian mempertahankan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang sebelumnya pada tahun 2020 , 2021, 2022, 2023, dan 2024 juga telah memperoleh Prestasi Juara Kedua Kategori Terbaik Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah berhasil mempertahankan Juara Kedua Kategori Terbaik Pengadilan Tinggi selama 4 (empat) 5 (lima) tahun berturut-turut dalam Lomba Bagi Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum. Dalam kategori Pengadilan Negeri Kelas IB, Pengadilan Negeri Sampit IB juga kembali meraih penghargaan yang sebelumnya pada tahun 2022 telah meraih peringkat II terbaik, Tahun 2024 telah meraih peringkat III terbaik.

II. PTSP Pengadilan Negeri.

Dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini seluruh layanan bagi masyarakat pengguna pengadilan cukup dilayani melalui satu pintu dalam rangka menghindari kontak langsung Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Peradilan dengan masyarakat pengguna pengadilan, sehingga dapat mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maupun perbuatan tercela lainnya yang bisa dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

Sebagian besar layanan yang disediakan di dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah dilakukan secara elektronik. Pelayanan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di semua Pengadilan Negeri pada prinsipnya dibagi menjadi dua bagian/bidang, yaitu:

1. Bidang Kesekretariatan, meliputi:

Bidang Kesekretariatan bertugas untuk menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri. Tata persuratan, baik tata kelola surat masuk dan surat keluar sudah menggunakan aplikasi elektronik, telah didokumentasikan/diinput secara elektronik, sehingga memudahkan dan mempercepat dalam pendistribuan surat.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU+
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Halaman Utama Register Surat Penyataan & Penggeledahan Surat Keterangan Buku Tamu

Anreni Lambung, S.E
Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

SELAMAT DATANG Anreni Lambung, S.E LOGIN SEBAGAI STAF SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

SURAT MASUK TAHUN 2020: 251
SURAT KELUAR TAHUN 2020: 142
SURAT KETERANGAN ONLINE TAHUN 2020: 0
TAMU TAHUN 2020: 1

Statistik Surat Masuk Statistik Pelaksanaan Surat Masuk Data Surat Masuk belum Disposisi/Dilaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Surat Masuk

Surat Masuk Tahun 2019

#	Tgl Register	Nomor Surat	Pengirim	Status
---	--------------	-------------	----------	--------

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU+
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Halaman Utama Register Surat Penyataan & Penggeledahan Surat Keterangan Buku Tamu

Register Surat Masuk

Tambah Cari Detail Cetak Register

Show 10 entries Search:

#	Tanggal Register	Nomor Agenda	Sifat Surat	Pengirim	Perihal	Status	Pelaksana	Waktu	#
1	16/01/2020	251/2020	Biasa	Pengurus Pusat IKAH	Pengiriman kartu anggota dan kalender IKAH Tahun 2020	Pendaftaran	Pendaftaran Oleh: Anreni Lambung, S.E [Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga]	0 Hari	
2	16/01/2020	250/2020	Biasa	PN Palangka Raya	Pemeriksaan dalam tingkat peninjauan kembali perkara perdata No 168/Pdt.G/2018/PN Pk	Disposisi	Kepada: Sulaiman, S.H.,M.H. [Panitera]	0 Hari	
3	16/01/2020	249/2020	Penting	BPS Prov Kalteng	Permintaan data prov kalteng dalam angka 2020	Disposisi	Kepada: H, Aida Harum Mubarakah SH.,MH. [Sekretaris]	0 Hari	
192,168.2.2.1p43r	16/01/2020	248/2020	Penting	PN Palangka	Memori banding susulan	Disposisi	Kepada: Sulaiman, S.H.,M.H.	0 Hari	

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU+
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Halaman Utama Register Surat Penyataan & Penggeledahan Surat Keterangan Buku Tamu

Register Surat Keluar

Tambah Cari Detail Cetak Register

Show 10 entries Search:

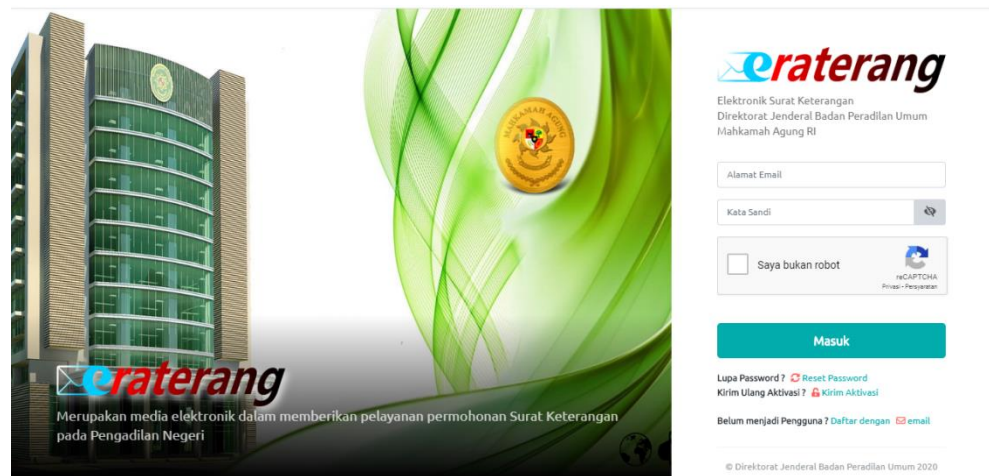
#	Tanggal Register	Nomor Surat	Dari Bagian	Tujuan Kirim	Status	Waktu	#
1	16/01/2020	W16-U/57/HK.01/01/2020	Kepaniteraan Muda Pidana	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	Pendaftaran	0 Hari	
2	16/01/2020	W16-U/56/HK.01/01/2020	Kepaniteraan Muda Pidana	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	Pendaftaran	0 Hari	
3	16/01/2020	W16-U/55/HM.01/01/2020	Sub-Bagian Kepegawaian, dan Teknologi Informasi	Dekan fakultas hukum universitas palangka raya	Pendaftaran	0 Hari	
4	16/01/2020	W16-U/54/HK.01/01/2020	Kepaniteraan Muda Pidana	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	Pendaftaran	0 Hari	
5	16/01/2020	W16-U/53/HK.01/01/2020	Kepaniteraan Muda Pidana	KPN Palangka Raya	Pendaftaran	0 Hari	

2. Bidang Kepaniteraan, meliputi:

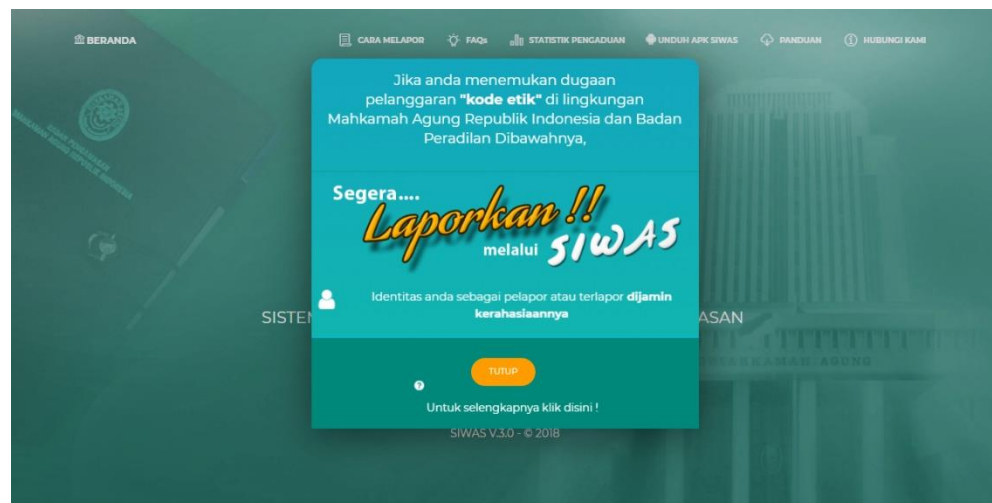
a. Kepaniteraan Hukum melayani antara lain:

- Permohonan surat keterangan belum pernah dipidana, layanan ini telah menggunakan aplikasi yang disebut dengan Eraterang, yaitu aplikasi permohonan surat belum pernah dihukum, yang dilayani secara *online*, pemohon tidak perlu datang ke kantor Pengadilan Negeri yang dituju, akan tetapi cukup akses langsung ke situs eraterang melalui

eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id, kemudian daftar menggunakan akun gmail, dilanjutkan dengan memilih Surat Keterangan yang diinginkan dan Pengadilan Negeri yang di tuju, dan terakhir mengisi semua data formulir yang dibutuhkan. Selanjutnya Pengadilan yang di tuju akan memproses pengajuan Surat Keterangan tersebut, dan akan memberitahukan kepada Pemohon apakah permohonannya diterima atau ditolak. Setelah permohonan diterima, Pemohon dapat mengambil Surat Keterangan Asli di Pengadilan yang di tuju dengan membawa fotokopi dokumen-dokumen pendukung. Aplikasi ini mulai diluncurkan pada bulan Agustus 2019:



- Pengaduan masyarakat, layanan ini juga sudah disediakan secara elektronik (SIWAS) maupun secara manual;



- Permintaan salinan putusan yang telah BHT.
 - Pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kepaniteraan Hukum.
- b. Kepaniteraan Pidana/Kekhususan, melayani antara lain:
- Menerima berkas perkara pidana biasa, tipikor.
 - Persetujuan/ijin Pengeledahan dan Penyitaan
 - Permohonan perpanjangan penahanan dari Penyidik/Penuntut Umum.

- Permohonan upaya hukum, banding, kasasi dan PK
 - Pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kepaniteraan pidana/kekhususan;
- c. Kepaniteraan Perdata/Kekhususan, melayani antara lain:
- Menerima berkas perkara gugatan perdata, PHI dan permohonan. Layanan ini telah disediakan secara elektronik yang dikenal dengan istilah E-Court atau peradilan elektronik, sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;.
- E-court yang telah diberlakukan di seluruh Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah meliputi kegiatan :
- 1) Pendaftaran (E-filing)
 - 2) Pembayaran (E-payment)
 - 3) Pemanggilan (E-Summons)
 - 4) Persidangan (E-Litigasi)
- E-court melayani perkara, antara lain:
- 1) Permohonan
 - 2) Gugatan dan
 - 3) Bantahan (*derden/ partij Verzet*)
- Menerima permohonan upaya hukum, banding, kasasi dan PK;
 - Pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kepaniteraan Perdata/Kekhususan.
- d. Pojok E-Court (E-court Corner)
- Pojok E-court atau Meja E-Court melayani masyarakat yang ingin memperoleh penjelasan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan E-court, termasuk membantu masyarakat awam yang akan mengajukan gugatan/permohonan/bantahan, akan tetapi tidak bisa menggunakan IT (Gapték);
- e. Meja Inzage
- Meja Inzage wajib disediakan di setiap Pengadilan Negeri, yang berfungsi sebagai tempat para pihak untuk mempelajari berkas perkara, baik dalam proses persidangan maupun dalam proses mengajukan upaya hukum Banding;
- Untuk semua Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di semua Pengadilan se-Kalimantan Tengah menyediakan layanan yang sama sebagaimana terurai di atas. Sedangkan Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Pengadilan Negeri Kelas IA, di samping menyediakan layanan sebagaimana tersebut di atas, juga menyediakan layanan perkara PHI dan Tindak Pidana Korupsi;

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menggariskan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Oleh karena itu sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya terus membangun inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna pengadilan, sekaligus untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi tersebut dibangun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Adapun Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang sudah tersedia pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya sampai akhir Tahun 2024, meliputi:

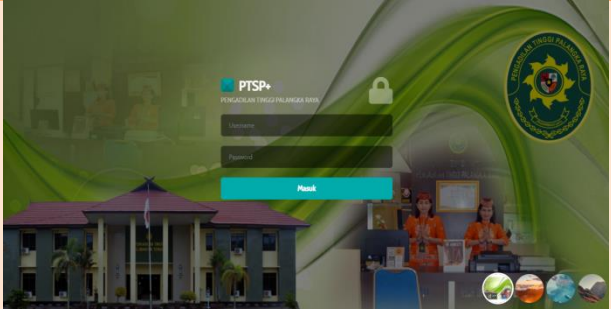
A. Pengadilan Tinggi Palangkaraya

No	Kategori	Jenis Inovasi	Penjelasan
1.	EKSTERNAL	HUMA BETANG	 <p>Huma Betang merupakan Aplikasi Integrasi beberapa inovasi Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Untuk saat ini, Huma Betang terdiri dari Aplikasi Sistem Informasi Penelitian, Riset dan Studi (SIPRES), Sistem Informasi Data Advokat (SIDAT) dan Sistem Akselerasi Penetapan Perbaikan Akta Kependudukan (SIAPPADUKA).</p>

	<p>Sistem Informasi Penelitian, Riset dan Studi (SIPRES)</p>	 <p>E-FORM PERMOHONAN PENELITIAN, RISET DAN STUDI (E-PRES)</p> <p>Formulir ini dibuat untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan para Mahasiswa/Pelajar untuk melakukan Pendaftaran Penelitian, Riset dan Studi - Registrasi dan cetak Ijin Penelitian secara Online tanpa harus ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya <p>Aplikasi SIPRES ini dibuat dan diperuntukkan oleh para mahasiswa/pelajar yang ingin melakukan Penelitian, Riset dan Studi/Praktik Lapangan baik di Pengadilan Tinggi Palangkaraya, maupun Pengadilan Negeri se Kalimantan Tengah. Untuk mendapatkan surat ijin Penelitian, Riset dan Studi tidak perlu lagi ke kantor Pengadilan Tinggi Palangkaraya, cukup dengan melakukan proses registrasi pada Aplikasi ini dan data akan diproses selama 30 menit. Setelah itu para mahasiswa/pelajar dapat <i>download</i> surat ijin Penelitian, Riset dan Studi yang sudah diverifikasi menggunakan <i>barcode</i>.</p>
	<p>Sistem Informasi Data Advokat (SIDAT)</p>	 <p>SIDAT v.3.0 Sistem Informasi Data Advokat</p> <p>LIHAT DAFTAR ADVOKAT WILAYAH KALIMANTAN TENGAH</p> <p>Catatan: (Data yang ditampilkan adalah Data Advokat Wilayah Kalimantan Tengah yang sudah diambil sumbernya di PT Palangkaraya)</p> <p>Masukkan Nama atau Wilayah Kabupaten</p> <p>Klik Untuk Melihat Data Lengkap</p> <p>Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam mencari data-data advokat wilayah Kalimantan Tengah dan memudahkan organisasi advokat dalam melakukan pendaftaran penyempahan advokat di Pengadilan Tinggi Palangkaraya.</p>
	<p>Sistem Akselerasi Penetapan Perbaikan Akta Kependudukan (SIAP PADUKA)</p>	 <p>Pengadilan Tinggi Palangkaraya SIAPPADUKA (Sistem Akselerasi Penetapan Perbaikan Akta Kependudukan)</p> <p>Ketik NIK Anda</p> <p>masukan nomor Nomor Buku Kependudukan (NIK) untuk melihat data status periksa.</p> <p>Copyright © 2021 - 2024 Pengadilan Tinggi Palangkaraya Dev By </p> <p>SIAP PADUKA merupakan aplikasi yang berfungsi untuk membantu masyarakat memonitor proses perbaikan akta kependudukan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan.</p>

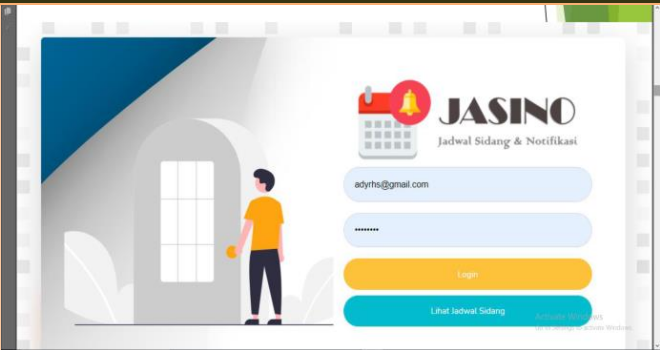
	<p>Antrian Pengunjung Loker Meja Layanan PTSP</p>	 <p>Aplikasi yang berfungsi untuk pengambilan nomor antrian Pengunjung Loker Meja Layanan pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya</p>
	<p>Elektronik Buku Tamu</p>	 <p>Aplikasi yang berfungsi untuk membantu pencatatan tamu/pengunjung pengadilan secara elektronik dan fitur menyimpan foto.</p>
	<p>Meja Layanan Prioritas</p>	 <p>Layanan Prioritas ditujukan kepada para pencari Keadilan yang memiliki kebutuhan khusus sehingga tidak perlu mengantri apabila meja layanan PTSP sedang melayani tamu.</p>
	<p>SAGITA</p>	 <p>Aplikasi SAGITA atau Sistem Pelayanan Digital Pengadilan Tinggi Palangkaraya bertujuan untuk</p>




			<p>memperudahkan masyarakat yang ingin menggunakan layanan Pengadilan Tinggi Palangkaraya, masyarakat dapat berkomunikasi dengan petugas PTSP melalui <i>Zoom Meeting</i> dan <i>Whatsapp</i>.</p>
<p>2.</p>	<p>INTERNAL</p>	<p><i>Management</i> Kontrol Dokumen HATIWASBID dan HATIWASDA (MAKBIDA)</p>	 <p>Aplikasi ini berfungsi sebagai wadah dokumen-dokumen elektronik seperti Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Laporan Tindak Lanjut yang berkaitan dengan Pengawasan Bidang di Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengawasan Daerah pada seluruh Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah.</p>
		<p>Monitoring Implementasi SIPP Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah</p>	 <p>Merupakan aplikasi yang membantu Hakim Tinggi Pengawas Daerah untuk memonitoring Pelaksanaan Implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah.</p>
		<p>Sistem Informasi Master Dokumen (SIMASDOK)</p>	 <p>Aplikasi ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan elektronik dokumen-dokumen pendukung segala</p>

			kegiatan seperti Surat Keputusan, Laporan Realisasi Anggaran, Notulen Rapat, dan lain-lain.
		Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	 <p>Merupakan Aplikasi Pencatatan Register Surat Masuk dan Surat Keluar pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya.</p>

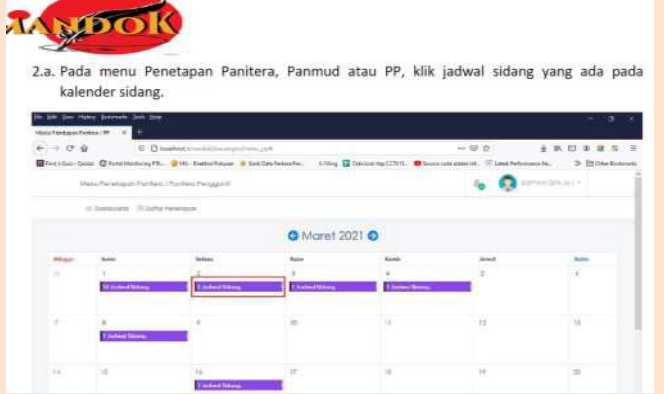
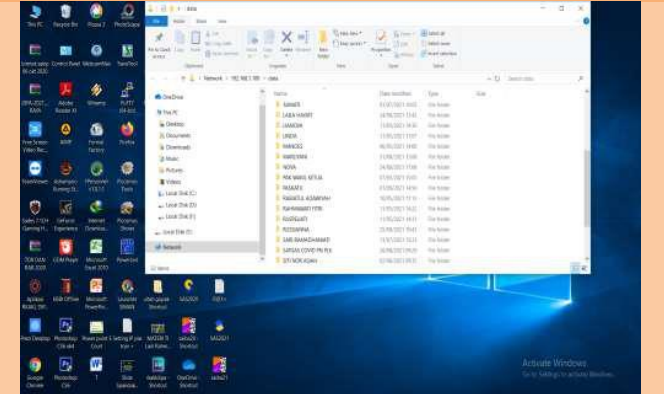
B. Pengadilan Negeri

1. Pengadilan Negeri Palangkaraya

No	Pengadilan Negeri	Jenis Inovasi	Penjelasan
1.	Pengadilan Negeri Palangkaraya	APLIKASI JASINO (Jadwal Sidang dan Notifikasi)	 <p>Aplikasi ini digunakan untuk mengetahui jadwal sidang yang telah ditentukan/ didaftarkan oleh majelis hakim ketika masyarakat/ pengguna pengadilan telah mendaftarkan perkara mereka, pada saat bersamaan ketika jadwal sidang sudah dimasukan/ditentukan waktunya, akan otomatis muncul pada display ruang tunggu sidang, sehingga akan memudahkan para pencari keadilan mengetahui jadwal sidang dan waktu tunggu yang diperlukan berdasarkan perkiraan yang telah ditetapkan pada saat penginputan waktu pelaksanaan sidang dan ruang sidang.</p>

<p>2</p>		<p>Mesin Antrian PTSP</p>	 <p>Adalah alat yang digunakan untuk antrian PTSP agar pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan cara melayani secara berurutan sesuai dengan kedatangan pengunjung.</p>
<p>3</p>		<p>Antrian Sidang</p>	 <p>Aplikasi yang digunakan untuk memudahkan mendata dan memanggil para pihak yang hadir dan siap untuk disidangkan sesuai dengan antrian sidang.</p>
<p>4</p>		<p>Mesin Antrian Sidang</p>	 <p>Antrian Sidang Pengadilan merupakan aplikasi untuk manajemen antrian sidang di Pengadilan. Antrian sidang Pengadilan secara otomatis terkoneksi dengan aplikasi manajemen perkara SIPP sehingga aplikasi antrian sidang secara otomatis dapat menampilkan jadwal sidang harian secara otomatis. Antrian sidang Pengadilan tidak hanya menampilkan jadwal sidang secara otomatis, tetapi juga dapat memanggil panggilan persidangan dengan menyebutkan nomor perkara, para pihak, agenda dan jam sidang secara otomatis dibunyikan saat ditekan tombol panggil. Antrian sidang Pengadilan juga mampu menampilkan kehadiran pihak kepada Hakim dan Panitera Pengganti</p>

			<p>sehingga dapat diketahui, apakah pihak sudah hadir atau belum. Antrian sidang Pengadilan juga dapat memberikan pemberitahuan persidangan kepada para pihak 1 hari sebelum jatuh tempo hari sidang, atau secara otomatis dapat memberikan info kepada para pihak H-1 pengingat persidangan melalui pesan whatsapp.</p>
5		PTSP Online	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">LAYANAN PTSP ONLINE PN PALANGKARAYA</p> <p>PTSP Online adalah Pelayanan Petugas Pelayanan Satu Pintu secara virtual yang terintegrasi dengan aplikasi <i>zoom meeting</i> dengan tautan yang tersedia.</p>
6		Pengadilan Inklusif (Pelayanan Untuk Disabilitas)	<div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 5px;">     </div> <p>Pengadilan Negeri Palangkaraya menuju pengadilan inklusif untuk penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan.</p>

<p>7</p>		<p>SIPERMA</p>	 <p>Admin Page SIPERMA : Dokumen (Sertifikat/BPKB)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Dokumen</th> <th>Nama Dokumen (BPKB/Sertifikat)</th> <th>Keterangan</th> <th>File Upload (PDF)</th> <th>File Upload (Gambar)</th> <th>Aksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BELUM BERSERTIFIKAT</td> <td>SA Hibah TPK & Sath Adj NO. 01</td> <td>Hibah Pemkot Palangka Raya</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BELUM BERSERTIFIKAT</td> <td>Sertifikat Tanah Tapkor & Sath Adj no. 01</td> <td>Sertifikat Anc. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Kantor Tapkor</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERTIFIKAT</td> <td>Sertifikat Diponegoro No. 21</td> <td>Kantor PH Palangka Raya</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERTIFIKAT</td> <td>Sertifikat LUNTING S NO. 23</td> <td>Rumah Dinas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERTIFIKAT</td> <td>Sertifikat LUNTING S NO. 21</td> <td>Rumah Dinas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERTIFIKAT</td> <td>Sertifikat LUNTING S NO. 19</td> <td>Rumah Dinas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SERTIFIKAT</td> <td>Sertifikat L. MANGKURAT NO. 11</td> <td>Rumah Dinas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SERTIFIKAT</td> <td>Sertifikat L. MANGKURAT 13</td> <td>Rumah Dinas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Aplikasi ini diperuntukkan untuk reminder kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas dan untuk penyimpanan dokumen softcopy dari sertifikat agar dapat memudahkan pencarian dokumen sertifikat.</p>	No	Jenis Dokumen	Nama Dokumen (BPKB/Sertifikat)	Keterangan	File Upload (PDF)	File Upload (Gambar)	Aksi	1	BELUM BERSERTIFIKAT	SA Hibah TPK & Sath Adj NO. 01	Hibah Pemkot Palangka Raya				2	BELUM BERSERTIFIKAT	Sertifikat Tanah Tapkor & Sath Adj no. 01	Sertifikat Anc. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Kantor Tapkor				3	SERTIFIKAT	Sertifikat Diponegoro No. 21	Kantor PH Palangka Raya				4	SERTIFIKAT	Sertifikat LUNTING S NO. 23	Rumah Dinas				5	SERTIFIKAT	Sertifikat LUNTING S NO. 21	Rumah Dinas				6	SERTIFIKAT	Sertifikat LUNTING S NO. 19	Rumah Dinas				7	SERTIFIKAT	Sertifikat L. MANGKURAT NO. 11	Rumah Dinas				8	SERTIFIKAT	Sertifikat L. MANGKURAT 13	Rumah Dinas			
No	Jenis Dokumen	Nama Dokumen (BPKB/Sertifikat)	Keterangan	File Upload (PDF)	File Upload (Gambar)	Aksi																																																												
1	BELUM BERSERTIFIKAT	SA Hibah TPK & Sath Adj NO. 01	Hibah Pemkot Palangka Raya																																																															
2	BELUM BERSERTIFIKAT	Sertifikat Tanah Tapkor & Sath Adj no. 01	Sertifikat Anc. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Kantor Tapkor																																																															
3	SERTIFIKAT	Sertifikat Diponegoro No. 21	Kantor PH Palangka Raya																																																															
4	SERTIFIKAT	Sertifikat LUNTING S NO. 23	Rumah Dinas																																																															
5	SERTIFIKAT	Sertifikat LUNTING S NO. 21	Rumah Dinas																																																															
6	SERTIFIKAT	Sertifikat LUNTING S NO. 19	Rumah Dinas																																																															
7	SERTIFIKAT	Sertifikat L. MANGKURAT NO. 11	Rumah Dinas																																																															
8	SERTIFIKAT	Sertifikat L. MANGKURAT 13	Rumah Dinas																																																															
<p>8</p>		<p>AMANDOK</p>	 <p>Z.a. Pada menu Penetapan Panitera, Panmud atau PP, klik jadwal sidang yang ada pada kalender sidang.</p> <p>Aplikasi ini dibuat untuk memberikan kemudahan kepada para pegawai terutama panitera pengganti dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga pekerjaan yang semula dilakukan secara manual dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan sistem digital. Aplikasi ini bertujuan untuk meminimalisir keterlambatan penyerahan dokumen penetapan dari panitera pengganti kebagian kepaniteraan pidana.</p>																																																															
<p>9</p>		<p>BANK DATA</p>	 <p>Aplikasi yang dibuat untuk memudahkan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mendapatkan data melalui aplikasi secara langsung dengan mengakses dibank data.</p>																																																															

2. Pengadilan Negeri Sampit

No	Pengadilan Negeri	Jenis Inovasi	Penjelasan
1	Pengadilan Negeri Sampit	e-Office Layanan Disabilitas	 <p>Media Informasi Layanan Disabilitas</p> <p>www.pn-sampit.go.id info@pn-sampit.go.id PN Sampit pn_sampit Pn Sampit</p> <p>Penyediaan Sarana dan Prasarana/Fasilitas Ramah Disabilitas guna mewujudkan Pengadilan Inklusif (Disabilitas) dengan memberikan layanan dan perlindungan secara menyeluruh terhadap penyandang disabilitas tanpa diskriminasi pada Pengadilan Negeri Sampit</p>
2		Mal Pelayanan Publik (MPP)	 <p>Mal Pelayanan Publik (MPP)</p> <p>www.pn-sampit.go.id info@pn-sampit.go.id PN Sampit pn_sampit Pn Sampit</p> <p>Mal Pelayanan Publik (MPP) ini didirikan berdasarkan Perpres No. 89 Tahun 2021, Permenpan RB No. 92 Tahun 2021, dan Perbup Kotim No. 63 Tahun 2021. Mal Pelayanan Publik sudah membuka 31 gerai yang diisi Kementerian/Lembaga, Instansi Vertikal, serta Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Hadirnya Mal Pelayanan Publik merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengintegrasikan berbagai pelayanan di satu lokasi sehingga masyarakat bisa dengan mudah saat mengurus berbagai keperluan. Masyarakat dalam menggunakan layanan di Mal Pelayanan Publik, dipermudah dengan disediakannya loket antrian yang dilayani petugas loket Mal Pelayanan Publik yang akan mengarahkan masyarakat ke tempat pelayanan instansi yang ingin mereka datangi.</p>



<p>3</p>	<p>Pojok Edukasi Anti Korupsi (PEDATI)</p>	 <p>Bahwa Pengadilan Negeri Sampit bekerjasama dengan KPPN Sampit yang telah memiliki inovasi Layanan Penyuluhan Anti Korupsi (LAPAK) KPPN Sampit selain sebagai Mitra Kerja juga memiliki Sinergi yang sama dalam Pembangunan Zona Integritas dalam mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM), dimana terdapat pegawai KPPN Sampit yang telah mendapat sertifikasi kompeten sebagai Penyuluh Anti Korupsi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK.</p>
<p>4</p>	<p>Pembayaran elektronik (Mesin EDC)</p>	 <p>Demi kemudahan pembayaran biaya panjar perkara melalui e-Payment pada aplikasi e-Court disediakan mesin EDC untuk pembayaran virtual account. Dengan adanya mesin aplikasi ini memudahkan pencari keadilan dalam melakukan pembayaran karena tidak perlu jauh-jauh ke ATM atau Bank.</p>
<p>5</p>	<p>Sarana dan Prasarana Disabilitas</p>	




			 <p>Pengadilan Negeri Sampit menyiapkan fasilitas khusus untuk para penyandang disabilitas. Fasilitas ini disiapkan untuk memudahkan difabel selama berada di terminal tersebut. Kemudahan bagi difabel sudah ada sejak tempat turun penumpang (<i>drop zone</i>). Untuk difabel diberikan tempat parkir khusus dan akses penunjang berupa jalur <i>guiding/warning block</i>, pegangan rambat, jalur landau dan toilet untuk kebutuhan penyandang disabilitas, Fasilitas Toilet juga disesuaikan dengan standar yang ada dengan diberi pegangan rambat.</p>
6		Alat Pemanggilan Persidangan	 <p>Aplikasi ini berfungsi untuk mengubah tulisan menjadi suara sehingga bisa membuat pengumuman panggilan sidang yang akan diperkeras melalui speaker di ruang tempat pengujung.</p>
7		Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Online	 <p>Aplikasi yang membantu pengguna layanan untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Petugas PTSP.</p>

		Pengguna Layanan dapat langsung melakukan survei secara online melalui perangkat Kiosk yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Sampit.
--	--	---

3. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

No	Pengadilan Negeri	Jenis Inovasi	Penjelasan
1	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Pojok e- Court	 <p>Pojok e-Court disediakan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun merupakan fasilitas tambahan untuk membantu para pihak berperkara yang ingin memanfaatkan layanan administrasi perkara secara elektronik. Layanan ini berada di area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).</p>
2		Pos Bantuan Hukum	 <p>Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan ruang yang disediakan Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk mengisi formulir permohonan bantuan hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.</p>

<p>3</p>		<p>Pembayaran elektronik (Mesin EDC)</p>	 <p>Demi kemudahan pembayaran biaya panjar perkara melalui e-Payment pada aplikasi e-Court disediakan mesin EDC untuk pembayaran virtual account. Dengan adanya mesin aplikasi ini memudahkan pencari keadilan dalam melakukan pembayaran karena tidak perlu jauh-jauh ke ATM atau Bank.</p>
<p>4</p>		<p>Layanan khusus Penyandang Disabilitas</p>	 <p>Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyiapkan fasilitas khusus untuk para penyandang disabilitas. Fasilitas ini disiapkan untuk memudahkan difabel selama berada di terminal tersebut. Kemudahan bagi difabel sudah ada sejak tempat turun penumpang (drop zone). Untuk penyandang disabilitas diberikan tempat khusus parkir kendaraan yang diberi warna biru. Kemudian disediakan juga <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i> untuk menuju ruang PTSP maupun ruang Sidang. Pada ruang PTSP dan ruang Sidang disediakan tempat khusus bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Selain itu untuk juga disediakan sehingga memudahkan para penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses ke toilet. Disamping itu disediakan juga fasilitas pendukung seperti kursi roda, tongkat jalan, walker, buku braille dan alat bantu dengar.</p>


<p>5</p>		<p>Protokoler Persidangan</p>	 <p>Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mempunyai petugas sidang yang memang ditunjuk dan bertugas mengurus protokol persidangan. Petugas sidang ini bukan hanya sekedar menjadi sebagai petugas pengangkut Kitab Suci untuk saksi yang bersumpah, akan tetapi justru harus diberi peran besar untuk mengkoordinir jadwal sidang dan mengatur kelancaran jadwal sidang dengan memastikan kehadiran para pihak.</p>
<p>6</p>		<p>Aplikasi Pemanggilan Persidangan</p>	 <p>Aplikasi ini berfungsi untuk mengubah tulisan menjadi suara sehingga bisa membuat pengumuman panggilan sidang yang akan diperkeras melalui speaker di ruang tempat pengunjung.</p>
<p>7</p>		<p>Pengumuman Denda Tilang Online</p>	 <p>Aplikasi yang membantu untuk melakukan pencarian denda tilang secara online pada website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sehingga bisa diakses dimana saja. Pengumuman Denda Tilang Online beralamatkan di tilang.pn-pangkalanbun.go.id.</p>

<p>8</p>		<p>Sidang di Luar Gedung Pengadilan (Zetting Platz)</p>	 <p>Sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.</p>
<p>9</p>		<p>Aplikasi Perpustakaan Online</p>	 <p>Aplikasi Perpustakaan Online adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan buku perpustakaan mulai dari arsip, peminjaman buku ataupun pengembalian buku secara elektronik. Aplikasi ini dikelola oleh Petugas Pustakawan sebagai petugas yang menginput kedalam sistem.</p>
<p>10</p>		<p>Assisten Virtual Informasi dan Layanan (AVILA)</p>	 <p>Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terus memberikan layanan informasi kepada masyarakat melalui Assistent Virtual yang terhubung dengan whatsapp yang dikelola oleh Petugas layanan PTSP. Hal tersebut dilakukan karena aplikasi whatsapp yang sangat mudah untuk dijangkau dan dioperasikan oleh pengguna. Pencari keadilan dapat mengakses Assistent Virtual melalui website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.</p>

<p>11</p>		<p>SIMPAN (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan)</p>	 <p>Aplikasi SIMPAN atau Sistem Informasi Manajemen Pengawasan adalah Aplikasi Manajemen arsip dan monitoring laporan pengawasan secara elektronik mulai dari Pengawasan Bidang, Audit Internal dan Audit Eksternal yang terdiri dari Pengawasan Tingkat Banding maupun Bawas. Sehingga dengan aplikasi ini dapat melihat apakah laporan pengawasan sudah ditindaklanjuti atau belum.</p>
<p>12</p>		<p>Antrian PTSP</p>	 <p>Aplikasi Antrian PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah aplikasi antrian buat pengunjung para pencari keadilan yang berkepentingan terkait dengan bagian meja hukum, perdata, pidana dan umum. Masyarakat atau pengguna layanan yang datang dapat mengambil nomor antrian pada komputer <i>touchscreen</i> yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kemudian dapat menunggu sampai nomor antrian dipanggil.</p>
<p>13</p>		<p>Audio Anti Gratifikasi</p>	 <p>Aplikasi ini berfungsi untuk mengumumkan dan memberitahukan kepada pengunjung bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun merupakan wilayah anti gratifikasi dan telah mendapatkan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.</p>

14		PTSP Online	 <p>PTSP Online adalah Pelayanan PTSP secara online berbasis <i>video conference</i> via whatsapp sehingga dapat diakses oleh masyarakat dari mana saja.</p>
15		Posbakum Online	 <p>Layanan Posbakum Online adalah layanan menggunakan video call aplikasi whatsapp agar lebih mudah diakses oleh para pengguna layanan/para pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.</p>

4. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

No	Pengadilan Negeri	Jenis Inovasi	Penjelasan
1	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	Pelita Online	 <p>Merupakan aplikasi yang memudahkan penyidik untuk melakukan permohonan perpanjangan penahanan, izin geledah, izin penyitaan dimana penyidik tidak perlu datang ke Pengadilan secara langsung (dapat dilakukan di satker penyidik).</p>


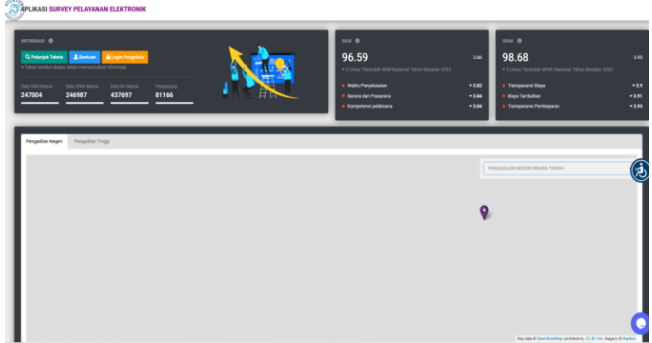

2		SIMETRI	 <p>Merupakan sistem informasi monitoring evaluasi pendaftaran eksekusi.</p>
3		SI-ANIK	 <p>Merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan registrasi layanan antrian PTSP Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Registrasi layanan antrian PTSP dapat dilakukan secara online maupun offline.</p>
4		SIJAMBANG	 <p>Merupakan aplikasi jadwal pemeliharaan Barang Milik Negara.</p>
5		SIMARS	 <p>Merupakan aplikasi yang memudahkan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II dalam manajemen arsip.</p>

6		SI-PIAN	 <p>SI-PIAN merupakan pelayanan PTSP online yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk memudahkan penyediaan layanan informasi khususnya di kepaniteraan pidana menggunakan Whatsapp.</p>
---	--	---------	--



5. Pengadilan Negeri Muara Teweh

No	Pengadilan Negeri	Jenis Inovasi	Penjelasan
1	Pengadilan Negeri Muara Teweh	Pojok e-Court	 <p>Pojok e-Court disediakan di Pengadilan Negeri Muara Teweh merupakan fasilitas tambahan untuk membantu para pihak berperkara yang ingin memanfaatkan layanan administrasi perkara secara elektronik. Layanan ini berada di area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Petugas Pojok e-Court bukan saja memberikan penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya dan hal-hal lainnya mengenai layanan e-court. Lebih dari itu, ia juga membantu mendaftarkan akun pada e-court dan memandu cara pendaftaran perkara melalui e-court.</p>
2		Pos Bantuan Hukum	

			<p>Posbakum atau Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.</p>
3		<p>Pembayaran Elektronik (Mesin EDC)</p>	<p>Demi kemudahan pembayaran biaya panjar perkara melalui e-Payment pada aplikasi e-Court disediakan mesin EDC untuk pembayaran virtual account. Dengan adanya mesin aplikasi ini memudahkan pencari keadilan dalam melakukan pembayaran karena tidak perlu jauh-jauh ke ATM atau Bank.</p>
4		<p>Layanan khusus Penyandang Disabilitas</p>	<div data-bbox="799 786 1401 1155" data-label="Image"> </div> <p>Pengadilan Negeri Muara Teweh menyiapkan fasilitas khusus untuk para penyandang disabilitas. Fasilitas ini disiapkan untuk memudahkan difabel selama berada di terminal tersebut. Kemudahan bagi difabel sudah ada sejak tempat turun penumpang (drop zone). Untuk penyandang disabilitas diberikan tempat khusus parkir kendaraan yang diberi warna biru. Kemudian disediakan juga <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i> untuk menuju ruang PTSP maupun ruang Sidang. Pada ruang PTSP dan ruang Sidang disediakan tempat khusus bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Selain itu untuk juga disediakan sehingga memudahkan para penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses ke toilet. Disamping itu disediakan juga fasilitas pendukung seperti kursi roda, tongkat jalan, walker, buku braille dan alat bantu dengar.</p>
5		<p>Pengumuman Denda Tilang Online</p>	<div data-bbox="775 1697 1425 2022" data-label="Image"> </div> <p>Aplikasi yang membantu untuk melakukan pencarian</p>

			denda tilang secara online pada website Pengadilan Negeri Muara Teweh sehingga bisa diakses dimana saja.
6		Sidang di Luar Gedung Pengadilan (Zetting Platz)	 <p>Sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.</p>
7		Survey Kepuasan Masyarakat	 <p>Aplikasi yang membantu pengguna layanan untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Petugas PTSP. Pengguna Layanan dapat langsung melakukan survei secara online melalui perangkat Kiosk yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh.</p>
8		Aplikasi Perpustakaan Online	 <p>Aplikasi Perpustakaan Online adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan buku perpustakaan mulai dari arsip, peminjaman buku ataupun pengembalian buku secara elektronik. Aplikasi ini dikelola oleh Petugas Pustakawaan sebagai petugas yang menginput kedalam sistem.</p>

<p>9</p>		<p>Aplikasi Sistem Laporan Pengawasan (Si-Lawas Pedang)</p>	 <p>Aplikasi Sistem Laporan Pengawasan Bidang (Si-Lawas Pedang) Merupakan aplikasi yang dibuat untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan pelaporan Pengawas Bidang. Aplikasi ini juga memudahkan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam mencari laporan hasil pengawasan dari tingkat rapat bagian, rapat kesekretariatan dan Kepaniteraan, rapat bulanan, maupun laporan-laporan hasil pengawas bidang. Dengan adanya aplikasi Si- Lawas Pedang ini, lebih memudahkan kotrol pengawas oleh level pimpinan.</p>
<p>10</p>		<p>Aplikasi SIPANDA</p>	 <p>Sistem Penyimpanan Data (SIPANDA) adalah Sebuah aplikasi digital yang akan memberikan informasi dan ruang untuk tempat penyimpanan arsip pengadilan. Aplikasi ini memberi kemudahan bagi seluruh pegawai Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk menyimpan dan mencari arsip dokumen yang dibutuhkan baik itu dalam bentuk Pdf maupun dalam bentuk file mentahnya (Word atau Excel). Setiap surat atau file yang diupload kedalam Aplikasi Sistem Penyimpanan Data (SIPANDA) akan tersimpan didalam server database.</p>
<p>11</p>		<p>Antrian PTSP</p>	 <p>Aplikasi Antrian PTSP Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah aplikasi antrian buat pengunjung para pencari</p>

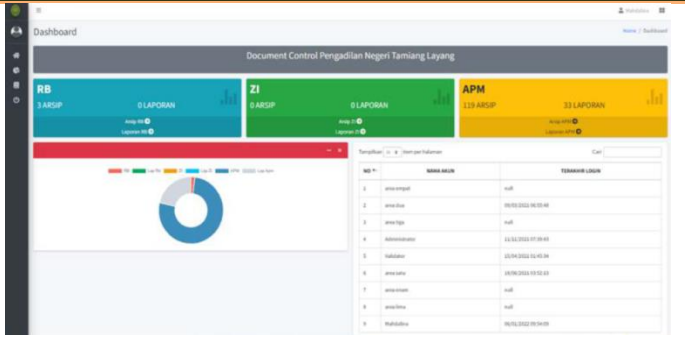


			<p>keadilan yang berkepentingan terkait dengan bagian meja hukum, perdata, pidana dan umum. Masyarakat atau pengguna layanan yang datang dapat mengambil nomor antrian pada komputer touchscreen yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh.</p>
<p>12</p>		<p>JDIH Pengadilan Negeri Muara Teweh</p>	 <p>Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.</p>
<p>13</p>		<p>Audio Gratifikasi</p>	 <p>Aplikasi Audio Peringatan Anti Gratifikasi sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 adalah aplikasi untuk membantu Petugas Pengadilan di dalam menjalankan tugas untuk membacakan Peringatan Anti Gratifikasi setiap 2 jam melalui mikrofon. Aplikasi ini berfungsi untuk mengumumkan dan memberitahukan kepada pengunjung bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Muara Teweh anti gratifikasi dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).</p>

6. Pengadilan Negeri Buntok

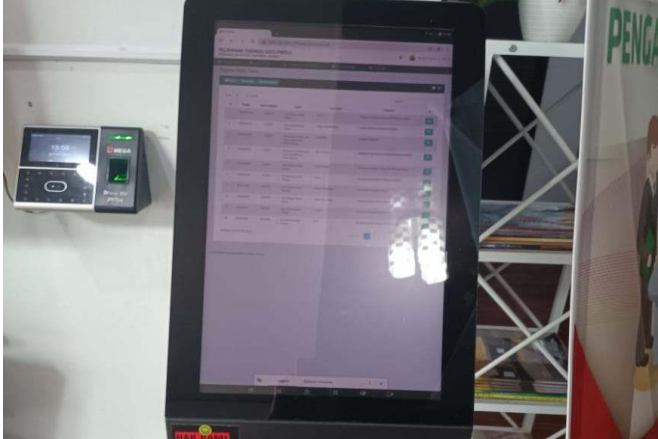
No	Pengadilan Negeri	Jenis Inovasi	Penjelasan
1	Pengadilan Negeri Buntok	Aplikasi TUSSUK (Tempat Untuk Simpan Surat Keputusan)	 <p>Aplikasi Tempat Untuk Simpan Surat Keputusan (TUSSUK) adalah sebuah aplikasi yang diperuntukan untuk pencarian Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok. Dengan adanya Aplikasi Tussuk, pencarian surat keputusan bisa lebih cepat dan pengarsipan dokumen Surat Keputusan dapat tersimpan dengan baik dan rapi. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi yang memanfaatkan jaringan internet untuk menghubungkan database Aplikasi Tussuk dengan User/Pengguna. Arsip yang diinput kedalam aplikasi sebelumnya discan dan disimpan dalam bentuk format pdf menggunakan mesin scanner.</p>
2		SIKENTAN (Sistem Informasi Kelompok Rentan)	 <p>Aplikasi Sistem Informasi Kelompok Rentan (SIKENTAN) digunakan sebagai informasi bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya penyandang cacat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok.</p>
3		Ms. EVA	 <p>“EVA (Executive Virtual Assitance)” adalah merupakan</p>

		agen perangkat lunak yang dapat melakukan tugas atau layanan individu berdasarkan perintah atau permintaan masyarakat pencari keadilan yang ingin mendapatkan informasi tentang pelayanan di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
--	--	---

7. Pengadilan Negeri Tamiang Layang

No	Pengadilan Negeri	Jenis Inovasi	Penjelasan																																																
1	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	Aplikasi <i>Electronic Document Control</i> (eDCO)	 <p><i>Electronic Document Control</i> atau disingkat eDCO adalah aplikasi berbasis teknologi informasi yang meliputi kegiatan pengarsipan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tamiang Layang terkait dengan program Reformasi Birokrasi (RB), Akreditasi Penjamin Mutu (APM) dan Zona Integritas (ZI).</p>																																																
2		Aplikasi <i>Elektronik Leave Permission System</i> (eLEAPS)	 <p><i>Electronic Leave Permission System</i> atau disingkat eLEAPS adalah aplikasi berbasis teknologi informasi yang meliputi proses pemberian ijin cuti bagi pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II.</p>																																																
3		Aplikasi Sistem Unggahan Informasi Kepaniteraan (SUIKE)	 <p>INFORMASI KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II</p> <p>Jum'at, 7 Januari 2022</p> <p>PERKARA BERJALAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NOMOR PERKARA</th> <th>HAKIMPANITERA</th> <th>SIDANG PERTAMA</th> <th>PUTUS</th> <th>MINUTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>41/Pid.B/2021/PN Tml</td> <td>A, C5, C7 - D1</td> <td>2021-08-02</td> <td>2021-10-07</td> <td>2021-10-07</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>42/Pid.B/2021/PN Tml</td> <td>A, C5, C7 - D2</td> <td>2021-08-02</td> <td>2021-10-07</td> <td>2021-10-07</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>43/Pid.B/2021/PN Tml</td> <td>A, C5, C7 - D4</td> <td>2021-08-02</td> <td>2021-10-07</td> <td>2021-10-07</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>45/Pid.B/2021/PN Tml</td> <td>A, C5, C7 - D2</td> <td>2021-08-12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>46/Pid.B/2021/PN Tml</td> <td>A, C5, C7 - D4</td> <td>2021-08-12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>47/Pid.B/2021/PN Tml</td> <td>C1, C3, C7 - D2</td> <td>2021-09-23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>49/Pid.B/2021/PN Tml</td> <td>C2, C4, C5 - D1</td> <td>2021-08-25</td> <td>2021-10-06</td> <td>2021-10-06</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NOMOR PERKARA	HAKIMPANITERA	SIDANG PERTAMA	PUTUS	MINUTASI	1	41/Pid.B/2021/PN Tml	A, C5, C7 - D1	2021-08-02	2021-10-07	2021-10-07	2	42/Pid.B/2021/PN Tml	A, C5, C7 - D2	2021-08-02	2021-10-07	2021-10-07	3	43/Pid.B/2021/PN Tml	A, C5, C7 - D4	2021-08-02	2021-10-07	2021-10-07	4	45/Pid.B/2021/PN Tml	A, C5, C7 - D2	2021-08-12			5	46/Pid.B/2021/PN Tml	A, C5, C7 - D4	2021-08-12			6	47/Pid.B/2021/PN Tml	C1, C3, C7 - D2	2021-09-23			7	49/Pid.B/2021/PN Tml	C2, C4, C5 - D1	2021-08-25	2021-10-06	2021-10-06
NO	NOMOR PERKARA	HAKIMPANITERA	SIDANG PERTAMA	PUTUS	MINUTASI																																														
1	41/Pid.B/2021/PN Tml	A, C5, C7 - D1	2021-08-02	2021-10-07	2021-10-07																																														
2	42/Pid.B/2021/PN Tml	A, C5, C7 - D2	2021-08-02	2021-10-07	2021-10-07																																														
3	43/Pid.B/2021/PN Tml	A, C5, C7 - D4	2021-08-02	2021-10-07	2021-10-07																																														
4	45/Pid.B/2021/PN Tml	A, C5, C7 - D2	2021-08-12																																																
5	46/Pid.B/2021/PN Tml	A, C5, C7 - D4	2021-08-12																																																
6	47/Pid.B/2021/PN Tml	C1, C3, C7 - D2	2021-09-23																																																
7	49/Pid.B/2021/PN Tml	C2, C4, C5 - D1	2021-08-25	2021-10-06	2021-10-06																																														

			<p>Sistem Unggahan Informasi Kepaniteraan atau disingkat SUIKE adalah aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mengolah data-data menjadi informasi dari setiap bagian kepaniteraan untuk ditampilkan dilayar monitor atau televisi yang terdapat pada ruangan masing-masing kepaniteraan.</p>
<p>4</p>		<p>Aplikasi Antrian Panggilan Sidang Elektronik (APIK)</p>	 <p>Aplikasi digital yang memberikan informasi pemanggilan sidang bagi pencari keadilan dan Majelis Hakim serta Panitera Pengganti untuk memulai persidangan.</p>
<p>5</p>		<p>Aplikasi TRIO</p>	 <p>Sistem Antrian Prioritas (TRIO) adalah suatu sistem aplikasi antrian yang berfungsi memudahkan pengunjung umum maupun pengunjung yang termasuk dalam kelompok prioritas (Lansia, Ibu Hamil dan Disabilitas) untuk mengambil nomor antrian pelayanan di PTSP Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Selain itu aplikasi ini juga memudahkan petugas PTSP untuk memberikan pelayanan prima bagi seluruh pengunjung PTSP khususnya masyarakat yang termasuk dalam kelompok prioritas.</p>
<p>6</p>		<p>Aplikasi E-Lang Gerilya</p>	 <p>Elektronik Tilang Pengadilan Negeri Tamiang Layang (e-LANG GERILYA) merupakan aplikasi berbasis teknologi</p>

			informasi yang meliputi informasi tilang yang dilimpah, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tamiang Layang.
7		Layar informasi berbasis Android	 <p>Layar informasi berbasis Android di gunakan untuk mempermudah seseorang dalam melihat jadwal sidang, mencari informasi perkara, berita, mengambil kartu antrian tamu PTSP dan untuk memberikan penilaian Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dan antrian tamu PTSP pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang.</p>

8. Pengadilan Negeri Kasongan

No	Pengadilan Negeri	Jenis Inovasi	Penjelasan
1	Pengadilan Negeri Kasongan	Buku pelayanan publik Pengadilan Negeri Kasongan	 <p>Buku pelayanan publik Pengadilan Negeri Kasongan yang dicetak dalam huruf Braille bagi penyandang disabilitas Tunanetra.</p>
2		Layanan Informasi yang dilengkapi Juru Bahasa Isyarat (JBI)	 <p>Video pada layanan informasi ini berisi tentang pelayanan pada Pengadilan Negeri Kasongan yang sudah dilengkapi dengan Juru Bahasa Isyarat (JBI).</p>

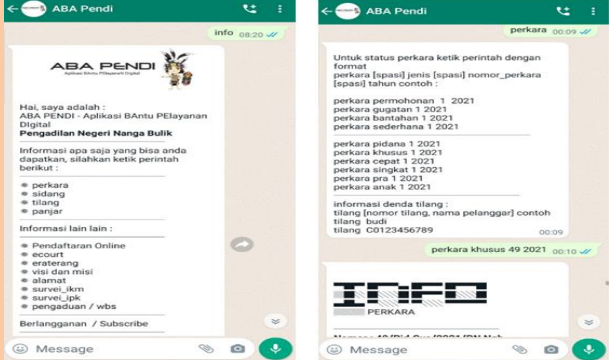


3	QRcode Informasi Layanan Prioritas	 <p>QRcode ini berfungsi untuk membantu para penyandang disabilitas dalam mencari informasi layanan pada Pengadilan Negeri Kasongan.</p>
4	Sarana dan Prasarana Disabilitas	 <p>Pengadilan Negeri Kasongan juga terus melengkapi sarana prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas, diantaranya ruang sidang khusus disabilitas, layanan antrian prioritas, guiding block dan warning block menuju gedung, guiding block dan warning block menuju ruang sidang, ruang sidang khusus disabilitas, dan informasi layanan antrian prioritas.</p>


9. Pengadilan Negeri Kuala Kurun

No	Pengadilan Negeri	Jenis Inovasi	Penjelasan
1	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan Hukum Masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan Pos Bantuan Hukum	 <p> KERJA SAMA ANTARA LEMBAGA PERADILAN DAN PEMERINTAH DAERAH ADALAH LANDASAN YANG KUAT BAGI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN, KEMUDIAN ADANYA PERJANJIAN KERJA SAMA INI JUGA SEBAGAI BENTUK BUKTI NYATA PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA PERADILAN BISA BERSAMA-SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN, KEAMANAN, KESEJAHTERAAN BAGI SELURUH MASYARAKAT GUNUNG MAS. DENGAN ADANYA PERJANJIAN INI PENTING ADANYA UNTUK MENGUATKAN HASIL MEDIASI YANG DILAKSANAKAN OLEH KEPALA DESA DAN LURAH DALAM BENTUK KESEPAKATAN</p>

perdamaian, melalui putusan hakim dan akta perdamaian yang tentunya memiliki kekuatan hukum. Kemudian, jika usaha perdamaian yang dilakukan oleh kades/lurah itu berhasil, maka kades/lurah bisa mengajukan kepada posbakum untuk dibuatkan putusan perdamaian. Kasus perdata yang dimaksud di sini yang bersifat personal bukan kasus perdata yang melibatkan organisasi, hal itu bisa dikoordinasikan dengan posbakum dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gunung Mas.




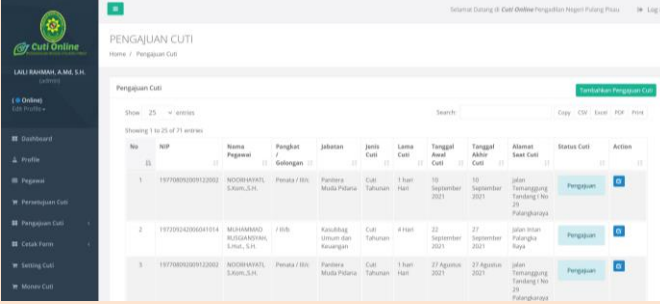
10. Pengadilan Negeri Nanga Bulik

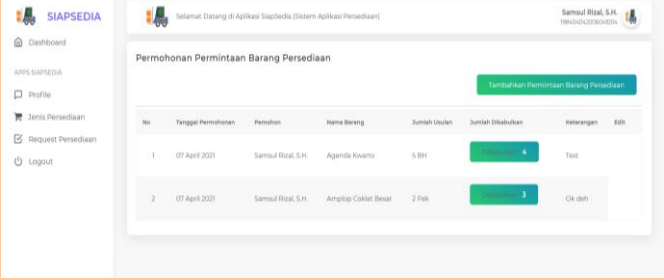
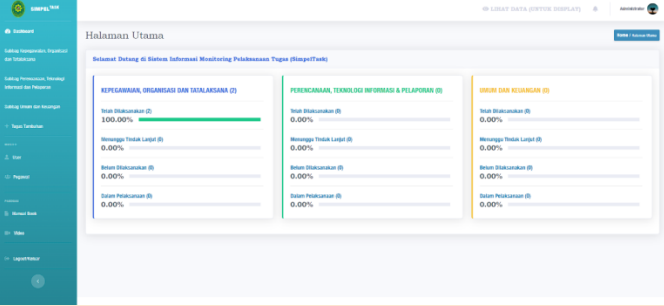
No	Pengadilan Negeri	Jenis Inovasi	Penjelasan
1	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	ABA PENDI	 <p>Aplikasi Virtual Assistant ABA PENDI (Aplikasi Bantu PELayanaN Dlgital) merupakan aplikasi berbasis WhatsApp yang berguna untuk masyarakat pencari keadilan untuk dapat mengetahui cara pendaftaran (ecourt), eraterang, status dan detail perkara.</p>
2		Monitoring & Analisa Pimpinan Pengadilan (Monalisa)	 <p>MONALISA (Monitoring & Analisa Pimpinan Pengadilan) merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk bertujuan mempermudah dan mempersingkat waktu dalam melakukan monitoring dan analisa terhadap capaian kinerja yang dilakukan oleh Pimpinan. Fitur yang disediakan dalam aplikasi ini diantaranya adalah Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara, Capaian Realisasi Anggaran, Hasil Survei dan Notifikasi terhadap penginputan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).</p>
3		SILAPOR	 <p>Aplikasi Berbasis Web yang berfungsi sebagai wadah informasi dokumen pelaporan yang ada di Pengadilan Negeri Nanga Bulik. SILAPOR dapat diakses melalui link http://www.silapor.pn-nangabulik.go.id/.</p>

4		PTSP ONLINE	 <p>Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan terhadap sistem pelayanan. Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam melakukan perubahan sistem tersebut berinovasi untuk memberikan layanan secara daring melalui PTSP Online. PTSP Online dapat diakses melalui link http://ptsp.pn-nangabulik.go.id/.</p>
---	--	-------------	--

11. Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No	Pengadilan Negeri	Jenis Inovasi	Penjelasan
1.	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Reading Corner	 <p>Pengadilan dalam Pelayanan Kepada Masyarakat telah memberikan Reading Corner Untuk Masyarakat Setiap Harinya dan telah dilakukan sosialisasikan melalui Banner pada Pengadilan negeri Pulang Pisau yang bisa diakses Masyarakat.</p>
2		Barcode Brosur Pelayanan	

			<p>Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah membuat Barcode Brosur Pelayanan yang dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat dan bertempat di lobby PTSP Pengadilan Negeri Pulang Pisau.</p>
3		Aplikasi SIKOTAK	 <p>Aplikasi yang dapat memberikan informasi dan ruang untuk tempat penyimpanan arsip dokumen kepegawaian dan ortala.</p>
4		SI APARAT	 <p>Aplikasi ini berfungsi untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan informasi layanan Pengadilan Negeri Pulang Pisau menggunakan sarana Whatsapp.</p>
5		Aplikasi ONE CLICK	 <p>Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah Pegawai Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mempermudah mengakses seluruh dokumen.</p>
6		E-Cuti <i>Online</i>	 <p>E-Cuti <i>Online</i> merupakan aplikasi pengajuan dan monitoring cuti secara online.</p>

<p>7</p>		<p>Sistem Aplikasi Barang Persediaan (SIAPSEDIA)</p>	 <p>Aplikasi SIAPSEDIA merupakan permintaan persediaan secara online terhadap bahan persediaan dari tiap Sub Bagian kepada Sub Bagian Umum Pengadilan Negeri Pulang Pisau.</p>
<p>8</p>		<p>Sistem Informasi Monitoring Pelaksanaan Tugas (SimpelTask)</p>	 <p>Aplikasi Simpeltask merupakan Sistem Informasi Monitoring Pelaksanaan Tugas yang bertujuan untuk memonitoring capaian kinerja yang telah direncanakan dan monitoring rencana kinerja yang akan dilaksanakan dalam waktu tertentu khususnya di bagian kesekretariatan yang terdiri dari Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, dan Bagian Perencanaan, Tekonologi Informasi, dan Pelaporan.</p>



BAB VI

PENGAWASAN

167 INTERNAL

171 EVALUASI

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

I. PENGAWASAN MELEKAT

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016, tanggal 25 Juli 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya, mengatur tentang pengawasan oleh atasan langsung, sehingga Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku kawal depan (provost) Mahkamah Agung telah melaksanakan pengawasan melekat yang berupa serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang dilaksanakan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara terus menerus agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan efektif dan efisien sesuai rencana dan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku;

Dalam pelaksanaan pengawasan melekat ini, di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangkaraya meliputi pengawasan pembinaan bidang-bidang pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pengawasan daerah pada Pengadilan Negeri di-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan menindak lanjuti pengaduan;

1. Pengawasan Bidang pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam melaksanakan pengawasan bidang telah menunjuk Hakim Tinggi Pengawas Bidang sebagaimana ketentuan dalam SK Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor :50/KPT.W16-U/SK.PW1.1/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Namun sehubungan dengan adanya beberapa Hakim Tinggi yang mutasi ke Pengadilan Tinggi yang lain berdasarkan hasil TPM oleh Dirjen Badilum, maka Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menerbitkan SK Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor:104/KPT.W16-U/SK.PW1.1/VIII/2024 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 6 Agustus 2024 yang susunan Pengawas Bidang sebagai berikut:

NO	BIDANG PENGAWASAN	HAKIM TINGGI
1	KEPANITERAAN PERDATA/ DELEGASI/ EKSEKUSI	Diris Sinambela, S.H.
		Suswanti, S.H., M.H.
2	KEPANITERAAN PIDANA	Didik Wuryanto, S.H., M.H.
		Abdul Wahib, S.H., M.H.

3	KEPANITERAAN HUKUM/ IPAK/ IKM	Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum
		Heru Budyanto, S.H., M.H.
4	KEPANITERAAN TINDAK PIDANA KORUPSI	Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum
		Agung Iswanto, S.H.,M.H.
		Erry Theresia, S.H., M.H.
		Lily Solichul Mukminah, S.H., M.H
5	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Didit Susilo Guntono, S.H., M.H.
		Maskur, S.H.
6	SUBBAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	Abdul Wahib, S.H., M.H.
		Sari Sudarmi, S.H.M.H.
7	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN	Didik Wuryanto, S.H., M.Hum
		Sari Sudarmi, S.H.M.H.
8	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	Bonny Sanggah, S.H., M.Hum
		Agung Iswanto, S.H., M.Hum
9	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.
		Bonny Sanggah, S.H., M.Hum
		Suswanti, S.H., M.H.
10	PEMBINAAN MENTAL/SPIRITUAL	Abdul Wahib, S.H., M.H.
		Maurid Sinaga, S.H., M.Hum
11	KESEHATAN DAN OLAH RAGA	Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum
		Heru Budyanto, S.H., M.H.
12	HUMAS	Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.
		Heru Budyanto, S.H., M.H.
		Agung Iswanto, S.H., M.Hum

Dalam melaksanakan tugasnya Hakim pengawas bidang meliputi :

1. Bidang Teknis, yaitu :
 - a. Memantau pelaksanaan penyelesaian perkara banding di Pengadilan Tinggi Palangkaraya;
 - b. Memantau dan memeriksa prosedur penerimaan perkara banding, administrasi register perkara banding;
 - c. Memantau dan memeriksa laporan perkara banding dan kearsipan perkara banding;
 - d. Memberikan petunjuk dan bimbingan sesuai pola pembinaan dan administrasi perkara;
 - e. Menginventarisir temuan baik teknis maupun administrasi peradilan dan menyampaikan laporannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan disertai saran dan solusinya;
2. Bidang Administrasi, yaitu :
 - a. Memantau pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;

- b. Memantau kedisiplinan dan kinerja setiap pegawai Pengadilan Tinggi Palangkaraya baik Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Pejabat Kesekretariatan beserta stafnya;

Hasil pengawasan bidang sebelum rapat bulanan diserahkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku koordinator pengawas bidang untuk dilakukan monitoring dan evaluasi.

Bahwa guna meningkatkan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan cara mempermudah dan menyederhanakan tata cara pelayanan, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:3239/DJU/SK/HM.02.3/II/2019 Pasal 6 angka 5 perlu ditunjuk Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor:104/KPT.W16-U/SK.PW1.1/VIII/2024 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 6 Agustus 2024. Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta membuat laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk setiap bulannya

II. PENGAWASAN DAERAH

Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada Tahun 2024 telah melaksanakan 22 (dua puluh dua) kali pengawasan dan 13 (tiga belas) kali pembinaan. Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi Pengadilan Negeri yang berada di Kalimantan Tengah.

Dalam pelaksanaannya Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah membentuk tim pengawasan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 50/KPT.W16-U/SK.PW1.1/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Namun sehubungan dengan adanya beberapa Hakim Tinggi yang mutasi ke Pengadilan Tinggi yang lain berdasarkan hasil Tim Promosi dan Mutasi oleh Dirjen Badilum, maka telah menerbitkan SK Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 112/KPT.W16-U/SK.PW1.1/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang susunannya sebagai berikut:

NO	HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH	DAERAH PENGAWASAN
	Dr. MARSUDIN NAINGGOLAN, S.H., M.H.	KOORDINATOR
1	<ul style="list-style-type: none"> • Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum. • Heru Budyanto, S.H., M.H. • Agung Iswanto, S.H., M.H. • Erry Theresia, S.H., M.H. • Lily Solichul Mukminah, S.H., M.H. 	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
2	<ul style="list-style-type: none"> • Bonny Sanggah, S.H., M.Hum. • Heru Budyanto, S.H., M.H. 	PENGADILAN NEGERI SAMPIT
3	<ul style="list-style-type: none"> • Didik Wuryanto, S.H., M.Hum. • Maskur, SH. 	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
4	<ul style="list-style-type: none"> • Diris Sinambela, S.H. • Didit Susilo Guntono, S.H., M.H. 	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS
5	<ul style="list-style-type: none"> • Didik Wuryanto, S.H., M.Hum. • Sari Sudarmi, S.H., M.H. 	PENGADILAN NEGERI BUNTOK
6	<ul style="list-style-type: none"> • Bonny Sanggah, S.H., M.Hum • Maskur, SH. 	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH
7	<ul style="list-style-type: none"> • Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum. • Abdul Wahib, S.H., M.H. 	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG
8	<ul style="list-style-type: none"> • Diris Sinambela, S.H., M.H. • Sari Sudarmi, S.H., M.H. 	PENGADILAN NEGERI KASONGAN
9	<ul style="list-style-type: none"> • Abdul Wahib, S.H., M.H. • Suswanti, S.H.M.H 	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN
10	<ul style="list-style-type: none"> • Didit Susilo Guntono, S.H., M.H. • Maskur, S.H. 	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK
11	<ul style="list-style-type: none"> • Heru Budyanto, S.H., M.H. • Suswanti, S.H.M.H. 	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Hasil pengawasan daerah baik itu temuan, saran dan tindak lanjut harus dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam waktu 1 (satu) bulan untuk di evaluasi guna penyempurnaan pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri yang bersangkutan pada masa yang akan datang, serta memasukkan hasil laporan berikut tindak lanjut pengawasan dalam aplikasi Makbida.

III. PENGADUAN

Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam tahun 2024 dalam menangani pengaduan telah berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya selama tahun 2024, telah menindak lanjuti pengaduan yang masuk ke bagian Kepaniteraan Hukum adalah 6 (enam) buah pengaduan terdiri dari :

- 3 (tiga) laporan pengaduan di Pengadilan Tinggi

- 3 (tiga) laporan pengaduan Pengadilan Negeri yang ditembuskan ke Pengadilan Tinggi.

Kepaniteraan telah merespon keluhan-keluhan baik yang berasal dari pencari keadilan, masyarakat pada umumnya maupun tindak lanjut atas laporan instansi lain.

B. EVALUASI

Dalam rangka evaluasi hasil pengawasan baik internal (pengawas bidang) maupun eksternal (pengawas daerah), Pengadilan Tinggi Palangkaraya memiliki aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan laporan hasil pengawasan beserta tindak lanjutnya. Aplikasi tersebut bernama Manajemen Kontrol Hatiwasbid dan Hatiwasda (Makbida).



Dalam pengawasan internal baik terhadap Pengadilan Tinggi Palangkaraya maupun Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan tugas telah sesuai dengan TUPOKSI sesuai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku walau masih perlu adanya peningkatan dibidang teknis dan administrasi.
2. Sumber daya manusia baik di Pengadilan Tinggi Palangkaraya maupun semua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya masih kurang terutama jumlah pegawai sehingga terdapat jabatan yang masih dirangkap.
3. Seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya maupun Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menerapkan aplikasi dan inovasi dari pusat diantaranya SIPP, E-Court, E-Berpadu. Eraterang, PTSP, Perkusi, Komdanas, Sikep, E Bima, Simari, SMART, dengan baik walaupun sering terjadi kendala teknis dalam hal sarana dan prasarana, hal ini setiap bulan dilakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaannya.

4. Dalam rangka pembinaan di Pengadilan Tinggi Palangkaraya selalu diadakan rapat bulanan untuk mengevaluasi kinerja yang sudah dilaksanakan dan rencana kerja yang akan dilakukan serta pimpinan selalu mengingatkan dan mensosialisasikan Nilai Utama Organisasi, PERMA Nomor 7 Tahun 2016, PERMA Nomor.8 Tahun 2016 dan PERMA Nomor. 9 Tahun 2016 serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 dan Core value ASN Berakhlak.
5. Terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada tahun 2024 telah diadakan pembinaan langsung di Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Panitera dan Sekretaris maupun dilakukan secara daring yang diikuti seluruh Pimpinan Pengadilan Negeri berikut hakim-hakim dengan materi pembinaan pada bidang kepaniteraan dan kesekretariatan serta persoalan hukum yang sedang menjadi sorotan masyarakat yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi.



BAB VII

PENUTUP

174 SIMPULAN

176 SARAN

BAB VII

PENUTUP

A. SIMPULAN

Program dan kegiatan selama tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya maupun pada Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik, meskipun belum didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana di dalam lingkungan gedung kantor maupun rumah dinas yang cukup. Keadaan ini dapat dilihat dari berbagai prestasi yang diraih oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang telah menerima Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh dengan Predikat Unggul oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, juga telah berhasil mempertahankan prestasinya dalam Lomba Layanan Pengadilan/PTSP kategori pengadilan tinggi dengan kembali memperoleh Juara II pada Tahun 2024 untuk ke-5 (lima) kalinya. Pengadilan Tinggi Palangkaraya juga memperoleh Peringkat 2 Kategori Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W) Besar atas Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-W Tahun 2024 oleh Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu Pengadilan Tinggi Palangkaraya juga memperoleh penghargaan Capaian Nilai Tertinggi pada Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Tahun 2024 sebagai Peringkat II untuk kategori Pengadilan Tinggi dengan Perkara 1 s/d 300 oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

Beberapa prestasi juga telah diraih oleh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang bertaraf nasional, antara lain :

- a) Pengadilan Negeri Palangkaraya memperoleh Peringkat III Penghargaan Penilaian Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum; Peringkat I Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Survei Kepuasan Masyarakat Kategori dalam Anugerah Mahkamah Agung RI 2024; Peringkat I Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Negeri Dengan Beban Perkara 501-1000 dalam Anugerah Mahkamah Agung RI 2024.
- b) Pengadilan Negeri Sampit memperoleh Terbaik X Penilaian Layanan Pengadilan (PTSP) pada Pengadilan Negeri Kelas IB dan Pengadilan Negeri Kelas II Tahun 2024 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

- c) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh Terbaik VII Penilaian Layanan Hukum Kategori Pos Bantuan Hukum dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- d) Pengadilan Negeri Kuala Kapuas memperoleh Terbaik III Administrasi dan keuangan Perkara pada Kategori PN kelas IB dan kelas II dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- e) Pengadilan Negeri Buntok memperoleh Peringkat Terbaik VI Capaian Nilai Tertinggi Pada Implementasi SIPP (EIS) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum; Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dengan Predikat UNGGUL dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- f) Pengadilan Negeri Kasongan memperoleh Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Gugatan Sederhana kategori Pengadilan Negeri dengan beban perkara 1-500 dengan mendapat Peringkat Terbaik III dalam Anugerah MA 2024.
- g) Pengadilan Negeri Pulang Pisau memperoleh Penganugerahan insan anti gratifikasi tahun 2024 an. KPN Pulang Pisau Bapak Mohamad Zakiuddin, S.H. dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan uraian dalam Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rasio penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebesar 98,43%, dan rasio penyelesaian perkara Pengadilan Tingkat Pertama sebesar 92,72%, yaitu:
 - a. Pengadilan Tinggi Palangkaraya
 - ❖ Pidana 100%
 - ❖ Perdata 98,43%
 - b. Pengadilan Negeri
 - ❖ Perkara Pidana Biasa 89,54%
 - ❖ Perkara Pidana Singkat 100%
 - ❖ Perkara Pidana Singkat 100%
 - ❖ Perkara Pidana Lalu Lintas 100%
 - ❖ Perkara Pra Peradilan 100%
 - ❖ Perkara Pidana Anak 95,18%
 - ❖ Perkara Tindak Pidana Korupsi 66%
 - ❖ Perkara Perdata Gugatan 77,44%
 - ❖ Perkara Perdata Permohonan 98,33%
 - ❖ Perkara Perdata Gugatan Sederhana 97,55%
 - ❖ Perkara Pengadilan Hubungan Industrial 96,83%

2. Program prioritas nasional yaitu pos bantuan hukum, sidang keliling/pelayan terpadu, perkara prodeo, seluruhnya telah terlaksana dengan baik selama tahun 2024.
3. Dalam rangka mencapai visi dan misi lembaga peradilan, sumber daya manusia adalah merupakan elemen yang sangat penting. Sumber daya manusia tersebut telah dikelola secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien berdasarkan parameter yang objektif. Produktivitas kinerjanya senantiasa dijaga dan ditingkatkan. Namun demikian masih diperlukan penambahan Hakim dan pegawai di tiap satuan kerja yang merupakan hal penting untuk segera dipenuhi sebagaimana hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.
4. Pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana serta teknologi informasi telah berjalan dengan baik. Realisasi anggaran tahun 2024 untuk DIPA Badan Urusan Administrasi sebesar Rp.78.083.697.408 atau 96,82% dari besarnya pagu anggaran. Realisasi anggaran DIPA Badan Peradilan Umum sebesar Rp.2.008.417.271 atau 97,60%. Seluruh sarana dan prasarana telah dikelola dan tercatat dengan baik, demikian pula operasional gedung baru untuk tiga satuan kerja baru telah selesai pembangunannya yaitu Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dan Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Selain itu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), *Website* Pengadilan, *E-Court (The Electronic Justice System)*, dan E-BERPADU telah diimplementasikan dengan baik.
5. Pelayanan publik senantiasa ditingkatkan sebagai upaya dalam memberikan pelayanan prima pada seluruh *stake holders*, sebagai wujud nyata upaya peningkatan pelayanan diantaranya dengan diterapkan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam pelayanan publik.
6. Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung telah melaksanakan pengawasan melekat yang meliputi pengawasan pembinaan baik di bidang teknis maupun administrasi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, serta pengawasan daerah pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

B. SARAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya serta Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya, agar dapat mencapai pembangunan yang berkenambungan maka dipandang perlu untuk:

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
2. Pengembangan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui pelaksanaan/keikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya;
3. Penambahan Anggaran untuk Belanja Modal dalam upaya pemenuhan sarana dan prasarana diantaranya sarana Teknologi dan Informasi agar dapat mengikuti perkembangan dunia digitalisasi yang sangat dinamis. Serta renovasi terhadap gedung dan meubelair kantor, rumah dinas dan meubelair beserta sarana pendukung lainnya.